

## TENTANG PENULIS



### Prof. DR. Ir Junaldi, M.Si

Penulis lahir di Padang 15 Juli 1959 dari seorang ibu petani bernama Zainar dan seorang ayah yang bernama Khalid yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan di Pantai Pasir Baru Sungai Limas Pariaman. Pada tahun 1962 Ayah hijrah ke Medan Sumatera Utara, maka penulis dibesarkan di Sumatera Utara.

Jenjang pendidikan Sekolah dasar hingga Menengah Pertama dan Menengah Atas diselesaikan di Sumatera Utara. Pada tahun 1980 memulai pendidikan jenjang

SI di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau Pekanbaru dengan menaruh jurusan Sosial Ekonomi Perikanan.

Mekah pada tahun 1986 dengan seorang gadis Bukittinggi bernama Ir. Besty Lowanda, M.Si yang merupakan teman belajar dan berdiskusi pada fakultas yang sama dan dikaruniai dua orang putra, Irfan Joenesty Pratama, S.Pi yang merupakan lulusan dari Fakultas Perikanan Universitas Padjadjaran dan Irfan Joenesty Maulidhy sarjana lulusan Komunikasi Program Studi Informatika Reputasi Universitas Padjadjaran Bandung.

Jenjang pendidikan S2 diselesaikan di Universitas Andalas Padang pada Program Studi Pembangunan Wilayah Pesisir (PWP) pada tahun 1995, dan S3 di selesaikan di Universitas Putra Malaysia Program Studi Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan pada tahun 2005. Selanjutnya pada 1 Oktober 2022 penulis memperoleh Guru Besarnya hingga saat ini berkeaktifan dalam mengajar mahasiswa S1 dan S2 di Universitas Bung Hatta Padang.

Selain mengajar penulis juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta menulis ilmiah di jurnal dan media masa khususnya tentang sosial ekonomi perikanan.

Saat ini sebagai Kaprodi Sumberdaya Perairan Pesisir dan Kelautan (SP2K) Program Pasca Sarjana Universitas Bung Hatta Padang, Buku Nelayan Sebagai Aset Bangsa merupakan buku ke-6 yang telah diselesaikan penulis. Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada Menteri/Ditri yang telah memberikan dana Hibah Penelitian selama dua tahun, serta kepada Rektor Universitas Bung Hatta dan Ketua LPPM yang telah memberikan kesempatan dalam menyelesaikan buku ini.

ISBN 978-623-5797-08-1



# NELAYAN SEBAGAI ASET BANGSA

*Prof. Dr. Ir. Junaldi, M. Si*



# **NELAYAN SEBAGAI ASET BANGSA**



**LPPM Universitas Bung Hatta**

Sanksi pelanggaran pasal 44: Undang-undang No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang hak cipta.

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

# **NELAYAN SEBAGAI ASET BANGSA**

**Prof.Dr.Ir. Junaidi. M.Si**

**Penerbit**

**LPPM Universitas Bung Hatta 2023**

Judul : **NELAYAN SEBAGAI ASET BANGSA**  
Penulis : **Prof.Dr.Ir. Junaidi. M.Si**

Sampul : **Prof.Dr.Ir. Junaidi. M.Si**  
Perwajahan: LPPM Universitas Bung Hatta  
Diterbitkan oleh LPPM Universitas Bung Hatta Maret 2023

Alamat Penerbit:

Badan Penerbit Universitas Bung Hatta  
LPPM Universitas Bung Hatta Gedung Rektorat Lt.III  
(LPPM) Universitas Bung Hatta  
Jl. Sumatra Ulak Karang Padang, Sumbar, Indonesia  
Telp.(0751) 7051678 Ext.323, Fax. (0751) 7055475  
e-mail: lppm\_bunghatta@yahoo.co.id

Hak Cipta dilindungi Undang-undang  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruhnya  
isi buku ini tanpa izin tertulis penerbit  
Isi diluar tanggung jawab percetakan

Cetakan Pertama : Maret 2023  
Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**Prof.Dr.Ir. Junaidi. M.Si**

**NELAYAN SEBAGAI ASET BANGSA,**  
Oleh : **Junaidi**, LPPM Universitas Bung Hatta, Maret 2023

1 0 4 Hlm + XIV; 18,2 cm x 25,7 cm

**ISBN 978-623-5797-28-1**

## SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA

**V**isi Universitas Bung Hatta adalah Menjadikan Universitas Bung Hatta Bermutu dan Terkemuka serta Berkelas Dunia dengan Misi utamanya meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berada dalam jangkauan fungsinya. Mencermati betapa beratnya tantangan Universitas Bung Hatta terhadap dampak globalisasi, baik yang bersumber dari tuntutan internal dan eksternal dalam meningkatkan daya saing lulusan perguruan tinggi, maka upaya peningkatan kualitas lulusan Universitas Bung Hatta adalah suatu hal yang harus dilakukan dengan terencana dan terukur. Untuk mewujudkan hal itu, Universitas Bung Hatta melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merancang program kerja kepada dosen untuk menulis buku. Kita dituntut untuk memahami elemen kompetensi yang biasa diaplikasikan dalam proses pembelajaran, melakukan riset dan menuangkan dalam bentuk buku.

Saya ingin menyampaikan penghargaan kepada saudara Prof. Dr. Ir. Junaidi, M.Si yang telah menulis buku "*Nelayan Sebagai Aset Bangsa*". Harapan saya buku ini akan tetap eksis sebagai wahana komunikasi bagi kelompok dosen dalam bidang ilmu Perikanan, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber bahan ajar untuk mata kuliah yang diampu dan menambah khasanah ilmu pengetahuan mahasiswa.

Tantangan kedepan tentu lebih berat lagi, karena kendala yang sering dihadapi dalam penulisan buku adalah tidak dipunyai hasil-hasil riset yang bernas. Kesemuanya itu menjadi tantangan kita bersama terutama para dosen di Universitas Bung Hatta.

Demikian sambutan saya, sekali lagi saya ucapkan selamat atas penerbitan buku ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala upaya yang kita perbuat bagi memajukan pendidikan di Universitas Bung Hatta.

Padang, 3 Maret 2023

Rektor

**Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., M.B.A**

## KATA PENGANTAR

**N**elayan Sebagai Aset Bangsa Merupakan Hasil Penelitian Hibah Bersaing di Danai oleh Menristek Dikti selama 2 tahun. Bahan tersebut sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam upaya memilih alternative judul penelitian di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan di Universitas Bung Hatta dan di Pasca Sarjana Universitas Bung Hatta. Buku ini juga dapat digunakan dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Perikanan, Tataniaga Hasil Perikanan, Manajemen Operasi Penangkapan Ikan dan Agribisnis Perikanan. Bahan ini diberikan pada semester dua, lima, dan semester tujuh di Fakultas Perikanan Universitas Bung Hatta dan Pascasarjana Universitas Bung Hatta.

Buku ini adalah sebagai hasil penelitian Hibah Bersaing sehingga diharapkan dapat memberi pengetahuan tambahan bagi pembacanya. Walaupun demikian, apa yang disajikan disini belumlah mencakup semua materi yang harus diberikan secara lengkap dalam satu semester. Oleh Karena itu dipilih materi materi yang sesuai dengan isu isu utama dan bersifat khusus mengenai Nelayan sebagai Aset Bangsa menggambarkan kondisi nelayan di Padang. Untuk penyajian yang lebih kompleks dan special diluar lingkup buku ini dapat dibaca pada buku-buku lain yang lebih lengkap.

Kami menyadari banyak kekurangan dan kelemahan buku ini dengan arti kata jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan untuk kesempurnaannya. Terimakasih yang sangat dalam kami persembahkan kepada Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, SE.,M.B.A selaku Rektor Universitas Bung Hatta yang telah memberikan dorongan hingga terbitnya buku ini, dan Ir. Arlius M.S.,P.hD selaku Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta yang telah mengizinkan untuk membuat buku ini, serta Direktur LPPM Dr. Azrita, M.Si beserta staf yang telah membantu lahirnya buku yang berjudul "*Nelayan Sebagai Aset Bangsa*".

Padang, 3 Maret 2023

**Prof. Dr. Ir. Junaidi, M.Si**



## DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
<b>SAMBUTAN REKTOR.....</b>	<b>v</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Profil Perikanan Indonesia.....	1
1.2 Perikanan di Indonesia .....	2
1.3 Konsumsi Ikan Indonesia.....	7
1.4 Profil Nelayan Sebagai Aset Bangsa di Kota Padang.....	9
1.4.1 Tujuan.....	10
<b>BAB II</b>	
<b>KAJIAN TERHADAP NELAYAN ASSET BANGSA MASIH MISKIN.....</b>	<b>13</b>
<b>BAB III</b>	
<b>KONDISI NELAYAN SEBAGAI ASET BANGSA DI KOTA PADANG .....</b>	<b>23</b>
3.1 Keadaan Umum Kota Padang.....	23
3.1.1 Hidrologi .....	25
3.1.2 Klimatologi.....	25
3.1.3 Jumlah Penduduk Kota Padang .....	26
3.1.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur .....	27
3.1.5 Sumbangan Antar Sektor Terhadap Perekonomian Kota Padang .....	28
3.2 Sektor Perikanan Kota Padang .....	30
3.3 Analisis Faktor Internal Kemiskinan Nelayan Sebagai Aset Bangsa .....	35
3.3.1 Kepemilikan Alat .....	35
3.3.2 Jenis Alat Tangkap Nelayan.....	37
3.3.3 Pendidikan nelayan Sebagai Aset Bangsa di Kota Padang .....	38
3.3.4 Budaya .....	40
3.3.5 Pola Hidup Masyarakat Nelayan .....	41
3.3.6 Usaha Wanita Nelayan .....	42
3.3.7 Aset .....	43
<b>BAB IV</b>	
<b>STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN NELAYAN SEBAGAI ASET BANGSA DARI FAKTOR INTERNAL.....</b>	<b>47</b>
<b>BAB V</b>	
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>49</b>
5.1 Kesimpulan .....	49

5.2 Saran .....	49
-----------------	----

## **BAB VI**

<b>FAKTOR EKSTERNAL KEMISKINAN NELAYAN SEBAGAI ASET ABNGSA DI KOTA PADANG .....</b>	<b>51</b>
6.1 Visi dan Misi Kota Padang.....	51
6.2 Kebijakan Kementerian Kelautan Perikanan .....	55
6.2.1 Penguatan Kelembagaan & Posisi Kelautan Perikanan .....	56
6.2.2 Peningkatan Daya Saing Kelautan Perikanan .....	56
6.2.3 Penguatan Pasar Dalam Negeri.....	57
6.2.4 Penguatan Pasar Ekspor .....	57
6.3 Permasalahan Sektor Perikanan .....	57
6.4 Faktor Eksternal Kemiskinan Nelayan .....	62
6.4.1 Kebijakan Program Bantuan Kementerian Kelautan Perikanan .....	62
6.5 Kebijakan Program Bantuan Kelautan dan Perikanan Kota Padang.....	67
6.6 Peranan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	69
6.7 Peranan Perusahaan Perikanan (PT. Dempo) .....	70
6.8 Peranan Pusat Pendaratan Ikan dan Pelelangan Ikan.....	72
6.9 Peranan Eksportir Ikan .....	74
6.10 Peranan Restoran dan Rumah Makan.....	75
6.11 Peranan UKM Perikanan.....	77
6.12 Peranan Lembaga Perguruan Tinggi .....	79
6.13 Model Strategi Pengentasan Kemiskinan Nelayan Ditinjau Dari Perspektif Multidimensi di Kota Padang.....	84

## **BAB VII**

<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>89</b>
7.1 Kesimpulan.....	89
7.2 Saran .....	90

## **BAB VIII**

<b>NELAYAN ASSET BANGSA PERLU DISEJAHTERAKAN.....</b>	<b>91</b>
---	-----------

## **BAB IX**

<b>SAMPAH MENYENGSAKANKAN NELAYAN.....</b>	<b>95</b>
--	-----------

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

	<u>Halaman</u>
Tabel 1.1	Tingkat Konsumsi Ikan Indonesia .....8
Tabel 1.2	Konsumsi Ikan Kg/Perkapita/Tahun Indonesia Dibandingkan Dengan Negara-Negara Asean dan China ..... 9
Tabel 2.1	Empat Kategori Penggolongan Nelayan Berdasarkan Alat Tangkap dan Armada ..... 14
Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Padang Pada Tahun 2020-2021 (orang) ..... 26
Tabel 3.2	Komposisi Penduduk Kota Padang Menurut Kelompok Umur Tahun 2021 ..... 28
Tabel 3.3	Distribusi PDRB Kota Padang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2017 – 2021 (dalam milyar )..... 29
Tabel 3.4	Jumlah Nelayan di Setiap Kecamatan di Kota Padang ..... 31
Tabel 3.5	Jumlah Alat Tangkap Ikan Menurut Jenis Tahun 2021 ..... 32
Tabel 3.6	Jumlah Produksi Ikan Laut Menurut Jenis Tahun 2021..... 33
Tabel 3.7	Jenis Alat Tangkap yang Digunakan Nelayan di Kota Padang..... 38
Tabel 3.8	Kontribusi Usaha Wanita nelayan terhadap pendapatan Keluarga..... 42
Tabel 3.9	Aset Kondisi Rumah Masyarakat Nelayan di Kota Padang..... 43
Tabel 3.10	Kepemilikan Aset lain Masyarakat Nelayan..... 44
Tabel 6.1	Kelompok Pengolah Ikan Kota Padang..... 77
Tabel 6.2	Jumlah Peserta Uji Kompetensi di TUK FPIK Univ. Bung Hatta Tahun 2014 – 2016 Per Instansi..... 80
Tabel 6.3	Jumlah Peserta Uji Kompetensi di TUK FPIK Univ. Bung Hatta Tahun 2014 - 2016 Per Bidang ..... 81



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Nilai Ekspor-Impor Neraca Periode Januari 2012- November 2017 .....	3
Gambar 1.2	Jumlah Produksi Perikanan Indonesia 2005-2014 (Ton).....	4
Gambar 1.3	Produksi Perikanan Tangkap Indonesia Tahun 1999-2013.....	6
Gambar 1.4	Komposisi Volume Produksi.....	6
Gambar 2.1	Peta Jalan Penelitian (Roadmap) Penelitian Hibah Bersaing ...	22
Gambar 3.1	Peta Kota Padang .....	23
Gambar 3.2	Pemukiman Nelayan Kota Padang.....	34
Gambar 3.3	Bardiagram kepemilikan alat tangkap di Kota Padang.....	36
Gambar 3.4	Bardiagram pendidikan nelayan dikota padang.....	39
Gambar 6.1	wawancara dengan Bpk. Agus Wahyu Santoso, MT dan Ibu Innes Rahmania .....	63
Gambar 6.2	Kapal Inka Mina yg tidak beroperasi di Pelabuhan Bungus Padang.....	64
Gambar 6.3	Demo penolakan pelarangan bagan, dan pukat.....	65
Gambar 6.4	wawancara dengan Kepala bidang Tangkap dan Kepala Seksi Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat .....	67
Gambar 6.5	Wawancara dengan kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang beserta Staf dan kabid .....	68
Gambar 6.6	Wawancara dengan Staf Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Padang .....	70
Gambar 6.7	Wawancara dengan menejer dan staf PT. Dempo Kota Padang .....	71
Gambar 6.8	Wawancara di Pusat Pelelangan ikan dan Pendaratan Ikan.....	74
Gambar 6.9	Wawancara dengan eksportir ikan di Kota Padang .....	75
Gambar 6.10	Wawancara dengan pengelola warung Lauk Pukek dan restoran di Kota Padang .....	77
Gambar 6.11	Produk olahan UKM di Kota Padang.....	78
Gambar 6.12	Pusat Pengolahan UKM di Pasie Nan Tigo Kec. Koto Tengah .....	79
Gambar 6.13	Peserta Uji Kompetensi per Instansi .....	81
Gambar 6.14	Peserta Uji Kompetensi di TUK FPIK Bung Hatta.....	82
Gambar 9.1	Sampah Hasil Tangkapan Nelayan .....	95



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Profil Perikanan Indonesia**

Akhir-akhir ini sektor perikanan sudah menunjukkan peranannya dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini terlihat bahwa kontribusi sektor perikanan memegang peranan penting dalam memacu ekspor Indonesia, melalui produk-produk perikanan di pasaran dunia, dan telah mendorong para wirausahawan muda menggeluti sektor industry perikanan. Kondisi Indonesia saat ini memegang peranan penting dalam mensuplai makanan yang bernilai gizi tinggi ini ke berbagai belahan dunia. Artinya sector perikanan mampu meningkatkan nilai tambah dalam upaya peningkatan gizi masyarakat dunia termasuk di Asia. Hal ini tidaklah mudah bagi bangsa Indonesia sebagai Negara bahari yaitu Negara laut yang memiliki banyak pulau (Burhanuddin, S dkk, 2003) sudah dimulai sejak abad XIV dan abad XV. Bila kita lihat kebelakang kejayaan laut Indonesia sudah dimulai dari kejayaan dalam sektor perdagangan di zaman Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan majapahit dimana Selat Malaka sebagai pintu gerbang yang dilayari oleh pedagang-pedagang dunia yang dikuasai oleh bangsa Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan zaman yang telah menglobal ini jumlah penduduk dunia semakin bertambah dari waktu ke waktu sampai saat ini jumlah penduduk dunia sudah mencapai  $\pm$  6.8 milyar jiwa (Koalisi Advokasi Laut Aceh, 2013).. Hal ini menuntut peningkatan jumlah makanan yang semakin banyak dan berkualitas baik dalam bentuk segar dan olahan. Oleh karena itu kedepan bangsa Indonesia harus memanfaatkan kesempatan ini dalam menyediakan produk-produk perikanan yang berkelanjutan. Kajian-kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa laut bukan saja sebagai bahan penghasil makanan juga mampu sebagai pemersatu bangsa melalui pelayaran, perdagangan serta hubungan cultural dan politik (Braudel, 1976).

Bila kita lihat perkembangan produksi perikanan dunia saat ini, FAO mengatakan bahwa sektor perikanan telah mensuplai sekitar 145 juta ton ikan pada tahun 2009, memberikan sekitar 16% asupan protein hewani untuk

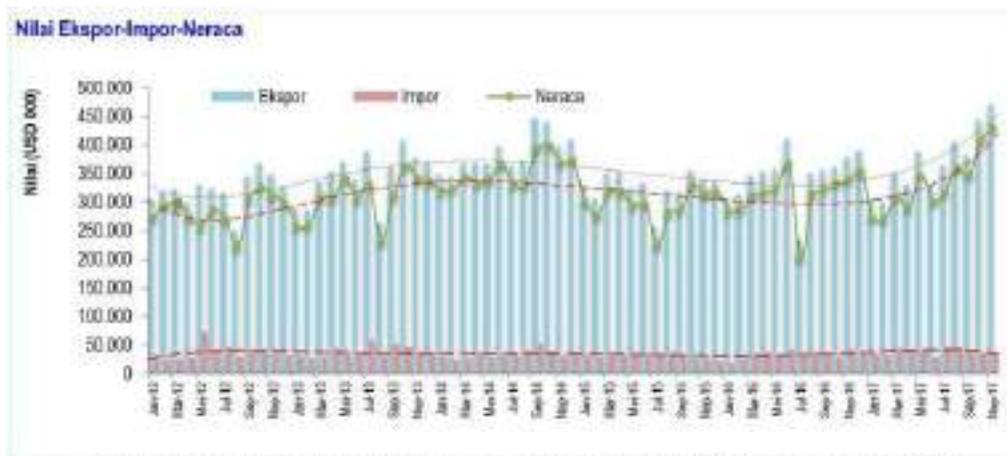
seluruh populasi masyarakat di dunia. Pada tahun 2011 suplai ikan dunia meningkat menjadi 154 juta ton dan budi daya perikanan (aquaculture) diperkirakan akan menyumbang 60% produksi ikan dunia pada 2020. Ikan yang ditangkap dari alam mencapai 90,4 juta ton pada 2011, naik 2% dari tahun 2010. Sementara budi daya perikanan, terus tumbuh dalam 25 tahun terakhir dan naik 6,2% pada 2011. Penduduk dunia mengonsumsi 130,8 juta ton ikan pada 2011. Sebanyak 23,2 juta ton ikan digunakan untuk produk non-makanan seperti pelet, minyak ikan, kultur, umpan dan produk-produk farmasi. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa ikan terus menjadi bahan pangan yang paling banyak dicari dan diperjual belikan (Chasya's World, 2012).

## **1.2 Perikanan di Indonesia**

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas laut 5,4 juta km<sup>2</sup>, panjang pantai mencapai 95.181 km. Potensi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang dikaruniai sumberdaya kelautan yang besar termasuk kekayaan keanekaragaman hayati dan non hayati kelautan terbesar. Oleh karena itu Indonesia memiliki sumberdaya terbarukan (renewable resources) baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, memiliki hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, energi gelombang, pasang surut, angin, dan Otec (Ocean thermal energy conversion), serta sumberdaya yang tidak terbarukan, seperti sumberdaya minyak dan gas serta berbagai jenis mineral. Indonesia juga memiliki potensi jasa lingkungan lainnya seperti: wisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dan sebagainya.

Berdasarkan Gambar 1. Terlihat bahwa ekspor perikanan Indonesia berfluktuasi dari tahun ke tahun, namun fluktuasi tersebut memiliki kecenderungan peningkatan. Hal ini disebabkan factor-faktor lain seperti musim, cuaca, dan migrasi dari ikan, serta fishing ground. Faktor lingkungan sumberdaya perikanan juga memegang peranan penting dimasa yang akan datang, kerusakan terumbu karang, padang lamun, dan kerusakan hutan mangrove juga berperan dalam upaya peningkatan produksi ikan di masa datang. Oleh karena itu factor lingkungan kedepan menjadi titik tolak dalam upaya peningkatan produksi perikanan di Indonesia. Hasil laporan Menteri Kelautan dan Perikanan mengemukakan bahwa Pertumbuhan nilai ekspor produk kelautan dan

perikanan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Berdasarkan data BPS yang diolah Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP), pada periode Januari – November 2016-2017, nilai ekspor produk perikanan naik 8,12% dari USD3,78 miliar pada 2016 menjadi USD4,09 miliar pada 2017. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam konferensi pers di kantor KKP, Kamis (11/1), mengungkapkan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, KKP akan terus mengupayakan peningkatan produksi dan ekspor produk perikanan Indonesia. Untuk mewujudkannya, penegakan hukum dalam melawan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing harus tetap digalakan.



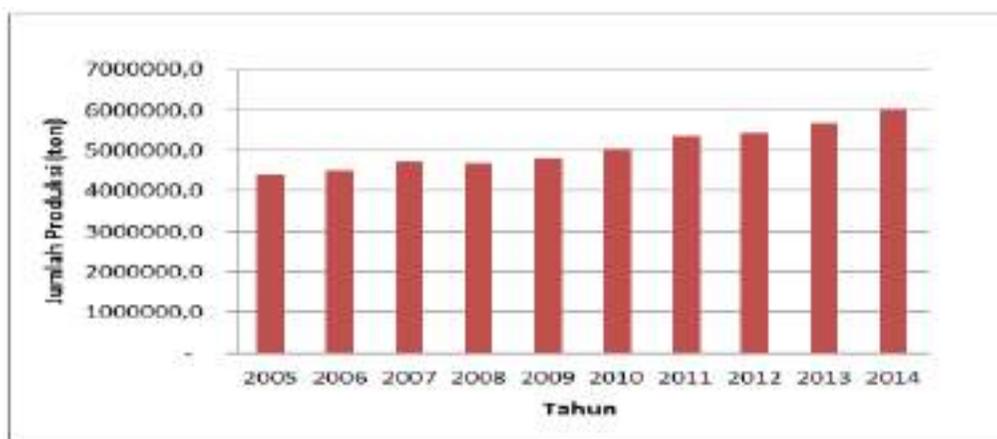
Gambar 1. Nilai Ekspor-Impor-Neraca Periode Januari 2012 – November 2017

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Nilanto Perbowo juga memaparkan terkait kenaikan neraca perdagangan yang mengalami pertumbuhan sebesar 7,42% dari USD3,403 miliar pada 2016 menjadi USD3,655 miliar pada 2017. Sementara itu, untuk nilai neraca perdagangan perikanan Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun dari 2012-2016 naik sebesar 2.31% per tahun. Angka ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan negara-negara pesaing seperti Tiongkok (+0.60%), Vietnam (-21.39%), Filipina (-6.75%), dan Thailand (-15.14%) dalam periode yang sama.

Pada periode Januari – November 2016-2017 berbagai komoditas kelautan dan perikanan mengalami peningkatan nilai ekspor, di antaranya udang

mengalami kenaikan 0,53%, tuna tongkol cakalang (TTC) naik 18,57%, rajungan & kepiting (RK) naik 29,46%, cumi sotong gurita (CSG) naik 16,54%, dan rumput laut (RL) naik 23,35%, sedangkan komoditas lainnya naik 3,61%. Pada periode yang sama, nilai ekspor produk kelautan dan perikanan ke negara tujuan utama juga menunjukkan peningkatan. Nilai ekspor ke Amerika Serikat naik 12,82%, Jepang naik 8,31%, ASEAN naik 3,42%, Tiongkok naik 11,28%, Uni Eropa naik 9,38%, dan lainnya turun 1,76%.

Bila kita lihat jumlah produksi perikanan Indonesia dari tahun 2005-2014 seperti terlihat pada Gambar 1.2 mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Hal ini tentu akan meningkatkan devisa Negara dalam upaya membangun bangsa dan Negara Republik Indonesia. Hal ini juga merupakan dampak dari kebijakan Menteri Perikanan dan Kelautan dalam menyongsong perdagangan bebas Asia.



Gambar 1.2 Jumlah Produksi Perikanan Indonesia 2005-2014 (Ton).

Peningkatan produksi perikanan Indonesia merupakan hasil dari tangkapan para nelayan di seluruh Indonesia seperti terlihat pada Gambar 1.3 dibawah ini. Dari table tersebut terlihat bahwa kurva menunjukkan bahwa hasil tangkapan ikan meningkat terus dari tahun ke tahun. Peningkatan ini disebabkan kebijakan pemerintah dan swasta dalam mengejar target produksi dan kontribusi sector perikanan di tahun akan datang dalam upaya maerauk devisa Negara. Pada 2015, produksi perikanan 6,52 juta ton dengan nilai mencapai Rp 116,3 triliun. Adapun pada 2014, produksi perikanan tangkap 6,21 juta ton dengan nilai Rp108,5 triliun, pada 2013 produksinya 5,86 juta ton dengan

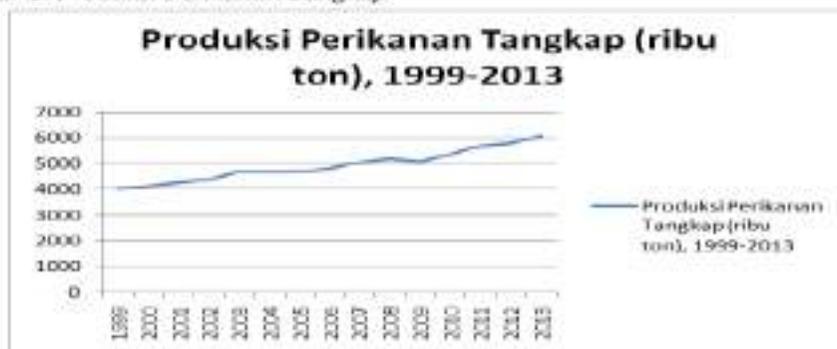
nilainya Rp 85,1 triliun, dan produksi 2012 hanya 5,84 juta ton dengan nilai Rp 79,3 triliun. Data produksi perikanan tangkap yang meningkat di 2016 juga diikuti dengan kenaikan nilai tukar **nelayan** yang menjadi ukuran kesejahteraan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), KKP menyampaikan bahwa nilai tiket nelayan terus menunjukkan angka kenaikan. Pada 2016, nilai tukar nelayan mencapai 109, naik dari 106,14 pada 2015, dan 102,97 pada 2014 lalu. Seperti diketahui, setelah gencar melakukan moratorium kapal eks asing dan melarang bongkar buat kapal di tengah laut (transshipment), KKP membuat berbagai kebijakan pada 2016. Misalnya, program bantuan sarana penangkapan ikan yakni memberikan 1.322 kapal dan 7.012 paket alat penangkapannya ikan kepada nelayan. Selain itu ada pula, program peningkatan kehidupan nelayan yakni bantuan premi asuransi nelayan untuk 969.075 nelayan dan sertifikat hak atas tanah kepada 10.284 calon penerima.

Dirjen Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja mengatakan, peningkatan produksi tersebut salah satunya dipicu oleh bertambahnya jumlah kapal perikanan. Di tahun 2017, KKP telah memberikan bantuan kapal perikanan sebanyak 755 unit. Selain itu, menurutnya, produksi nelayan tangkap juga terus meningkat seiring dengan kegiatan pemberantasan kapal asing pencuri ikan yang terus dilakukan. "Dampak dari perginya kapal-kapal asing itu memberikan kesempatan bagi stok ikan untuk kembali regenerasi," ujarnya. Berdasarkan data Komisi Nasional (Komnas) pengkajian sumber daya ikan (Kajiskan), potensi stok ikan Indonesia meningkat signifikan dari 9,93 juta metrik ton pada 2015 menjadi 12,5 juta metrik ton pada 2016. Di tahun 2018, Sjarief mengatakan, KKP menargetkan produksi perikanan tangkap dapat kembali meningkat menjadi 9,45 juta ton dengan nilai Rp 209 triliun. Untuk mencapai target itu, Ditjen Perikanan Tangkap akan memperbanyak izin kapal angkut untuk membawa hasil tangkapan ikan dari wilayah timur Indonesia yang potensinya masih besar. Selain itu, KKP juga akan kembali menyalurkan bantuan kapal perikanan sebanyak 513 unit.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP juga mencatat adanya peningkatan produksi di tahun lalu. Sampai Oktober 2017, berdasarkan data sementara KKP, volume produksi perikanan budidaya

mencapai 16,1 juta ton. Angka itu naik tipis dibandingkan produksi pada 2016 yang mencapai 16,0 juta ton.

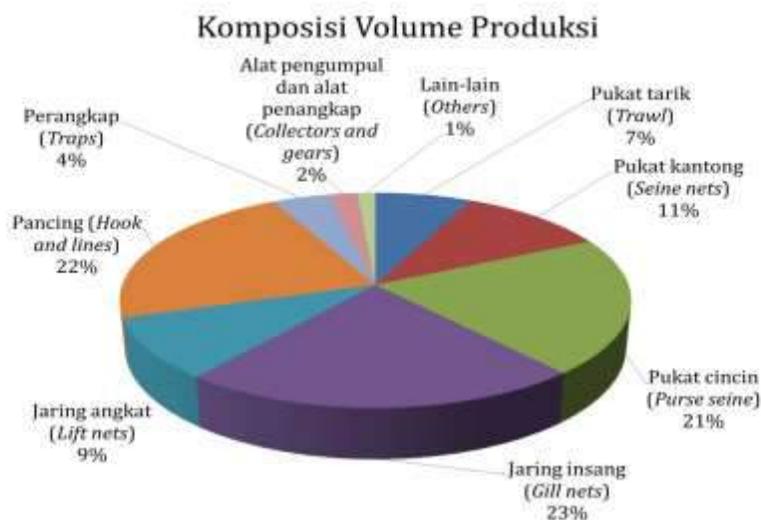
Gambar 1. Produksi Perikanan Tangkap



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar 1.3 Produksi Perikanan Tangkap Indonesia Tahun 1999-2013.

Untuk lebih jelasnya perkembangan produksi perikanan tangkap dapat dilihat pada Gambar 1.4. Gambar 1.4 menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap dengan beraneka alat tangkap di Indonesia seperti: Perangkap (Traps) 4%, Alat Pengumpul dan penangkap (2%), lain-lain (1%), Pukat tarik (7%), Pukat Kantong (11%), Pukat cincin (21%), Jaring insang (23%), Jaring angkat (9%), dan Pancing (22%).



Sumber : Kementerian Keuangan RI, 2014

Gambar 1.4 Komposisi Volume Produksi

### 1.3 Konsumsi Ikan Indonesia

Berdasarkan laporan FAO di tahun 2009 mengemukakan bahwa sektor perikanan dunia telah menyediakan ikan konsumsi sebanyak 145 juta ton ikan, dan memberikan sekitar 16% asupan protein hewani untuk seluruh populasi masyarakat di dunia. Di tahun 2011 telah disuplai ikan sebanyak 154 juta ton untuk seluruh masyarakat dunia. Jika kita lihat perkembangannya mengalami peningkatan dari tahun 2009, peningkatan ini disebabkan naiknya sumbangan perikanan budidaya sebesar 60% produksi perikanan dunia di tahun 2020.

Bila kita lihat tingkat konsumsi perikanan dunia pada saat ini mengalami rekor tertinggi, hal ini dipublikasikan oleh badan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dalam pembukaan pertemuan komite PBB dalam masalah perikanan yang ke 29 yang dilangsungkan di markas FAO di Roma. Badan ini mengemukakan bahwa konsumsi ikan dunia saat ini telah mencapai tingkat tertinggi dimana setiap orang mengkonsumsi 17 kg ikan setiap harinya.

Namun hal ini menjadikan kekhawatiran seorang ilmuwan biologi dari Standford University yang bernama Stephen Palkumbi, dalam catatannya mengemukakan bahwa pada tahun 2048 mendatang tidak akan ada lagi menu seafood di dunia ini yang bersumber dari lautan. Kekhawatiran ini dilihatnya dari analisisnya terhadap 64 ekosistem laut terbesar di dunia, sekitar 83% perikanan tangkap dunia mengalami penurunan 10,6 metrik ton sejak tahun 1994. Bila keadaan ini tidak berubah secara total, keruntuhan perikanan dunia diperkirakan terjadi pada tahun 2048. Kekhawatiran ini juga dipicu oleh penangkapan saat ini tidak mengacu kepada perikanan yang berkelanjutan.

Dilihat dari perkembangan konsumsi ikan di Indonesia berdasarkan laporan FAO, konsumsi ikan di masyarakat Indonesia jauh tertinggal dari semua negara di ASEAN, misalnya konsumsi ikan negara Malaysia dan Singapura lebih dari dua kali lipat konsumsi ikan masyarakat Indonesia. Pada saat ini konsumsi ikan Malaysia mencapai 56,1 kg/capita/tahun, Singapura mencapai 48,9 kg/capita/tahun, sementara Filipina mencapai 35,4 kg/capita/tahun. Sementara konsumsi ikan Indonesia di tahun 2013 mencapai 35 kg/capita/tahun dan ditargetkan naik menjadi 38 kg/capita/tahun di tahun 2014 (Nurhayati, 2014) dan (Waluyani, 2012). Rendahnya tingkat konsumsi ikan di Indonesia ini disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat, dan masih sulitnya mendapat ikan

di daerah pelosok. Karena lambatnya distribusi ikan segar ke tangan konsumen menyebabkan harga ikan menjadi mahal sampai ke tangan konsumen. Faktor lain disebabkan oleh adanya permainan harga mulai dari tingkat agen, sub-agen, dan pengecer di berbagai tingkat pasar. Sebaiknya pemerintah perlu menetapkan harga ikan pada tingkat bawah dan harga tingkat atas, agar tidak terjadi fluktuasi harga yang sangat tinggi pada saat tidak musim ikan (Junaidi, 2005). Bila kita lihat negara tetangga mengapa konsumsi ikan mereka lebih tinggi dari kita masyarakat Indonesia, hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah tentang harga ikan di setiap wilayah di Malaysia. Harga ikan di Malaysia ditetapkan oleh pemerintah, oleh sebab itu harga tidak boleh melewati batas harga yang telah ditetapkan. Akibat harga ikan yang tidak mengalami kenaikan, maka masyarakat terus mengkonsumsi ikan sesuai dengan selera masing-masing. Sangat berbeda dengan Indonesia harga sangat ditentukan oleh musim ikan dan tidak ada kebijakan penetapan harga ikan. Di negara Malaysia jika ada pedagang yang menaikkan harga ikan semena-mena, maka polisi datang menangkap mereka, dan hal ini tidak pernah berlaku di Indonesia. Sehingga yang kaya itu adalah para agen-agen ikan yang menguasai pemasaran hasil tangkapan para nelayan.

Tabel 1.1 Tingkat Konsumsi Ikan Indonesia

Tahun	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)
2009	29,08
2010	30,48
2011	32,25
2012	33,89
2013	35,21
2014	37,89
2015	41,11

Untuk lebih jelasnya tingkat konsumsi ikan perkapita Indonesia (kg/capita/tahun) dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya dan China dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. 2. Konsumsi Ikan Kg/Perkapita/Tahun Indonesia Dibandingkan Dengan Negara-Negara Asean dan China

N0.	Negara	Rata Rata 2003 - 2005	Pertumbuhan	Perbandingan
1	Indonesia	20,9	16,27	1,00
2	Brunai	36,1	4,71	1,42
3	Cambodia	23,4	41,03	1,35
4	Malaysia	55,4	1,26	2,31
5	Myanmar	24,2	22,31	1,22
6	Philipina	31,7	11,67	1,45
7	Singapura	37,9	29,02	2,01
8	Thailand	32,6	-4,60	1,28
9	Vietnam	25,4	20,47	1,26
10	China	25,9	3,09	11,0

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, 2014.

#### **I.4 Profil Nelayan Sebagai Aset Bangsa di Kota Padang**

Kota Padang sebagai ibu kota Propinsi Sumatera Barat yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, dengan luas wilayah 1.414,96 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 694,96 km<sup>2</sup> daratan dan 720,00 km<sup>2</sup> perairan laut. Dari sebelas kecamatan terdapat enam kecamatan terletak di kawasan pantai (Bappeda Kota Padang, 2011:8). Jumlah nelayan di Kota Padang sebanyak 5.856 orang, terdiri atas 2.472 orang nelayan tradisional, tergolong nelayan miskin. Nelayan merupakan aset strategis yang perlu diberdayakan agar dia dapat keluar dari kemiskinan.

Oleh karena nelayan merupakan aset bangsa yang strategis berbagai program telah diluncurkan oleh pemerintah dalam upaya membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan seperti: bantuan alat dan kapal perikanan dimulai dari tahun 1980, dana bergulir dimulai pada tahun 1990, bantuan Modal Kerja Masyarakat Pesisir (MKPEMP) di tahun 2000, serta program gerakan

pensejahteraan masyarakat pesisir (GEPEMP) yang diprakarsai oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat di tahun 2012. Berbagai bantuan telah diluncurkan oleh pemerintah, namun kehidupan masyarakat nelayan tidak banyak mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Dorongan pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan di sektor perikanan telah dilakukan pembangunan sarana dan prasarana perikanan seperti: Pelabuhan Samudera Bungus, Pembangunan Industri Perikanan PT. Dempo, dan Fasilitas lainnya seperti PPI (Pusat Pendaratan Ikan) dan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) namun geliat tersebut masih belum kelihatan. Oleh karena pembangunan yang dilakukan masih bersifat sektoral dan terpusat, maka sangat perlu dilakukan penelitian strategi pengentasan kemiskinan ditinjau dari perspektif multi dimensi di Kota Padang.

#### **1.4.1 Tujuan**

Tujuan dari buku ini adalah menggambarkan nelayan sebagai asset bangsa terlilit oleh faktor kemiskinan nelayan dilihat dari sisi internal yaitu : kepemilikan alat tangkap: jenis alat tangkap yang dimiliki oleh nelayan dan status kepemilikan, tingkat pendidikan: jenis pendidikan yang dilalui oleh nelayan selama menjadi nelayan, budaya: menyangkut kebiasaan hidup nelayan di dalam masyarakat pesisir, termasuk warisan budaya dan kearifan lokal yang dimiliki, pola hidup: menyangkut pemanfaatan uang yang diperoleh serta penggunaan uang tersebut, usaha sampingan: aktifitas yang dilakukan oleh istri-istri nelayan dalam rumah tangga dalam upaya mencukupi kebutuhannya, peranan istri dan anak: kontribusi istri dan anak dalam meningkatkan pendapatan keluarga, dan dukungan sosial : peran nelayan dalam kehidupan sosial menyangkut kegiatan kemasyarakatan, organisasi, sosial, kegotong royongan, dan acara sedekah laut, serta kepemilikan asset produktif: adalah kepemilikan asset oleh nelayan seperti: sawah, ternak, ladang, alat tangkap dan perahu. Dari sisi internal ini melihat kemiskinan dari diri masyarakat nelayan itu sendiri.

Selanjutnya buku ini juga melihat kemiskinan dari segi eksternal meliputi; hulu dan hilir, KKP, sektor lainnya, usaha besar (industry), UKM, pusat dan daerah, pelabuhan perikanan. Faktor eksternal ini melihat pengaruh pengembangan perikanan tangkap melalui industrialisasi dan apa pengaruhnya

terhadap masyarakat nelayan. Apakah bantuan selama ini tidak memberikan manfaat terhadap kehidupan nelayan, dan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah tidak memberi manfaat terhadap hasil tangkapan mereka, serta faktor-faktor tidak termanfaatkannya semua sarana dan prasarana perikanan yang menyebabkan mereka sulit keluar dari kemiskinan atau semua faktor eksternal yang menyebabkan mereka tetap miskin. Faktor eksternal ini juga melihat peran stakeholder dalam mengembangkan sektor perikanan yang terdiri dari kebijakan pemerintah, peranan swasta dalam hal ini adalah industry perikanan, para eksportir berkelas dunia, masyarakat itu sendiri sebagai pelaku dan peranan perguruan tinggi sebagai lembaga penghasil lulusan bidang perikanan, peneliti, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. Akhir dari hasil penelitian internal dan eksternal adalah bagaimana strategi penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan, maka dilakukan evaluasi terhadap program yang telah dilakukan tersebut. Apakah ada pengaruhnya terhadap kehidupan mereka.



## **BAB II**

### **KAJIAN TERHADAP NELAYAN ASSET BANGSA MASIH MISKIN**

Sangat ironis sekali Negara Indonesia yang memiliki kekayaan sumberhayati terbesar di dunia namun masyarakat nelayan yang tinggal dikawasan pesisir, merupakan masyarakat termiskin. Nelayan adalah asset bangsa yang perlu disejahterakan. Inilah yang menjadi pertanyaan mengapa hal ini terjadi. Hasil penelitian Junaidi (1991) dan (2008) terhadap pembangunan tempat pelelangan ikan di Kota Padang hasil penelitian menunjukkan bahwa TPI hanya tempat memungut retribusi saja manfaat langsung tidak dirasakan oleh masyarakat. Hasil penelitian Junaidi (1992) terhadap paket bantuan alat tangkap di Desa malilimok di Kepulauan Mentawai hasil kajian menunjukkan bahwa setelah bantuan di berikan dan hasil tangkap meningkat namun terkendala dengan pemasaran, hal ini tidak member pengaruh terhadap kehidupan mereka. Kemajuan teknologi penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap puse seine (pukat cincin) di air bangis mampu meningkatkan produksi hasil tangkapan, namun akibat kurang infrastruktur seperti kurang es, air bersih, tidak adanya cold storage, dan kendala pemasaran, kemajuan teknologi juga tidak membawa pengaruh terhadap masyarakat nelayan (Junaidi,1992).

Penelitian terhadap factor-faktor penyebab kemiskinan nelayan yang dilakukan Junaidi (1994) di dua desa pantai yaitu: di desa maju dan di desa tertinggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat nelayan miskin di desa maju lebih miskin dibandingkan dengan di desa tertinggal. Hal ini terjadi disebabkan di desa tertinggal sebenarnya nelayan lebih sejahtera di bandingkan desa maju. Di desa tertinggal sebenarnya nelayannya lebih baik kehidupannya, oleh karena mengharapkan bantuan, maka statusnya desa maju di robah menjadi desa tertinggal. Sementara itu oleh karena desa maju terletak di ibukota kecamatan maka statusnya menjadi desa maju. Selain itu penyebab kemiskinan nelayan adalah pola hidup, jumlah tanggungan yang banyak, tidak adanya bantuan dari rantau, serta strukturalnya yang menyebabkan mereka miskin. Lebih lanjut Junaidi (2005) mengemukakan bahwa factor kemiskinan juga disebabkan adanya permainan agen di dalam pemasaran hasil tangkapan nelayan, dimana harga tidak berkointegrasi antara suatu pasar dengan pasar

lainnya. Harga dikuasai oleh agen, dan keuntungan terbesar di pegang oleh agen, dan adanya praktek ketidak jujuran dalam system pembayaran.

Peneliti lain melihat dari segi budaya seperti yang dikemukakan oleh Satria (2009) menyatakan bahwa kemiskinan masyarakat pesisir dapat dibagi menjadi tiga macam: yaitu kemiskinan structural, kemiskinan cultural dan kemiskinan alamiah. Kemiskinan structural merupakan kemiskinan yang disebabkan karena struktur ekonomi, struktur social, dan struktur politik yang tidak kondusif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kemiskinan cultural merupakan kemiskinan factor budaya, seperti kemalasan, cara berfikir fatalistic, dan rendahnya etos kewirausahaan. Sementara itu kemiskinan alamiah (natural) terjadi karena kondisi sumberdaya alam yang serba terbatas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan kegiatan produksi.

Suarta (2013) Kemiskinan disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal lebih banyak disebabkan oleh heterogenitas personal dan budaya yang dimiliki oleh keluarga miskin sedangkan faktor eksternal lebih banyak disebabkan faktor lingkungan dan struktur sosial kemasyarakatan. Persoalan kemsikinan tidak hanya menjadi persoalan keluarga miskin semata tetapi juga menjadi persoalan yang pelik bagi pemerintah.

Selanjutnya Suryati (2005) mengemukakan bahwa kemiskinan cultural mengacu kepada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh factor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif, meskipun ada bantuan dari pihak luar. Selanjutnya Arsyad (2007) menyatakan bahwa karakteristik social-ekonomi nelayan: dapat dilihat dari kapasitas jenis usaha, orientasi ekonomi, tingkat teknologi (alat tangkap dan armada) dan hubungan produksi menggolongkan nelayan menjadi 4 kategori seperti terlihat pada Tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1 Empat Kategori Penggolongan Nelayan Berdasarkan Alat Tangkap dan Armada**

Jenis usaha	Orientasi Ekonomi dan Pasar	Tingkat Teknologi	Hubungan Produksi
Usaha tradisional	Sub-sisten, rumah tangga	Rendah	Tidak hirarkis, status terdiri dari pemilik dan ABK yang homogen

Usaha Post Tradisional	Sub-sisten, surplus, RT, pasar domestik	Rendah	Tidak hirarkis, status terdiri dari pemilik dan ABK yang homogen
Usaha komersial	Surplus, pasar domestic, ekspor	Menengah	Hirarkis, status terdiri dari pemilik, manajer, dan ABK yang heterogen
Usaha industri	Surplus, ekspor	Tinggi	Hirarkis, status terdiri dari pemilik, manajer dan ABK yang heterogen

Natalia, M dan Alie, M.M. 2014. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa faktor kualitas sumber daya manusia, kondisi infrastruktur dan kepemilikan modal dan teknologi mempengaruhi terjadinya kemiskinan di kawasan Tambak Lorok, sehingga bentuk kemiskinan yang terjadi di kawasan Tambak Lorok dikategorikan sebagai bentuk kemiskinan natural.

Selanjutnya Suharto, (2002), dan (2005) mengemukakan bahwa kondisi lain yang memperburuk tingkat kesejahteraan nelayan adalah kebiasaan dan pola hidup. Nelayan sebenarnya adalah orang yang pekerja keras. Namun kendalanya adalah pola hidup konsumtif, dimana pada saat penghasilan banyak, tidak ditabung untuk persiapan paceklik, melainkan dijadikan kesempatan untuk membeli kebutuhan sekunder. Namun ketika paceklik, pada akhirnya berhutang, termasuk pada lintah darat, yang justru semakin memperberat kondisi.

Hasil penelitian Oladimeji, Y.U et al (2014) Nelayan harus dididik untuk memahami diversifikasi pekerjaan, mengadopsi teknologi yang mampu meningkatkan kehidupan rumah tangga pedesaan, dan mempertahankan sumber daya perikanan dalam tingkat yang dapat diterima dari penipisan sumber daya global dan pencemaran lingkungan.

Hasil penelitian terhadap nelayan di Kota Padang Zein (1998) mengemukakan bahwa peningkatan teknologi dalam penangkapan ikan umumnya mempunyai pengaruh positif terhadap pendapatan nelayan skala kecil. Peningkatan pendapatan terhadap pemilik kapal sebesar 109%, dan pada buruh nelayan sebesar 27%. Semakin tinggi kekuatan mesin kapal, maka peluang untuk meningkatkan pendapatan juga semakin tinggi. Hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa untuk meningkatkan pendapatan nelayan perlu

dilakukan alih teknologi kearah yang lebih maju dengan peralatan yang lebih modern, sehingga hasil tangkapan nelayan menjadi meningkat dan pendapatan juga bisa ditingkatkan. Pendapat lain juga mengemukakan Elfindri (2002) menyatakan bahwa pengalaman selama ini menunjukkan bahwa dengan memberdayakan nelayan tradisional melalui pemberian bantuan peralatan melaut belum mampu meningkatkan perekonomian nelayan, karena permasalahannya adalah peningkatan produksi bagi nelayan tradisional tidak menjamin peningkatan pendapatan, karena jumlah produksi yang besar juga menurunkan harga jual ikan.

Sulitnya nelayan dalam mendapat hasil tangkapan yang baik akibat musim ikan yang tidak menentu, selain itu adanya pencemaran lingkungan daerah tangkap nelayan yang merusak ekosistem laut membuat hasil tangkapan nelayan semakin minim. Selain itu kenaikan BBM yang menyebabkan kebutuhan pokok ikut naik membuat kehidupan rumah tangga nelayan semakin sulit. (Hariansyah, 2013).

Hasil penelitian yang dilakukan Nikijuluw (2006), Elfindri (2002) mengemukakan bahwa berbagai program telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka memberdayakan masyarakat kecil di wilayah pesisir. Setidaknya ada 8 (delapan) yang telah dilaksanakan, yaitu: (a) motorisasi armada nelayan kecil; (b) penerapan sistim rantai dingin (*cold chain system*); (c) pembangunan prasarana perikanan; (d) program peningkatan ekspor perikanan (Protekan 2003); (e) konservasi dan rehabilitasi sumberdaya perikanan; (f) pengembangan koperasi perikanan; (g) pembentukan kelompok usaha bersama (KUB); dan (h) pengembangan kemitraan usaha.

Studi kami menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program belum mampu mengatasi masalah yang dihadapi oleh nelayan dan belum mampu memberantas kemiskinan nelayan. Bantuan pemerintah yang diberikan kepada nelayan yang sering tidak efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan nelayan. (Hasanuddin *et al*, 2013).

Ustman (2007) menggolongkan karakteristik masyarakat nelayan dari sudut pandang kepemilikan asset berupa factor produksi (1) nelayan yang tidak memiliki factor produksi kelotok atau pukot beserta segala perlengkapannya,

digolongkan sebagai nelayan buruh (2) nelayan yang memiliki alat produksi kelotok atau pukot beserta perlengkapannya yang disebut juragan.

Sejumlah kekurangan hak lainnya juga membatasi peluang nelayan skala kecil dan meningkatkan kerentanan mereka. Mengingat fakta bahwa sekitar 54% dari masyarakat pesisir secara fungsional tidak memiliki lahan dan lebih dari 30% yang benar-benar tidak memiliki lahan (Islam 2006), sebagian besar keluarga nelayan pesisir juga memiliki lahan.

Menurut Sunoto (2012) tujuan industrialisasi kelautan dan perikanan adalah: (1) Meningkatkan produksi, produktivitas, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan yang berdaya saing tinggi berorientasi pasar, (2) Mempercepat pembangunan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan melalui modernisasi sistem produksi dan manajemen, (3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Prastyo, A.G . 2010 hasil dari penelitian ini adalah bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan. Oleh karenanya perkembangan pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran patut menjadi pertimbangan untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Nazmar (2013) mengemukakan bahwa program pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan, kenyataannya bahwa program pembangunan perikanan dengan menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi dengan program industrialisasi perikanan tangkap tidak selalu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nelayan skala kecil. Program industrialisasi perikanan tangkap pada umumnya hanya dinikmati oleh perusahaan perikanan tangkap skala besar saja, sedangkan nelayan skala kecil sedikit sekali dapat menikmati program tersebut, walaupun prioritas perhatian pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan diarahkan kepada kelompok nelayan skala kecil, namun masih belum memperlihatkan hasil yang signifikan. Ssesuai dengan perjalanan waktu, di satu pihak pertumbuhan ekonomi nelayan skala besar semakin nyata sedangkan pertumbuhan ekonomi nelayan skala kecil tetap saja tertinggal dan belum mampu melepaskan diri dari belenggu kemiskinan yang

dialami. Kondisi seperti ini menyebabkan terjadinya jurang pemisah status social yang semakin melebar antara kelompok pengusaha perikanan skala besar dan kelompok nelayan skala kecil.

Dengan demikian, nelayan skala kecil tidak hanya miskin; mereka juga sangat rentan. Komunitas mereka sering terisolasi, biasanya terletak di dekat tempat kerja mereka di pantai atau Khas terdekat tanah (milik pemerintah). Hal ini membuat mereka cenderung untuk bencana alam. Ketika bencana menyerang, keluarga harus membangun kembali kehidupan dan mata pencaharian mereka dari awal. Keuangan terbatas membuat sulit untuk mengembalikan rumah dan infrastruktur. Hilangnya alat tangkap, perahu, ternak dan aset rumah tangga lainnya dapat menghapus mata pencaharian. (Ahmed and Neelormi 2008)

Sebagai makhluk social, rumah tangga nelayan skala kecil juga mempunyai keinginan untuk meningkatkan taraf hidupnya, mereka terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga yang terus mendesak, kadang kala anggota keluarga juga ikut berperan dalam menopang ekonomi keluarga. Hasil penelitian yang dilakukan Zein (1998) menyatakan bahwa secara umum dalam masyarakat nelayan dikawasan pesisir, wanita memegang peranan yang amat penting untuk ikut serta menjaga kelangsungan hidup rumah tangganya disamping mempunyai tanggung jawab urusan rumah tangga, mereka juga harus ikut membantu dan terlibat aktif mencari nafkah untuk menopang pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga.

Dilain pihak Saidan (1998) juga mengemukakan bahwa peranan wanita nelayan cukup besar terhadap tambahan pendapatan rumah tangga nelayan di Kota Padang dan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh wanita nelayan bervariasi tergantung dari kesempatan peluang usaha yang ada.

Hasil Kajian Junaidi (2012) Tentang Industri Pengolahan Hasil Laut Sumatera Barat. Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa sarana untuk mendukung industry pengolahan hasil laut belum tersedia secara optimal. Sarana yang lengkap untuk mendukung industry pengolahan hasil laut ditemukan di Kabupaten Agam, dan Kota Padang. Sementara di empat lokasi lainnya tidak ditemukan. Hasil pengolahan di enam lokasi ditemukan sama, seperti ikan asin, ikan teri asin, ikan teri tawar, ikan budu, rempeyek ikan dan udang. Namun

terdapat juga perbedaan diantara lokasi tersebut seperti: empek-empek ikan di Kabupaten Agam, Tepung sala di Kabupaten Padang Pariaman, nugget ikan, abon tuna, bakso ikan, sup mata tuna di Kota Padang. Hasil pengolahan dilakukan oleh lembaga yang telah dibentuk oleh Dinas Perikanan dan Kelautan. Pemasaran pengolahan hasil laut yang terbesar adalah untuk domestic dan luar daerah seperti: Riau dan Jambi. Harapan kedepan dari industry pengolahan hasil laut adalah terciptanya produk olahan yang sesuai dengan standard kesehatan untuk pasaran internasional, nasional, dan domestic. Tantangan kedepan adalah: belum tersedianya teknologi kemasan dan lebeling yang sesuai standard pasaran global.

Suherman dan Dault (2009) Mengemukakan bahwa peranan pelabuhan perikanan nusantara memiliki peran yang sangat strategis. Hal ini disebabkan pelabuhan perikanan nusantara merupakan tempat interaksi antara berbagai kepentingan masyarakat pantai yang bertempat tinggal disekitar pelabuhan dengan masyarakat pengguna hasil tangkapan, baik pengguna langsung maupun tidak langsung seperti: pedagang, pabrik pengolah, restoran dll. Hal ini juga sebagai titik temu (terminal point) yang menguntungkan antara kegiatan ekonomi di laut dengan ekonomi di darat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak positif keberadaan pelabuhan perikanan nusantara adalah: terjadi peningkatan usaha dan terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar.

Hasil Penelitian Silaen, Zein, dan Junaidi (2010) menunjukkan bahwa pelabuhan perikanan nusantara bungus belum berperan secara optimal. Hal ini terlihat bahwa banyak kapal-kapal nelayan tidak membongkar hasil tangkapannya di pelabuhan tersebut. Disamping kurangnya fasilitas pendukung seperti air bersih, dan bahan bakar untuk keperluan melaut. Alasan lain yang dikemukakan para nelayan adalah jauhnya jarak bongkar dengan tempat tinggal mereka, oleh karena itu para nelayan lebih menguntungkan membongkar hasil tangkapan di pelabuhan muara padang sekaligus dekat dengan tempat tinggal mereka.

Dukungan ekonomi para nelayan juga bersumber dari kontribusi ekonomi produktif para wanita nelayan oleh karena itu hasil kajian Akbarini, Gumilar, dan Garandiosa (2012) menunjukkan bahwa pengambilan keputusan rumah tangga dilakukan secara demokratis dengan dominasi oleh istri nelayan.

Hal ini disebabkan bahwa kontribusi isteri nelayan cukup besar dalam keluarga nelayan yaitu: sebesar 31.32%, dengan curahan waktu kerja selama 9 jam.

Lebih jauh Elfindri (2007) Menyigi tentang implementasi program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa pada tataran konsep hamper semua program yang dilakukan pemerintah memiliki konsep yang baik untuk mengatasi persoalan kemiskinan. Tapi ketika program itu dilaksanakan justru banyak terjadi pemelencengan program. Pemelencengan program merupakan pengaruh dari system korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi dalam masyarakat sehingga sering bias pada kelompok non miskin. Hasil kajian ditemukan bahwa tiga program tersebut belum optimal memberikan akses yang luas bagi masyarakat miskin terhadap program, dua program sudah efektif yaitu: program raskin, dan program jaminan kesehatan. Sementara program bantuan pendidikan masih belum efektif mencapai target group program.

Selanjutnya Pritchett et al (2000), World Bank (2003), Elfindri dan Saputra (2005), Saputra, (2007) mengemukakan bahwa pembangunan di Indonesia sebenarnya belum memberikan sebuah pondasi yang kuat dalam rangka mengurangi angka kemiskinan. Ini akibat lemahnya system ekonomi Indonesia sehingga ketika terjadi sedikit saja gejolak ekonomi seperti saat krisis tahun 1997 mengakibatkan kenaikan angka kemiskinan.

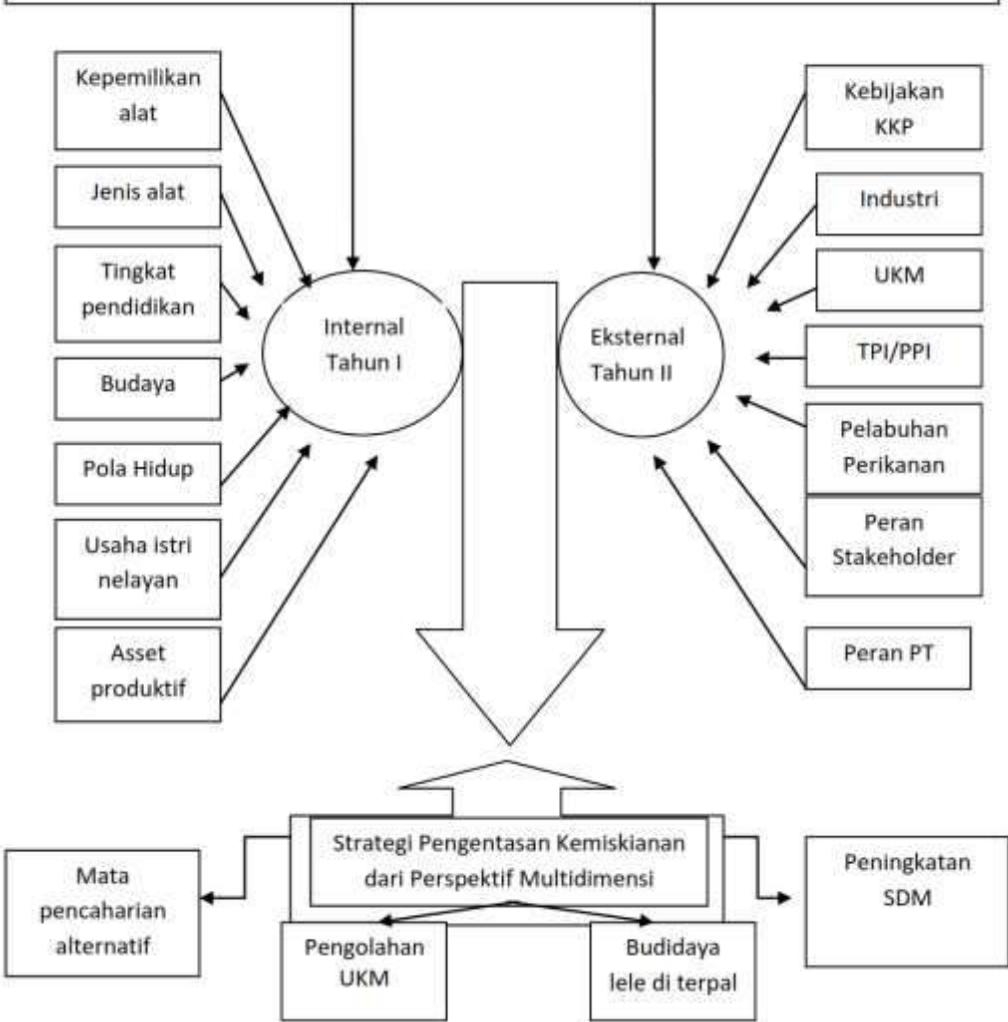
Lebih lanjut De Jainvry and Sadoulet (2000), dan Ellis (2000) mengemukakan bahwa kemiskinan masyarakat disebabkan karena kekurangan asset, namun menurut Ellis (2000), masyarakat yang memiliki asset selalu dikaitkan dengan kesejahteraan. Oleh karena itu orang miskin dengan jangkauan aktivitas dan asset yang dimiliki berbeda dalam mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Oleh karena itu banyak program penanggulangan kemiskinan tidak berjalan efektif. Hal ini dikemukakan oleh laporan Bank Dunia (2003) menyatakan bahwa masih ditemukan banyak masalah dalam hal penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan oleh: 1) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan, 2) Banyaknya praktek korupsi di Indonesia, 3) Proyek berkelanjutan sulit dihasilkan hal ini disebabkan

program pengentasan kemiskinan dibiayai oleh pemerintah dan lembaga donor menggunakan proyek-proyek basis, 4) Program menjadi lemah karena tidak tepat sasaran, hal ini disebabkan masih terbatasnya data base kemiskinan, 5) Terbatasnya kemampuan pemerintah baik pusat dan daerah dalam mengimplementasikan setiap program.

Lemahnya sumberdaya manusia di wilayah pesisir terutama nelayan skala kecil menyebabkan perekonomian mereka sulit untuk berkembang, sehingga kehidupan masyarakat di wilayah pesisir identik dengan masyarakat miskin, kondisi seperti ini merupakan tantangan bagi program pembangunan pedesaan di wilayah pesisir. Kemiskinan yang dihadapi oleh nelayan merupakan kemiskinan structural, pendapatan sebagai nelayan tidak dapat dipastikan, karena sangat tergantung kepada teknologi dan juga kondisi cuaca yang sangat mempengaruhi operasional penangkapan ikan. Disamping itu peluang pengembangan usaha ekonomi di luar sector perikanan sulit untuk dilakukan karena terbatasnya pemilikan lahan untuk pengembangan usaha. Kondisi social ekonomi seperti ini menyebabkan masyarakat di wilayah pesisir pasarah dengan pendapatan yang mereka peroleh dan mereka tidak mempunyai masa depan yang jelas. Oleh karena itu penelitian ini mencoba mengkaji startegi pengentasan kemiskinan di tinjau dari perspektif multi dimensi di Kota Padang.

**KAJIAN STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN NELAYAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF MULTI DIMENSI DI KOTA PADANG**





Selain di daratan pulau Sumatera, Kota Padang memiliki 19 pulau dimana yang terbesar adalah Pulau Sikuai di Kecamatan Bungus Teluk Kabung seluas 38,6 km<sup>2</sup>, Pulau Toran di kecamatan Padang Selatan seluas 25 km<sup>2</sup> dan Pulau Pisang Gadang seluas 21,12 km<sup>2</sup> juga di Kecamatan Padang Selatan. Padang juga memiliki pulau legendaris dengan nama pulau tersebut dihubungkan dengan peristiwa masa lalu seperti: Pulau persumpahan, Pulau ular, pulau setan, pulau pisang ketek dengan legendarisnya kapal simalin Kundang.

Wilayah daratan Kota Padang yang ketinggiannya sangat bervariasi, yaitu antara 0-1853 M diatas permukaan laut dengan daerah tertinggi adalah Kecamatan Lubuk Kilangan. Tingkat curah hujan Kota Padang mencapai rata-rata 405,58 mm perbulan dengan rata-rata hari hujan 17 hari per bulan pada tahun 2003. Suhu udaranya cukup tinggi yaitu antara 230-320 C pada siang hari dan pada malam hari adalah antara 220-280 C. Kelembabannya berkisar antara 78-81 persen.

Topologi wilayah, Kota Padang yang dilewati sejumlah aliran sungai yaitu sebanyak 21 aliran sungai. Desa pesisir/tepi laut adalah desa/ kelurahan yang memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan garis pantai/laut (atau garis pulau) dengan sumber kehidupan rakyatnya sebagian besar tergantung pada laut.

Wilayah kota Padang memiliki 11 kecamatan , ada tujuh kecamatan yang berhadapan langsung dengan garis pantai diantaranya kecamatan bungus teluk kabung luas wilayah 100,78 Km<sup>2</sup> dengan presentase 14,50 %, Padang Barat luas wilayah 7,00 Km<sup>2</sup> dengan presentasi 1,01 %, Padang Utara luas area 8,08 Km<sup>2</sup> dengan presentasi 1,16 %, Padang Selatan luas wilayah 10,03 Km<sup>2</sup> dengan presentasi 1,44 %, Nanggalo luas wilayah 8,07 Km<sup>2</sup> dengan presentasi 1,16 %, Lubuk Begalung luas area 30,91 Km<sup>2</sup> dengan presentase 4,45 % ,dan Kecamatan Koto Tangah luas wilayah 232,25 Km<sup>2</sup> dengan presentasi 33,42%. Kecamatan yang tidak memiliki pantai adalah Kecamatan Lubuk Kilangan luas area 85,99 Km<sup>2</sup> dengan presentase 12,37 %, pauh luas area 146,26 Km<sup>2</sup> dengan presentase 21,05 %, Padang Timur luas area 8,15 Km<sup>2</sup> dengan presentase 1,17 % dan Kecamatan Kuranji luas area 57,41 Km<sup>2</sup> dengan presentase 8,26 %.

Batas Kota Padang sebelah barat berhadapan dengan samudera hindia, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten pesisir selatan tepatnya di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman, sebelah Timur Berbatasan langsung dengan Kabupaten Solok.

### **3.1.1 Hidrologi**

Kondisi hidrologi Kota Padang yang dilalui oleh 6 Daerah Aliran Sungai (DAS), sungai-sungai kecil , danau dan rawa, maka wilayah Kota Padang jika dimusim hujan cukup banyak wilayah Kota Padang yang rawan terhadap banjir/genangan. Hal ini disebabkan terdapat 21 aliran sungai yang mengalir di wilayah Kota Padang dengan total panjang mencapai 133,9 Km (5 sungai besar dan 16 sungai kecil). Umumnya sungai besar dan kecil yang ada di wilayah Kota Padang ketinggiannya tidak jauh berbeda dengan ketinggian permukaan laut.

### **3.1.2 Klimatologi**

Suhu udara Kota Padang sepanjang tahun 2013 berkisar antara 22,0°C sampai 31,7°C dan kelembaban udara rata-rata berkisar antara 80% - 85% dengan curah hujan rata-rata 347,5 mm/bulan dan rata-rata hari hujan 19 hari . Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember (615 mm ) dan terendah pada bulan Maret (81 mm). Angin didominasi oleh angin Barat, Barat Daya, Barat Laut dengan kecepatan rata-rata 5-6 knot, dan kecepatan tertinggi mencapai 9 - 35 knot. Dipengaruhi oleh angin musim maka arus permukaan di wilayah perairan Kota Padang sepanjang tahun mengalir ke arah Tenggara hingga Barat Daya (musim Barat) dengan kekuatan arus antara 1 - 45 cm/detik biasanya mencapai puncak pada bulan Desember.

Arus musim Timur terjadi antara bulan April hingga Oktober, melemah dengan kekuatan antara 1 cm/detik hingga 36 m/detik. Pada bulan Juli arus mencapai kekuatan minimum antara 1 cm/detik hingga 5 cm/detik. Selain itu di perairan Kota Padang juga terjadi arus pantai yang diakibatkan oleh gelombang. Arus ini berpengaruh terhadap abrasi dan sedimentasi pantai. Tinggi gelombang yang terjadi berkisar antara 0,5 - 2,0 meter.

### 3.1.3 Jumlah Penduduk Kota Padang

Berdasarkan hasil SP 2020-2021, diperkirakan jumlah penduduk Kota Padang diharapkan menggunakan laju pertumbuhan 0,65 % per tahun, sehingga laju pertumbuhan 2,23 % tidak relevan lagi. Berdasarkan itu pula jumlah penduduk Kota Padang pada tahun 2020-2021 akan menjadi sebanyak 909040 orang pada tahun 2020 dan sebanyak 913448 orang, dan pada tahun 2021 Seperti terlihat pada Tabel 3.1

**Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Padang Pada Tahun 2020-2021 (orang)**

Kecamatan Subdistrict	Penduduk Population		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Annual Population Growth Rate (%)	
	2020	2021	2010-2020	2020-2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Bungus Teluk Kabung	27 408	27 728	1,76	1,17
2. Lubuk Kilangan	57 489	58 065	1,59	1,00
3. Lubuk Begalung	122 593	123 565	1,38	0,79
4. Padang Selatan	60 996	60 969	0,54	-0,04
5. Padang Timur	77 755	77 306	-0,01	-0,58
6. Padang Barat	42 957	42 709	-0,53	-0,58
7. Padang Utara	55 171	54 853	-2,16	-0,58
8. Nanggalo	58 535	58 320	0,21	-0,37
9. Kuranji	146 111	147 283	1,39	0,80
10. Pauh	62 228	62 167	0,48	-0,10
11. Koto Tengah	197 797	200 483	1,95	1,36
<b>Padang</b>	<b>909 040</b>	<b>913 448</b>	<b>0,84</b>	<b>0,65</b>

Sumber : BPS, Kota Padang Dalam Angka 2022

Dari tabel 3.1 di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan yang paling kecil jumlah penduduknya adalah kecamatan Teluk Kabung dengan jumlah 27.408 jiwa tingkat laju pertumbuhan penduduk pertahun 2020-2021 sebesar 1,17 %, hal ini disebabkan kecamatan tersebut berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, sedangkan kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Koto Tengah dengan jumlah 197.797 jiwa pada tahun 2021 dengan laju

pertumbuhan penduduknya 1,36 % di tahun 2020-2021., yang diikuti oleh kecamatan Kuranji dengan jumlah penduduk 146.111 jiwa dengan laju pertumbuhannya 1,39% di tahun 2020-2021. Selanjutnya diikuti oleh Kecamatan Lubuk Begalung dengan jumlah penduduknya 122.593 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduknya di tahun 2020-2021 sebesar 1,38%. Hal ini disebabkan di masing-masing lokasi di jumpai lembaga pendidikan tinggi sehingga jumlah mahasiswa yang belajar meningkat setiap tahunnya. Sedangkan untuk jumlah penduduk paling besar berada di kecamatan Koto Tengah yang merupakan kecamatan terluas di kota Padang. Data ini memperlihatkan bahwa penyebaran penduduk kota Padang tidak merata dan masih cenderung terkonsentrasi di pusat kota, hal ini merupakan fenomena kota pada umumnya.

### **3.1.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis dan Kelompok Umur**

Dari Tabel 3.2 terlihat bahwa pada tahun 2021 komposisi penduduk Kota Padang menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki relative lebih banyak dari pada perempuan dengan sex ratio 100%. Sementara itu komposisi penduduk menurut kelompok umur memperlihatkan pola piramida tidak normal, dimana penduduk berusia muda relatif besar, yaitu 107,79 % dari jumlah penduduk (15 tahun kebawah dan 15-24 tahun) sedangkan secara piramida normal bergerak sesudah tingkat umur 24 tahun.

Sebagian besar komposisi penduduk penduduk produktif tahun 2021 tersebar pada kelompok umur usia muda, 15 – 34 tahun. Kondisi ini disebabkan kenaikan jumlah penduduk alamiah dan non alamiah selama 10 tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh faktor alamiah yaitu tingginya angka kelahiran yang terlihat dengan masih besarnya porsi jumlah penduduk 0-4 tahun, sedangkan faktor non-alamiah adalah factor eksternal, yaitu tingginya angka migrasi dan urbanisasi ke kota Padang. Penduduk yang bermigrasi dan urbanisasi pada umumnya pada kelompok umur 19-29 dan 20–24 tahun, sedangkan titik *threshold* terjadi pada usia kerja 25-29 tahun dan kemudian pada usia 25-29 tahun secara perlahan mulai turun, mulai usia kerja usia 30 sampai 75 tahun ke atas.

Gambaran data kependudukan pada Tabel 3.2 terlihat bahwa, jumlah penduduk produktif, (15-64 tahun) tahun 2021 tercatat 634.821 orang, yaitu

sekitar 69,96 %. Sedangkan penduduk non produktif sebanyak 222.539 orang (0-14 tahun) dan 65 tahun keatas sebanyak 55.988 orang atau sekitar 30,04 %. Sebagian besar komposisi penduduk penduduk produktif tahun 2021 tersebar pada kelompok umur usia muda, 15 – 34 tahun. Kondisi ini disebabkan kenaikan jumlah penduduk alamiah dan non alamiah selama 10 tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh faktor alamiah yaitu tingginya angka kelahiran yang terlihat dengan besarnya porsi jumlah penduduk 0-4 tahun, sedangkan faktor non-alamiah adalah factor eksternal, yaitu tingginya angka migrasi dan urbanisasi ke kota' Penduduk yang bermigrasi dan urbanisasi pada umumnya pada kelompok umur 19-29 dan 20–24 tahun, sedangkan titik *threshold* terjadi pada usia kerja 25-29 tahun dan kemudian pada usia 25-29 tahun secara perlahan mulai turun, mulai usia kerja usia 30 sampai 75 tahun ke atas.

**Tabel 3.2**  
**Komposisi Penduduk Kota Padang Menurut**  
**Kelompok Umur Tahun 2021**

Kelompok Umur Age Group	Jenis Kelamin (Orang) Sex (People)			Rasio Jenis Kelamin Sex Ratio
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0-4	39.488	37.344	76.832	105,83
5-9	36.851	35.505	72.256	103,89
10-14	37.903	35.548	73.451	106,52
15-19	37.358	34.718	72.072	107,79
20-24	39.441	37.316	76.757	105,88
25-29	41.376	40.091	81.267	102,90
30-34	39.459	38.354	77.813	103,13
35-39	35.651	34.310	69.961	104,11
40-44	31.518	31.213	62.731	101,18
45-49	28.821	29.741	58.562	96,98
50-54	26.120	27.900	54.020	93,63
55-59	22.060	23.307	45.367	94,58
60-64	17.745	18.526	36.271	95,57
65-69	12.534	13.748	26.302	91,18
70-74	6.865	7.865	14.730	87,48
75+	5.689	9.267	14.956	61,30
<b>Padang</b>	<b>438.699</b>	<b>454.749</b>	<b>893.448</b>	<b>100,90</b>

Sumber : BPS, Kota Padang Dalam Angka 2022

### 3.1.5 Sumbangan antar sektor Terhadap perekonomian Kota Padang

Dari Tabel 3.3 dibawah ini terlihat bahwa kontribusi yang terbesar menyumbang terhadap perekonomian Kota Padang adalah sektor pengangkutan dan komunikasi dengan rata-rata sebesar 24,35%, penyumbang terbesar kedua

adalah perdagangan, hotel, dan restoran dengan rata-rata 21,41%, sumbangan sektor ini berkaitan dengan karakteristik orang minangkabau sebagai pedagang, sementara hotel juga memberikan andil yang besar terhadap PDRB Kota Padang disebabkan sebagai daerah wisata, sementara restoran memegang peranan penting dalam hal wisata kuliner. Penyumbang sektor ekonomi ketiga adalah sektor jasa-jasa sebesar 16,81%, diikuti oleh industri pengolahan sebesar 14,84%, sumbangan sektor keuangan, persewaan, jasa perusahaan menyumbang sebesar 8,49%.

**Tabel 3.3**  
**Distribusi PDRB Kota Padang Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Menurut Lapangan Usaha 2017 – 2021 (dalam milyar )**

Lapangan Usaha/Industry	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	2.797,50	3.002,16	3.305,86	3.364,85	3.445,83
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	1.697,16	1.841,35	2.010,26	2.004,43	2.104,67
C Industri Pengolahan/Manufacturing	7.628,65	7.560,61	7.333,27	7.388,00	7.673,88
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	56,90	59,95	68,26	63,90	65,57
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply, Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	77,50	84,94	86,53	85,31	100,46
F Konstruksi/Construction	5.452,17	6.052,09	6.562,35	6.445,52	6.597,99
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	8.896,51	9.681,92	10.570,84	10.212,98	10.756,22
H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	8.660,19	9.747,55	10.701,67	9.743,04	10.121,03
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	752,14	828,55	935,09	745,82	807,03
J Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	3.490,68	3.986,12	4.608,00	5.111,77	5.436,44

Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2021

Catatan: \* = angka sementara

Dari Tabel 3.3 juga dapat dilihat bahwa sumbangan sektor pertanian dalam hal ini termasuk didalamnya peternakan, kehutanan, dan perikanan tidak beranjak selama lima tahun hanya berkisar rata-rata Rp. 3.445,83 milyar. Gambaran ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan yang signifikan di sektor ini dari waktu ke waktu. Diharapkan sektor perikanan sebenarnya mampu menunjang perekonomian di Kota Padang kedepan, hal ini juga menggambarkan bahwa sektor pertanian dari waktu ke waktu telah mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan telah banyaknya terjadi peralihan fungsi lahan menjadi sektor perumahan dan perdagangan. Sektor pertambangan berada dibawah sektor pertanian hanya menyumbang sebesar Rp. 2.104,67 milyar. Penyumbang terendah terhadap PDRB Kota Padang adalah pengadaan listrik dan gas Rp. 65,57 milyar dan pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang galian hanya menyumbang sebesar Rp. 100,46 milyar.

### **3.2 Sektor Perikanan Kota Padang**

Sektor perikanan di Kota Padang dapat dilihat dari aktifitas nelayan yang ada di wilayah pesisir pantai. Aktivitas ini dapat dilihat dari jumlah nelayan dan jenis alat tangkap yang mereka gunakan untuk menangkap ikan. Untuk lebih jelasnya jumlah nelayan dan jenis alat tangkap yang ada di Kota Padang dapat dilihat pada Tabel 3.4 dan 3.5 di bawah ini.

**Table 3.4. Jumlah Nelayan di Setiap Kecamatan di Kota Padang**

Kecamatan Subdistrict	Penuh Full Time		Sambilan Part Time		Jumlah Total	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Bungus Teluk Kabung	1.585	1.585	130	130	1.715	1.715
2. Lubuk Kilangan	-	-	-	-	-	-
3. Lubuk Begalung	981	980	114	114	1.095	1.094
4. Padang Selatan	889	888	92	92	981	980
5. Padang Timur	-	-	-	-	-	-
6. Padang Barat	394	390	23	23	417	413
7. Padang Utara	662	661	50	50	712	711
8. Nanggalo	30	30	8	8	38	38
9. Kuranji	-	-	-	-	-	-
10. Pauh	-	-	-	-	-	-
11. Koto Tengah	1.984	1.984	123	123	2.107	2.107
<b>Kota Padang</b>	<b>6.525</b>	<b>6.518</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>7.065</b>	<b>7.058</b>

Sumber: Kantor BPS Kota Padang 2021

Dari Tabel 3.4 terlihat bahwa jumlah nelayan yang terbanyak di Kecamatan Koto Tengah dengan jumlah nelayan sebanyak 2.107 orang di tahun 2021, diikuti oleh nelayan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dengan jumlah nelayan 1.715 orang. Jumlah nelayan di Lubuk Begalung merupakan jumlah terbanyak ke tiga dengan jumlah nelayan 1.094 orang, di ikuti oleh nelayan masing-masing di Padang Selatan (980 orang), Padang Utara (711 orang), Padang Barat (413 orang), dan yang paling rendah di Kecamatan Nanggalo 38 orang. Rendahnya nelayan di Kecamatan Nanggalo ini disebabkan letaknya bukan di wilayah pesisir Kota Padang, namun nelayan yang bersangkutan berdomisili di Kecamatan tersebut. Jenis alat tangkap yang digunakan oleh masyarakat nelayan di Kota Padang dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut.

Dari tabel 3.5 terlihat bahwa jenis alat tangkap yang digunakan di kota Padang masih tergolong alat tangkap tradisional. Pada umumnya mereka menggunakan perahu motor tempel dalam kegiatan menangkap ikan. Umumnya alat tangkap yang digunakan dengan perahu motor tempel (1283 unit) ini adalah jaring. Kapal motor (374 unit) digunakan untuk alat tangkap bagan, pukat payang.

Dari jenis alat tangkap yang dioperasikan oleh nelayan di Kota Padang diperoleh hasil tangkapan nelayan dengan berbagai jenis hasil tangkapan seperti terlihat pada Tabel 3.6 berikut ini: Jenis ikan yang banyak tertangkap adalah jenis ikan cakalang, tuna, tongkol, hasil tangkapan ini didominasi oleh alat tangkap payang, jenis ikan tenggiri, kembung, layang ini di dominasi oleh hasil tangkapan jaring.

**Tabel 3.5. Jumlah Alat Tangkap Ikan Menurut Jenis Tahun 2021**

Jenis Peralatan Kind of Equipment	Kecamatan/ Sub District						Jumlah Total
	Koto Tengah	Padang Utara	Padang Barat	Padang Selatan	Labuk Bagalang	Bungus Tehuk Kabung	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>I. Pancing</b>							
<b>1. Tenda</b>							
- KM	-	-	-	108	-	6	114
- MT	-	4	12	3	-	-	19
<b>2. Rawa</b>							
- KM	-	-	-	41	-	-	41
- MT	-	4	-	-	-	-	4
<b>3. Ranggung</b>							
- KM	5	3	-	44	-	9	61
- MT	3	-	30	-	-	37	70
4. Long line	-	-	-	-	-	26	26
<b>II. Pukat / Seine</b>							
<b>1. Payang (MT)</b>							
-	40	37	8	3	-	23	111
<b>2. Pukat Tepi (TM)</b>							
-	3	3	3	-	-	5	14
<b>3. Pukat Tepi (PTAO)</b>							
-	-	1	-	-	-	1	2
<b>4. Dogol (PTM)</b>							
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5. Lampara Dasar</b>							
- KM (Duh)	-	-	-	-	-	-	-
- TM (Uwak)	7	-	-	-	-	-	7
- PTM (Uwak)	-	-	-	-	-	-	-
<b>6. Purse Seine</b>							
-	2	1	-	-	-	-	3
<b>Sub Jumlah/Sub Kotol</b>	<b>64</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>199</b>	<b>-</b>	<b>107</b>	<b>472</b>

**Sumber :data BPS Kota Padang 2021**

Dari tabel 3.5 terlihat bahwa jenis alat tangkap yang digunakan di kota Padang masih tergolong alat tangkap tradisional. Pada umumnya mereka menggunakan perahu motor tempel dalam kegiatan menangkap ikan. Umumnya alat tangkap yang digunakan dengan perahu motor tempel (204 unit) ini adalah jaring. Kapal motor (216 unit) digunakan untuk alat tangkap bagan, pukat payang. Hasil tangkapan selar, dan teri di dominasi oleh hasil tangkapan bagan. Ikan kuwe dan ikan karang di dominasi oleh hasil tangkapan pancing. Ikan layur, Udang, peperek, di dominasi oleh alat tangkap pukat tepi, disamping itu hasil tangkapan udang yang berukuran besar di dinasi oleh alat tangkap jaring udang.

**Tabel 3.6. Jumlah Produksi Ikan Laut Menurut Jenis Tahun 2021**

Jenis Ikan <i>Kind of Fish</i>	Produksi <i>Production</i> (Ton)	Nilai <i>Value</i> (Ribu Rupiah/Thousand Rupiah)
(1)	(2)	(3)
01. Tuna	2 123,54	55 211 923
02. Cakalang	2 866,64	63 066 005
03. Tongkol	5 761,88	136 125 066
04. Tenggiri	412,94	18 582 087
05. Karang	685,03	32 196 307
06. Kembung	1 109,49	17 751 832
07. Layang	942,69	17 439 809
08. Selar	402,49	6 842 386
09. Teri	1 564,11	53 179 836
10. Tembang	435,45	6 531 810
11. Layur	240,61	1 563 970
12. Udang	330,43	5 199 816
13. Peperek	252,93	4 299 892
14. Kuwe	188,73	6 983 186
15. Lainnya	2 964,59	44 468 917
<b>Kota Padang</b>	<b>20 191,56</b>	<b>479 442 842</b>

Pada umumnya hasil tangkapan ikan-ikan nelayan tersebut di daratkan langsung di lokasi masing-masing nelayan berada. Untuk nelayan lubuk begalung tepatnya di gaung Teluk Kabung nelayan mendaratkan ikannya di TPI Gaung. Hal yang sama juga bagi nelayan di Bungus Teluk Kabung, Padang Selatan, Padang Barat, Padang Utara, dan Kecamatan Koto Tengah di Pasir Sebelah.

Permukiman nelayan umumnya terbangun secara spontan dan sering kali dinilai secara umum sebagai permukiman masyarakat miskin. Berbagai berita di media massa cenderung menempatkan nelayan sebagai kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Yang dikatakan nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung (seperti penebar dan pemakai jaring) maupun secara tidak langsung (seperti juru mudi perahu layar, nakhoda kapal ikan bermotor, ahli mesin kapal, juru masak kapal penangkap ikan). Berikut gambaran perumahan nelayan di Kota Padang.



Gambar 3.2 Pemukiman Nelayan Kota Padang

Menyebut nelayan khususnya nelayan tradisional, orang akan selalu menghubungkannya dengan kehidupan yang serba susah, hidup dengan ekonomi yang rendah, atau istilah lainnya "Hidup segan mati tak mau". Demikianlah gambaran yang diberikan oleh orang untuk menggambarkan betapa miskinnya kehidupan nelayan tradisional. Dan secara realitas, memang kondisi kehidupan nelayan khususnya nelayan tradisional memang miskin. Gambaran ini nampaknya sangat kontradiksi dengan potensi pesisir dan laut Indonesia yang begitu besar, laut Indonesia termasuk yang paling luas di dunia. Dengan keluasan, yang sudah termasuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) diperkirakan kurang lebih 5,8 juta kilometer dengan panjang garis pantai seluruhnya 80,790 kilometer atau 14 % panjang garis pantai di dunia. Namun anehnya nelayan tradisional tetap miskin. Bahkan bisa di katakan nelayan adalah kelompok masyarakat yang paling miskin dari pada petani atau pengrajin (Mubyarto dkk, 1984: 16).

Indonesia yang menggantungkan hidupnya dengan menjadi nelayan (Haeruman, 1987:2). Jumlah tersebut bisa jadi lebih besar lagi, mengingat selama ini data statistik yang dikeluarkan oleh pemerintah rejim orde baru lebih banyak manipulatif. Tetapi sebagai perbandingan sementara data statistik tersebut bisa

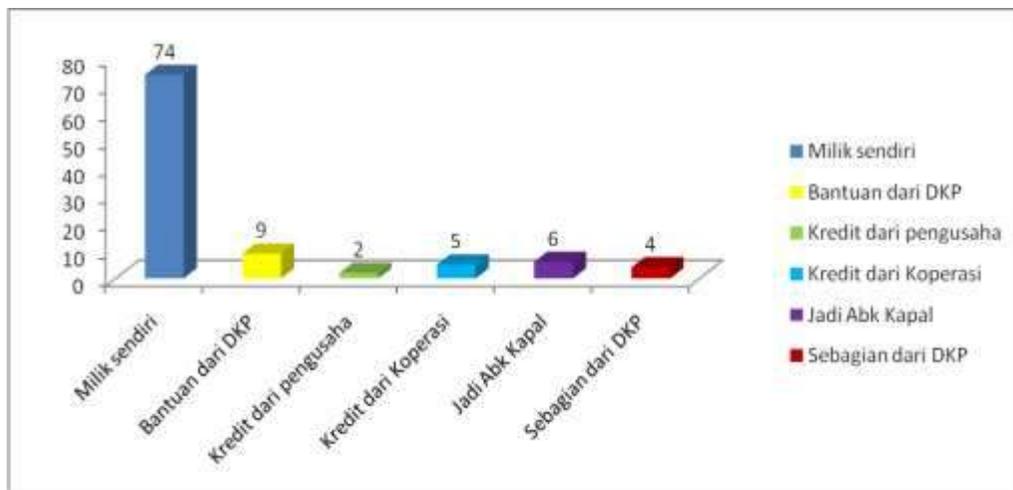
di pakai. Definisi nelayan di atas tidak menunjukkan adanya strata sosial masyarakat nelayan. Tapi dalam peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat muncul istilah nelayan kecil, ini mengisyaratkan bahwa ada nelayan kecil dan ada nelayan yang tidak kecil atau kaya dalam konteks pendapatannya. Dalam media massa akhir-akhir ini sering dikemukakan tentang pencurian ikan oleh nelayan-nelayan asing dengan menggunakan kapal. Informasi dalam media massa tersebut mengisyaratkan bahwa adanya perbedaan penguasaan teknologi dalam melaut atau menangkap ikan di kalangan nelayan. Penggunaan teknologi ini menunjukkan bahwa kemampuan nelayan dalam menggunakan sumber daya penangkapan ikan tidak sama. Artinya lebih lanjut pendapatan mereka dapat berbeda-beda pula.

### **3.3 Analisis Faktor Internal Kemiskinan Nelayan Sebagai Aset Bangsa**

#### **3.3.1 Kepemilikan Alat**

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan selama penelitian, maka dilakukan tabulasi data, dan disajikan dalam bentuk grafik atau gambar. Selanjutnya dilakukan pembahasan sesuai dengan realita yang ada di lapangan tentang kemiskinan nelayan secara internal di Kota Padang. Hasil data-data tersebut disajikan seperti digambarkan pada gambar berikut:

Berdasarkan bardiagram kepemilikan alat tangkap gambar 3.3 menunjukkan bahwa dari 100 orang nelayan yang di ambil datanya diperoleh sebanyak 6 kriteria kepemilikan. Kriteria pertama menunjukkan bahwa 74 orang merupakan milik sendiri, 9 orang status kepemilikan alat tangkap bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan, 2 orang nelayan dengan status kepemilikan latnya diperoleh dari kredit dari pengusaha, 5 orang dari kredit koperasi, 6 orang memperoleh kepemilikan alat tangkap berasal dari bekerja sebagai anak kapal, setelah uang terkumpul mereka membelikan untuk alata tangkap sendiri. Kriteria yang terakhir adalah status kepemilikan alat berasal dari sebagian bantuan Dinas Kelautan dan Perikanan serta sebagian dari usaha sendiri 4 orang.



Gambar 3.3. Bardigram kepemilikan alat tangkap di Kota Padang

Berdasarkan hasil diskusi dengan para penyuluh lapangan bidang perikanan yang merupakan perpanjangan tangan para nelayan yang selalu membina dan mendampingi mereka dalam setiap aktivitas dilapangan. Para penerima bantuan selalu saling tuding karena mereka tidak memiliki komitmen untuk membina kelompok agar usaha bersama yang telah terbentuk dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu kelompok yang dibentuk tidak bertahan lama dan kadangkala dapat bubar tanpa ada pertanggung jawaban. Hal inilah yang membuat para penyuluh kesal dan susah melakukan pembinaan kelompok. Pada hal jika para nelayan memiliki komitmen yang kuat mereka dapat mengakumulasikan bantuan itu menjadi lebih besar dan dapat disalurkan ke nelayan lain yang memerlukan alat tangkap tersebut. Faktor lain adalah adanya hubungan yang saling terkait antara satu sama lain, dan hal inilah yang sulit menegakkan komitmen tersebut. Sebagai contoh: yang masuk dalam kelompok tersebut adalah: hubungan anak, kemenakan, menantu, ipar, dan hubungan sekampung, sesuku, dan mamak (om). Sekalipun dalam penerimaan bantuan tersebut telah dijelaskan sanksi dan efek jika mereka tidak komitmen dengan perjanjian tersebut, namun mereka seakan tidak peduli dengan hal tersebut. Namun di kelompok nelayan lain jika mereka komitmen saat ini telah terakumulasi dana untuk kelompok mereka cukup besar, seperti kelompok nelayan : kub laut biru reformasi. Dari gambaran ini jelas terlihat bahwa semua bantuan yang diberikan kepada masyarakat nelayan memiliki manfaat yang besar terhadap kehidupan mereka. Berdasarkan hasil penelitian Dikrurahkan

dan Sofhani (2015) tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Kelompok Nelayan Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. Manfaat pengembangan kelompok telah mampu dirasakan oleh nelayan kelompok dan secara umum keadaannya lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kondisi yang menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pengembangan kelompok nelayan telah mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Hasil penelitian Marheni *et al* (2014) terhadap pengaruh bantuan langsung kepada masyarakat nelayan menunjukkan bahwa : (1) rata-rata jumlah Bantuan Langsung Masyarakat yang diterima oleh anggota kelompok nelayan sebesar Rp. 6.122.449,00; (2) rata-rata pendapatan bersih yang diperoleh anggota kelompok nelayan sebesar Rp. 1.098.104,00 per bulan untuk tahun 2012; dan (3) Dana BLM berpengaruh positif terhadap pendapatan bersih dan besar pengaruhnya sebesar 61,9%. Namun perbedaan dalam penelitian ini tidak terlihat bahwa bagaimana status kepemilikan asset nelayan tersebut. Oleh karena itu kedepan bantuan terus dijalankan agar nelayan pekerja dapat merubah status mereka menjadi nelayan pemilik. Namun bantuan harus dilakukan dengan tepat kepada sasaran, yaitu kepada nelayan yang memerlukannya.

### **3.3.2 Jenis Alat Tangkap Nelayan**

Jenis alat tangkap nelayan tradisional di Kota Padang berdasarkan hasil yang dilakukan terhadap 100 orang nelayan menunjukkan bahwa alat tangkap pukat payang ( 41 unit) merupakan jenis alat tangkap yang banyak dioperasikan di Kota Padang. Alat tangkap ini dioperasikan dengan perahu yang disebut Jukung dengan panjang  $\pm$  10 meter dengan lebar 1,5 meter dengan dalam 1,25 meter. Rata-rata jumlah nelayan dalam satu kali operasi sebanyak 6 orang dengan jumlah produksi tidak dapat dipastikan, hal ini sangat ditentukan oleh musim ikan, cuaca, dan kondisi nelayan seperti terlihat pada Tabel 3.7 berikut.

Dari Tabel 3.7 di bawah terlihat bahwa trammel net memiliki rata-rata pendapatan yang paling rendah saat ini. Hal ini disebabkan sebahagian wilayah daerah penangkapan jaring udang, telah dicemari oleh sampah-sampah yang di bawa oleh sungai ke laut, sehingga semua lumpur dimana udang berkembang biak telah di tutupi oleh sampah-sampah tersebut. Dari semua jenis alat tangkap yang dioperasikan di Kota Padang payang dan pukat tepi termasuk alat tangkap yang kurang ramah lingkungan, hal ini disebabkan mata jaring di kantong jaring

memiliki mata jaring yang kecil, sehingga sewaktu dioperasikan dapat menangkap semua jenis ikan dasar dan permukaan.

Tabel 3.7 . Jenis Alat Tangkap yang Digunakan Nelayan di Kota Padang

No	Jenis alat	Unit	Panjang (Meter)	lebar	Waktu operasi	Rata-rata pendapatan (Rp)/hari
1	Payang dan pukat tepi	41	100 - 200	7- 10 meter	pagi - sore	100 - 350
2	Gill net	34	150 - 200	3,5 - 8 meter	pagi - sore-malam	100 - 250
3	Pancing colok	9	20 - 100	0 meter	pagi - sore-malam	100 - 250
4	Pancing ulur	8	20 - 150	0 meter	pagi - sore - malam	100 - 250
5	Trammel net	8	100 - 200	3,5- 8 meter	pagi - malam	50 - 150

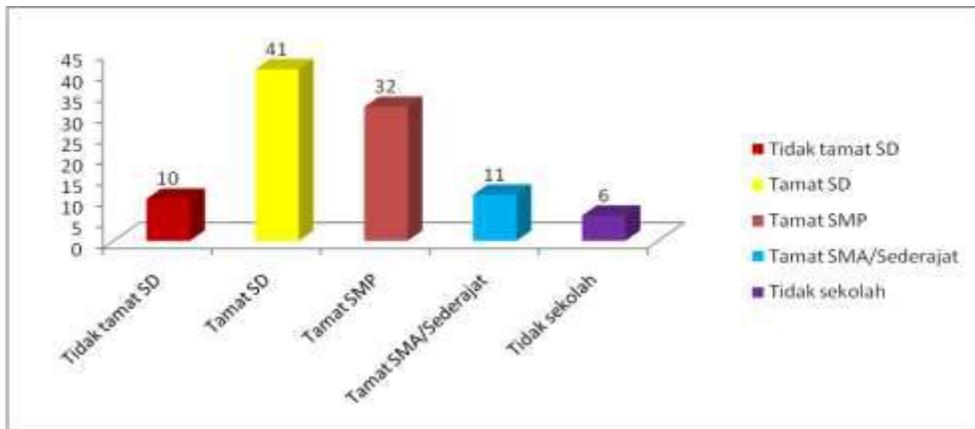
Sumber: Data hasil penelitian 2015

Berdasarkan hasil penelitian Adisasmita (2013) mengemukakan bahwa masyarakat nelayan yang tinggal di kawasan pesisir yang mata pencahariannya sebagai nelayan dan kehidupannya sangat bergantung pada laut seperti: perikanan tangkap dengan berbagai macam alat tangkap yang memiliki resiko sangat tinggi dan fluktuasi dipengaruhi oleh alam. Selanjutnya hasil penelitian Ariyanti dan Santoso (2015) mengemukakan bahwa kemiskinan nelayan perikanan tangkap disebabkan oleh penguasaan teknologi yang rendah, pemasaran melalui juragan, dan konsumsi nelayan cenderung membelanjakan pendapatannya pada saat itu juga. Dari hasil penelitian ini terdapat kesamaan hasil bahwa jenis alat tangkap yang dioperasikan di Kota Padang memiliki teknologi yang rendah, dan pemasaran biasanya melalui agen, dan pendapatan mereka umumnya dibelanjakan pada saat itu juga. Oleh karena itu pola konsumsi mereka umumnya digunakan untuk konsumsi dan tidak ada pemikiran untuk menabung pada saat tidak musim ikan.

### 3.3.3 Pendidikan nelayan Sebagai Aset Bangsa di Kota Padang

Dari gambar 3.4 terlihat bahwa rata-rata pendidikan nelayan tamat SD (41%), hal ini menggambarkan bahwa sumberdaya manusia di masyarakat nelayan di Kota Padang umumnya berpendidikan rendah, ini juga mengisaratkan kepada kita bahwa regenerasi nelayan dilakukan oleh orangtua mereka karena ketidakmampuan membiayai persekolahan mereka, oleh karena itu mau tidak mau suka atau tidak pekerjaan yang tidak memerlukan pola pikir yang banyak adalah sebagai nelayan. Oleh karena itu perlu kebijakan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan pendidikan di kalangan masyarakat nelayan pembebasan uang sekolah, serta beasiswa untuk anak-anak mereka untuk masuk keperguruan

tinggi. Masyarakat nelayan yang menamatkan pendidikan SMP sebanyak (32%), SMA hanya (11%), dan masih ditemui tidak tamat SD (10%), serta tidak sekolah (6%).



Gambar 3.4 Bardiagram pendidikan nelayan dikota padang

Berdasarkan hasil penelitian Agunggunanto (2011) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan nelayan tidak mempengaruhi pendapatan keluarga nelayan, yang mempengaruhi pendapatan keluarga nelayan adalah : pengalaman, jumlah anggota keluarga yang bekerja, teknologi, dan perilaku nelayan. Kajian lainnya juga menunjukkan bahwa pendapatan, karakteristik rumah tangga, tingkat pendidikan dan modal kerja berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan nelayan. Pendapatan dan karakteristik rumah tangga yang terdiri dari status kepemilikan rumah, jumlah anggota keluarga yang bekerja dan status kepemilikan alat produksi (armada tangkap) serta tingkat pendidikan dan modal kerja bersosiasi positif dengan ketidakkemiskinan, oleh karena itu perlu memberikan beasiswa yang mendukung pendidikan bagi anak mereka. (Fajriadi, et al , 2013). Hasil penelitian yang di lakukan terhadap nelayan di Kota Padang sejalan dengan hasil penelitian Agunggunanto bahwa pendidikan tidak berpengaruh terhadap pendapatan nelayan, namun sebagaimana hasil yang dikemukakan oleh Fajriadi memiliki beberapa kesamaan seperti kepemilikan alat, dan jumlah anggota keluarga yang bekerja. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Oktama (2013) mengemukakan bahwa semakin tinggi kondisi sosial keluarga nelayan semakin tinggi pendidikan dan semakin tinggi kondisi ekonomi keluarga nelayan semakin tinggi pendidikan anak mereka. Dari hasil penelitian nelayan di Kota Padang akibat rendahnya tingkat pendidikan ini para

penyuluh sukar untuk membentuk mereka di dalam kelompok-kelompok usaha bersama. Kedepan agar suksesnya segala jenis bantuan dan program pemerintah diperlukan pendidikan moralitas agama oleh para ustad-ustad agar perilaku dalam kelompok masyarakat dapat berubah ke arah yang lebih baik.

### **3.3.4 Budaya**

Umumnya nelayan di kota Padang tradisional digolongkan menjadi nelayan tradisional, terutama berdasarkan jenis alat tangkap dan kemampuan alat tangkap dan jarak penangkapan ikan dari pantai yang dapat dikatakan masih tradisional. Nilai-nilai yang mereka pahami dipengaruhi oleh keadaan alam yang keras dan penuh tantangan, serta menuntut penyesuaian nelayan dengan alam dan beranggapan bahwa keberuntungan dan kesengsaraan sebagai bagian dari hidup. Mereka sangat menghargai adat-istiadat yang terkait dengan penangkapan ikan secara turun-temurun. Meskipun nilai-nilai tersebut secara ekonomi tidak menguntungkan dan bahkan tidak rasional atau masuk akal, meskipun pemahaman tersebut menghambat kreativitas dan inovasi untuk maju. Nelayan tradisional di kota Padang masih mempercayai adanya nilai-nilai; perempuan tidak boleh melaut, tidak boleh melaut siang hari Jum'at, berkata kotor sedang melaut, tidak melaut ketika badai, menunjuk benda-benda yang tidak di kenal sewaktu melaut, dilarang berbuat macam-macam (mesum), dan dilarang takabur.

Selain memahami nilai-nilai yang mereka pahami secara turun temurun, nilai-nilai hidup yang bersifat kegotong royongan masih hidup di masyarakat seperti: pada saat ditimpa musibah kematian, ada pesta perkawinan, dan hajatan lain (sunat rasul, akekah anak). Namun ada beberapa hal yang telah hilang di masyarakat nelayan adalah tidak adanya tuo pasie. Tuo pasie adalah : orang yang disegani di tengah masyarakat nelayan. Tuo pasie berperan sebagai penasehat dan mengatur hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat nelayan. Seperti larangan kelaut pada hari jumat itu lahir dari tuo pasie. Namun sekarang banyak hal tersebut dilanggar. Hal lain yang telah hilang adalah : Berdoa jika ada nelayan-nelayan baru yang akan turun melaut. Berdoa ini langsung dipimpin oleh tuo pasie bersama seluruh masyarakat pasie agar nelayan baru tersebut selalu mendapat ikan yang banyak. Seluruh makanan dibawa oleh keluarga nelayan

baru dan makan bersama di pinggir pantai. Dari hasil wawancara semenjak tidak ada lagi tuo pasie, nelayan selalu konflik dalam hal menangkap ikan di laut, karena melanggar perjanjian antar kelompok nelayan. Sebagai contoh nelayan jaring udang harus menangkap pada malam hari, namun didapati ada yang menangkap pada sore dan pagi hari. Purnomo (2005) mengemukakan bahwa konflik antar nelayan masih cukup tinggi disebabkan oleh perebutan perairan penangkapan. Oleh karena itu bagi masyarakat nelayan, kebudayaan merupakan sistem gagasan atau sistem kognitif yang berfungsi sebagai "pedoman kehidupan", referensi pola-pola kelakuan sosial, serta sebagai sarana untuk menginterpretasi dan memaknai berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungannya (Keesing, 1989:68-69). Faktor lain dalam budaya masyarakat nelayan adalah menempatkan perempuan mendominasi dalam urusan ekonomi keluarga dan pengambilan keputusan penting dirumah tangga (Kusnadi, 2001).

### **3.3.5 Pola Hidup Masyarakat Nelayan**

Bagi masyarakat nelayan tradisional di kota Padang, aktivitas menangkap ikan merupakan mata pencarian yang bersifat turun temurun sebagai penghidupan ekonomi keluarga. Aktivitas nelayan tradisional di kota Padang sangat dipengaruhi oleh keadaan geografis. Di samping itu, nelayan tradisional di kota Padang memandang pendapatan mereka dapatkan dari usaha melaut hanya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Mereka bekerja menurut kebiasaan mereka sehari-hari. Apabila cuaca baik, mereka akan mulai melaut. Dengan kebiasaan berangkat pagi sesudah subuh, malam harinya mereka dapat beristirahat. Siangnya mereka dapat memperbaiki jaring mereka di waktu luang. Pagi dan sore mereka dapat menjual ikan di tepi pantai atau ke pasar.

Kebiasaan yang berkembang di kalangan masyarakat nelayan adalah: boros, judi dan minum beralkohol. Prilaku ini sudah berkembang lama sejak dulu, jika dulu mereka terbiasa minum dengan minuman tradisional, tapi kini telah berubah pada minuman modern. Kebiasaan ini telah terpola dan terorganisir. Sebagian nelayan tradisional di kota Padang, pandangan mereka telah mulai berubah mengenai "takdir tuhan atau jalan hidup mereka berada pada usaha mereka", dulu memang sikap mereka banyak menganut faham bahwa "takdir atau jalan hidup mereka telah digariskan oleh Tuhan". Kebiasaan ini menunjukkan adanya sebagian kebiasaan yang masih dipertahankan dan

sebagian lagi telah mengalami perubahan. Jika dilihat dari pola hidup masyarakat nelayan di Kota Padang umumnya mereka membeli barang-barang yang tidak mendukung kehidupan mereka, hal ini terlihat dari barang-barang yang mereka miliki adalah: TV, dan parabola sebagai hiburan mereka, serta pada umumnya nelayan memiliki sepeda motor yang mereka peroleh dari hasil melaut. Tidak ada mereka yang memiliki aset berupa emas dan tabungan uang di bank. Pola hidup yang bersaing antar tetangga dalam memiliki sesuatu salah satu pemicu mereka dalam berhutang untuk bersaing dalam memiliki sesuatu yang mereka inginkan. Hidup boros masih kental terlihat di masyarakat nelayan di Kota Padang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ariyanti dan Santoso (2015) mengemukakan bahwa kemiskinan nelayan perikanan tangkap disebabkan oleh pola konsumsi nelayan cenderung membelanjakan pendapatannya pada saat itu juga.

### 3.3.6 Usaha wanita nelayan

Kontribusi wanita nelayan terhadap pendapatan keluarga bagi masyarakat nelayan di kawasan pesisir terlihat nyata dari seratus istri nelayan yang diwawancarai diperoleh hasil sebagai berikut (Tabel 4.8).

Tabel 3.8. Kontribusi Usaha Wanita nelayan terhadap pendapatan Keluarga

No.	Pekerjaan istri nelayan	Jumlah (orang)	Pendapatan rata-rata (Rp)/hari
1	Tidak bekerja	53	-
2	Pengolah ikan	25	30.000
3	Penjual kue	10	30.000 – 50.000
4	Membuka warung	12	50.000 – 75.000

Sumber : Data Hasil Penelitian 2015

Dari Tabel 3.8 Terlihat bahwa banyaknya wanita nelayan yang tidak membantu ekonomi keluarga (53%), sisanya 47% wanita nelayan membantu suaminya untuk membantu pendapatan keluarga. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Saidan (1998) wanita nelayan perlu berperan dalam meningkatkan ekonomi keluarga, Junaidi (2012) wanita nelayan berperan aktif meningkatkan ekonomi keluarga sebagai pengolah namun terkendala oleh kemas dan

lebellling produk. Akbarini, Gumilar, dan Garandiosa (2012) istri nelayan menyumbang 31,32% untuk ekonomi keluarga. Hasil lain yang dikemukakan oleh Zein (2008) juga menunjukkan bahwa kontribusi wanita nelayan terhadap pendapatan keluarga di Kecamatan Koto Tangah di Kota Padang rata-rata sebesar 37,62%. Apa yang ditemukan di penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Zein di tahun 2008.

### 3.3.7 Aset

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 100 orang nelayan di Kota Padang diperoleh data mengenai kepemilikan aset dalam bentuk kepemilikan rumah dan aset lain yang dimiliki nelayan dapat dilihat pada Tabel 3.9 dan Tabel 3.10 berikut ini.

Tabel 3.9 Aset Kondisi Rumah Masyarakat Nelayan di Kota Padang

No.	Umur nelayan	Kepemilikan rumah	Penerangan	Atap rumah	WC	lantai rumah	bahan bakar
		65 org milik sendiri	100 org listrik/pln	95 org seng	85 org dalam rumah	80 org semen	46 org gas
	20 - 21 (12 org)				9 org wc umum	3 org keramik	39 minyak tanah
	31 - 40 (22 org)	21 org menyewa		4 org genteng	6 org sepanjang pantai	7 org papan	15 kayu bakar
	41 - 50 (35 org)	11 rumah milik org tua		1 org rumbia		10 org tanah	
	51 - 60 (24 org)	2 org rumah mertua					
	61 - 70 (17 org)	1 org rumah hibah					

Sumber: Data Hasil Penelitian 2015

Dari Tabel 3.9 terlihat bahwa aset rumah tangga masyarakat nelayan yang dulunya wc mereka di sepanjang pantai telah berubah kepada wc yang mereka buat di dalam rumah. Dari bahan bakar yang dulunya mereka memasak dengan menggunakan bahan bakar kayu saat ini telah beralih menjadi bahan bakar gas dan bahan bakar minyak tanah. Atap rumah mereka pada umumnya beratap seng dan umumnya mereka memiliki rumah sendiri, rumah orang tua, sewa, rumah mertua, dan hibah. Lantai rumah rata-rata berlantai semen, namun masih ditemui yang menggunakan lantai tanah. Pada umumnya masyarakat nelayan di Kota Padang penerangan rumah mereka memiliki penerang listrik. Rata-rata umur nelayan di Kota padang adalah: 41 – 50 (35 orang nelayan), 51 – 60 (24 orang), 31 – 40 (22 orang), 61 – 70 (17 orang), 20 – 21 (12 orang). Dari gambaran ini terlihat bahwa kebanyakan yang menjadi nelayan adalah umur di

atas 40 tahun sebanyak 88%. Berdasarkan hasil wawancara menjadi nelayan adalah pilihan hidup mereka yang telah turun temurun dilakukan semenjak orangtua mereka hidup dan bertempat tinggal di kawasan pesisir. Aset lain yang dimiliki oleh masyarakat nelayan berupa aset hiburan, transportasi, tabungan dan aset emas seperti terlihat pada Tabel 4.10 berikut:

Tabel 3.10. Kepemilikan Aset lain Masyarakat Nelayan

No	Kepemilikan aset			
	Hiburan (org)	Transportasi (org)	Tabungan (org)	Emas (org)
1	TV (80)	Sepeda motor (75)	Tidak ada (91)	Ada (14 )
2	TV dan Radio (4)	Tidak ada (24)	Ada (9)	Tdk ada (86)
3	TV, Radio, & Parabola (10)	Becak (1)		
4	Tidak memiliki (6)			

Sumber: Data Hasil Penelitian 2015

Dari Tabel 3.10 terlihat bahwa pada umumnya nelayan memiliki media informasi dan hiburan berupa TV, kendaraan bermotor, namun sedikit sekali yang memiliki tabungan dan aset berupa emas. Dari seratus orang nelayan yang diwawancarai yang memiliki tabungan keluarga nelayan hanya 9 orang dan yang memiliki aset emas 14 orang. Sementara aset produktif lainnya seperti aset perahu, alat tangkap, dan mesin tidak mereka miliki. Jika aset-aset produktif ini habis maka mereka kembali menjadi pekerja, bukan sebagai pemilik. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Yonvitner (2014) mengemukakan bahwa implikasi turunnya nilai aset (kapal, mesin, dan alat tangkap) akan mengurangi efektivitas dan optimalisasi aset tersebut. Umumnya penyusutan aset dibebankan kepada nelayan oleh pemilik dan dimasukkan sebagai biaya kotor. Hasil penelitian Pramono (2012) menunjukkan bahwa kepemilikan aset dan modal sosial tidak berpengaruh terhadap kemiskinan rumah tangga. Sementara jenis pekerjaan dan jumlah tanggungan berpengaruh terhadap kemiskinan rumah tangga. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari, Junaidi, Zein (2014) menunjukkan bahwa nelayan yang memiliki aset tetap memiliki pendapatan lebih tinggi dari nelayan yang memiliki aset lancar dan aset tidak berwujud. Rata-rata pendapatan nelayan tradisional di Nagari Tikur Rp. 1.687.000

- Rp. 3.800.000/bulan. Nelayan yang memiliki aset tak berwujud memiliki pendapatan yang rendah. Oleh karena kepemilikan aset yang dimiliki nelayan bukanlah aset yang produktif sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap kemiskinan mereka. Jika aset produktif yang mereka miliki seperti adanya ternak, kebun, dan lahan sawah hal ini akan memperbaiki kehidupan mereka. Oleh karena itu pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan mereka perlu kiranya bantuan itu berupa aset produktif.



**BAB IV**  
**STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN NELAYAN SEBAGAI ASET BANGSA**  
**DARI FAKTOR INTERNAL**

1. Bantuan terus digulirkan oleh pemerintah agar status kepemilikan alat dari pekerja menjadi pemilik. Jenis alat yang diberikan berupa alat tangkap ramah lingkungan.
2. Jenis alat pukat payang dan pukat tepi perlu dicarikan pengganti alat tangkap tersebut, hal ini disebabkan dalam jangka panjang dapat memutus rantai makanan ikan.
3. Perlu pembebasan biaya sekolah bagi anak-anak nelayan dan pemberian beasiswa untuk masuk ke perguruan tinggi.
4. Perlu peningkatan mentalitas dalam upaya menciptakan masyarakat yang berbudaya melalui ceramah-ceramah agama oleh para ustad-ustad.
5. Upaya penyuluhan dan pelatihan kewirausahaan perlu dilakukan terhadap wanita-wanita nelayan agar hidup tidak konsumtif dan perlu penyuluhan arti pentingnya menabung.
6. Kontribusi wanita nelayan terhadap peningkatan pendapatan terus ditingkatkan melalui usaha-usaha produktif dan pelatihan-pelatihan keterampilan berwirausaha dan penguatan permodalan serta kemasan dan labeling produk.
7. Pemerintah tidak hanya memberikan bantuan berupa alat tangkap, perahu, dan mesin tempel, namun perlu juga berupa aset lain seperti: ternak, lahan, dan perumahan.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan:**

1. Masih ditemukan nelayan yang belum memiliki alat tangkap (26%).
2. Jumlah alat tangkap pukat payang yang mendominasi penangkap ikan di kota Padang.
3. Pendidikan nelayan rata-rata adalah didominasi oleh tamatan SD dan masih ditemui tidak tamat SD serta tidak sekolah serta.
4. Budaya masyarakat nelayan masih tetap dipertahankan seperti wanita dilarang melut, hari jum'at tidak melaut, dilarang berkata-kata kotor takabur dan merusak.
5. Pola konsumtif nelayan terkait dalam kompetisi antar masyarakat nelayan memiliki alat-alat tidak produktif, seperti kendaraan sepeda motor, TV, dan parabola. Sekalipun berhutang untuk mendapatkannya.
6. Tingkat kontribusi wanita nelayan terhadap pendapatan seperti menjual kue (Rp.50.000/ hari), pengolah (Rp.30.000/hari) dan membuka warung (Rp.70.000/hari).
7. Sedikit sekali nelayan yang memiliki aset berupa tabungan dan emas.

#### **5.2 Saran**

1. Pemberian bantuan haruslah tepat sasaran kepada nelayan miskin.
2. Bantuan haruslah mengacu kepada jenis alat tangkap yang ramah lingkungan.
3. Perlu pemerintah membebaskan anak-anak nelayan dari biaya sekolah dan pemberian beasiswa kepada anak-anak nelayan untuk masuk perguruan tinggi.
4. Budaya-budaya lokal perlu di kembali untuk menumbuhkan kearifan lokal seperti sedekah laut, dan tuo pasie
5. Penyuluhan dan pelatihan perlu dilakukan pada usia dini tentang pentingnya budaya hemat dan menabung.
6. Kontribusi wanita nelayan perlu terus ditingkatkan pada usaha-usaha produktif serta pengemasan dan labeling terhadap usaha-usaha yang dijalankan.

7. Pemberian aset berupa ternak, perumahan dan lahan perlu diupayakan pemerintah melalui program pemberdayaan.

## **BAB VI**

### **FAKTOR EKSTERNAL KEMISKINAN NELAYAN SEBAGAI ASET ABNGSA DI KOTA PADANG**

#### **6.1 Visi dan Misi Kota Padang**

Sesuai dengan visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang yang telah dilantik pada Tanggal 13 Mei 2014 adalah sebagai berikut:

***“Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan,  
Perdagangan dan Pariwisata Yang Sejahtera, Religius dan  
Berbudaya”***

Pembuatan visi ini sudah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, visi dan misi pembangunan jangka menengah adalah visi dan misi kepala daerah yang terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Visi dan misi ini dijadikan dasar utama penyusunan kebijakan umum pembangunan daerah dalam RPJMD ini karena telah disetujui oleh mayoritas masyarakat Kota Padang yang dibuktikan oleh hasil pemungutan suara dalam pilkada tahun 2014 yang lalu. Hal ini dilakukan sesuai dengan prinsip pembangunan dalam era demokratisasi dan otonomi yaitu seluruh kebijakan pembangunan daerah harus sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat daerah secara keseluruhan.

Dari visi tersebut terlihat bahwa terdapat 6 hal pokok yang menjadi landasan, fokus dan sasaran utama pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dalam periode 5 tahun mendatang yaitu:

1. *Pendidikan*, baik untuk tingkat dasar, menengah maupun tinggi merupakan landasan utama untuk mendorong proses pembangunan kota. Alasannya sangat jelas karena melalui pendidikan akan dapat diwujudkan kualitas sumberdaya manusia yang baik sebagai modal dasar untuk mendorong proses pembangunan kota. Disamping itu, melalui pendidikan akan dapat pula ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat memahami dan memanfaatkan *Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)* yang sangat penting artinya untuk dapat memanfaatkan dan memelihara potensi

sumberdaya alam yang tersedia sehingga kegiatan produksi dan kualitas lingkungan hidup dapat ditingkatkan;

2. *Perdagangan*, baik untuk produksi pertanian dan usaha kecil dan menengah (UKM) yang diproduksi dalam provinsi Sumatera Barat dan daerah tetangga yang berdekatan menjadi kegiatan ekonomi Kota yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga kota. Jiwa wirausaha masyarakat kota Padang yang relatif lebih baik merupakan faktor pendorong utama untuk mendorong kegiatan perdagangan tersebut;
3. *Pariwisata*, khususnya wisata bahari dengan memanfaatkan Pantai Padang yang indah dan bersih serta pulau-pulau yang berdekatan, merupakan potensi kota Padang sangat penting disamping perdagangan. Karakteristik kegiatan pariwisata yang mempunyai keterkaitan erat dengan sektor lain, baik pertanian, industri, perdagangan dan jasa akan memungkinkan pengembangan sektor pariwisata secara terpadu dengan sektor-sektor lainnya sehingga proses pertumbuhan ekonomi kota menjadi semakin cepat dan efisien;
4. Aspek agama (*religius*), baik Islam dan agama lainnya yang dianut warga Kota Padang sangat penting artinya untuk dapat mengarahkan dan membimbing tingkah laku masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang patuh dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral tinggi dan sangat peduli terhadap kepentingan umum masyarakat;
5. Tata kehidupan masyarakatnya di dasarkan pada budaya lokal, khususnya *Budaya Minangkabau* dalam rangka mewujudkan masyarakat yang rukun dan damai serta saling menghormati satu sama lainnya sesuai dengan warisan budaya tradisional masyarakat setempat;

Untuk mencapai visi tersebut dijabarkan melalui misi yang pada dasarnya adalah merupakan upaya umum yang akan dilakukan untuk dapat mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi ini selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar perumusan strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah yang akan dilakukan selama periode perencanaan,

Untuk mewujudkan visi Kota Padang maka misi atau upaya umum yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing;
2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Barat Sumatera;
3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan;
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan;
5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal;
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.

Berdasarkan visi dan misi jangka menengah sebagaimana dijabarkan di atas, maka tujuan pembangunan Kota Padang dalam periode 2014-2019 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kota Padang sebagai sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata untuk Provinsi Sumatera Barat khususnya dan Wilayah Sumatera Bagian Tengah umumnya;
2. Tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional dan melayani melalui penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*);
3. Terwujudnya masyarakat kota yang sejahtera, religius dan berbudaya;
4. Terjaganya kualitas lingkungan hidup melalui penanggulangan resiko bencana dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Sasaran umum Pembangunan kota Padang dengan memperhatikan visi dan misi sebagaimana dijelaskan diatas, dan mengingat fungsi Kota Padang dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), maka sasaran umum pembangunan Kota Padang secara lebih kongkrit mencakup 4 hal pokok yang masing-masingnya saling berkaitan yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kota Padang yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Publik (*Service Center*) dengan kegiatan utama meliputi pendidikan dan kesehatan untuk wilayah Sumatera Bagian Tengah serta pusat pemerintahan untuk Provinsi Sumatera Barat.
2. Terciptanya Kota Padang yang juga berfungsi sebagai Pusat Pertumbuhan (*Growth Pole*) dengan kegiatan utama ditekankan pada bidang perdagangan, jasa dan pariwisata untuk wilayah Sumatera Bagian Tengah.
3. Terlaksananya Kota Padang sebagai *Kota layak huni* yang mempunyai prasarana dan sarana yang cukup dan berkualitas baik serta lingkungan hidup yang menyenangkan dan bebas dari kemungkinan bencana alam.
4. Terciptanya masyarakat yang sejahtera, religius dan berbudaya berdasarkan pada falsafah "*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*".

Adapun Agenda pembangunan Kota Padang pada Tahun 2014 -2019, adalah:

1. Peningkatan pendidikan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing
2. Pengembangan Kota Padang sebagai pusat Perdagangan
3. Pengembangan Kota Padang sebagai Kota Wisata dan berdaya saing
5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan
6. Peningkatan keamanan dan kebersihan kota
7. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan Kota Padang

Pembangunan Kota Padang pada Tahun 2014-2019 juga diarahkan pada 10 Program Prioritas Pembangunan Kota Padang, yaitu:

1. Percepatan pembangunan sarana perdagangan kota dan sentra ekonomi
2. Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan
3. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan transportasi kota
4. Pengembangan industri pariwisata dan kelautan serta pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing
5. Penataan dan Peningkatan pembangunan kawasan perumahan pemukiman perkotaan

6. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
7. Pembangunan Ekonomi berbasis masyarakat dan mendorong tumbuhnya investasi daerah dalam rangka Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan
8. Penataan Lingkungan Perkotaan yang hijau, berkelanjutan dan berbasis mitigasi bencana
9. Peningkatan Penataan birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan pelayanan publik.
10. Pengamalan Agama dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya

Sesuai dengan 10 program prioritas Pembangunan Kota Padang 2014 – 2019, maka tujuan program prioritas nomor 4 dan 7 menyangkut : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan, oleh karena itu Program sektor perikanan khususnya perikanan tradisional yang merupakan penghuni kawasan pesisir menjadi sasaran utama visi dan misi Wali Kota dan Wakil Walikota Kota Padang. Dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat pesisir dan penurunan angka kemiskinan di kawasan pesisir berbagai program telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Jika kita lihat program pemerintahan pusat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

## **6.2 Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan**

ASEAN Economic Community (AEC) 2015 atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan dihelat 31 Desember 2015. MEA 2015 sendiri terinspirasi dari Uni Eropa, dimana tarif perdagangan tak berlaku alias nol (0) persen, dan produksi barang-jasa akan dipasarkan secara bebas di 10 negara ASEAN. Siapkah sektor Kelautan dan Perikanan (KP) Indonesia menyongsong MEA 2015. Untuk menyiapkan itu, Pemerintahan SBY pada 1 September 2014 menerbitkan Instruksi Presiden No.6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing dalam Rangka Menghadapi MEA. Wabillkhusus di sektor KP, Inpres itu melahirkan empat strategi: Pengembangan kelautan dan perikanan, dengan fokus pada penguatan kelembagaan dan posisi kelautan dan perikanan; penguatan daya

saing kelautan dan perikanan; penguatan pasar dalam negeri; serta penguatan dan peningkatan pasar ekspor.

Sejauh mana pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berbenah untuk meningkatkan daya saing Indonesia di era perdagangan bebas ASEAN yang tinggal menghitung bulan itu? Berikut rangkuman dari berbagai sumber informasi terkait kebijakan KKP yang di pemerintahan Jokowi-JK ini kementerianya selalu disorot dengan gebrakan-gebrakan Menteri KKP Susi Pudjiastuti.

### **6.2.1 Penguatan Kelembagaan & Posisi Kelautan Perikanan**

Langkah ini telah dilakukan pemerintah bersama DPR dengan mensahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kelautan yang mandek selama 10 tahun pembahasannya di DPR. Akhirnya, setelah 69 tahun Indonesia merdeka, kita punya Undang-Undang Kelautan. Di Undang-Undang No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan ini diharapkan bisa menyederhanakan regulasi pengelolaan laut yang kerap dinilai tumpang tindih antarsektor. UU Kelautan ini dapat mendorong percepatan realisasi investasi di sektor kelautan dan perikanan karena produk hukum ini telah menyederhanakan berbagai regulasi dalam hal pengelolaan laut. UU Kelautan itu juga penting karena selama ini pembangunan bidang kelautan belum menjadi arus utama dan prioritas dalam pembangunan nasional sehingga pembangunan bidang kelautan tertatih mengejar pesatnya pembangunan daratan.

### **6.2.2 Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan**

Strategi ini meliputi menyusun Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN); pengembangan industri perikanan tangkap salah satunya dengan penyempurnaan regulasi investasi dan usaha perikanan tangkap; penguatan kapasitas pengolahan hasil perikanan salah satunya dengan peningkatan utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI); penguatan sistem jaminan mutu hasil perikanan; pengembangan investasi di pulau-pulau kecil; pengembangan mina wisata; pengembangan perikanan budidaya; penguatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan perikanan; serta meningkatkan daya saing tenaga kerja perikanan Indonesia.

### **6.2.3 Penguatan Pasar Dalam Negeri**

Strategi ini meliputi pengembangan Early Warning System (EWS) sebagai antisipasi lonjakan harga dan pengamanan ketersediaan produk perikanan serta pengembangan informasi pasar berbasis teknologi informasi.

### **6.2.4 Penguatan Pasar Ekspor**

Strategi ini meliputi branding produk perikanan di pasar internasional, market intelligence pasar internasional, serta diversifikasi pasar ekspor. Langkah KKP untuk meningkatkan ekspor hasil perikanan dan kelautan salah satunya adalah mengidentifikasi daerah yang baik untuk budidaya atau penangkapan ikan. Kemudian akan disesuaikan dengan program-program KKP sehingga diharapkan menjadi lumbung ikan dan memiliki nilai untuk ekspor.

Kesimpulannya, jika empat strategi di atas dimaksimalkan, Indonesia harus optimistis menghadapi MEA 2015 dan bukan tidak mungkin kita akan menjadi pemimpin dalam era perdagangan bebas itu. Kepala Pusat Analisis Kerjasama Internasional Lembaga KKP Anang Noegroho menyebut dengan potensi laut kita yang mencapai 171 miliar Dollar AS per tahun, dan tidak seharusnya kita memiliki hutang luar negeri. Mari kita dukung terus Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan segala gebrakan dan akselerasinya untuk pembangunan maritim nasional. Kita juga berharap, fokus KKP bukan hanya memberantas illegal fishing saja. Tapi juga melahirkan kebijakan strategis lainnya. (IRI/Indonesia/SIperubahan/Poros maritim/PH)'.

## **6.3 Permasalahan Sektor Perikanan**

Berdasarkan program tersebut terdapat beberapa permasalahan dalam sektor perikanan dalam melaksanakan RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019. Yang tertuang dalam PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/PERMEN-KP/2015. Permasalahan tersebut adalah :

Bidang kelautan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan laut di Indonesia yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan

lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya perikanan. Beberapa wilayah perairan laut Indonesia telah mengalami gejala *overfishing*.

Selain itu, praktik-praktik *IUU fishing* yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), baik oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII) maupun oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) menyebabkan kerugian baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi. Kerugian negara akibat dari *IUU fishing* di perairan Arafura diperkirakan mencapai Rp 11–17 triliun (Wagey dkk, 2002). Estimasi kerugian negara-negara di dunia akibat *IUU fishing* mencapai US\$ 10–23,5 miliar (Agnew dkk, 2005). Ancaman *IUU Fishing* dipicu kondisi sektor perikanan global, dimana beberapa negara mengalami penurunan stok ikan, pengurangan armada kapal penangkapan ikan akibat pembatasan pemberian izin penangkapan sedangkan permintaan produk perikanan makin meningkat. Di sisi lain, kemampuan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Indonesia masih lemah. Melihat ancaman dan tantangan tersebut, kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan perlu ditingkatkan sebagaimana amanat UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, melalui pengembangan sistem pengawasan yang terintegrasi, penyediaan 13 sarana dan prasarana pengawasan, pemenuhan regulasi bidang pengawasan dan kelembagaan di tingkat daerah, pengembangan kerjasama secara intensif dengan instansi lain, serta menggalang komitmen dan dukungan internasional dalam penanggulangan kegiatan *IUU fishing*. Masalah *IUU fishing* juga terkait dengan perbatasan dengan negara tetangga, khususnya terkait nelayan tradisional yang melanggar lintas batas ke negara lain. Meskipun upaya untuk edukasi dan peningkatan kesadaran nelayan RI mengenai batas-batas laut sudah dilakukan namun kemungkinan nelayan tradisional untuk melintas batas dan melakukan pelanggaran ke negara lain masih ada.

Masalah perbatasan laut merupakan salah satu kendala dalam pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan di wilayah perairan Indonesia. Beberapa masalah kejelasan perbatasan wilayah dengan negara tetangga belum diselesaikan. Hal ini menjadikan kasus perikanan di wilayah perbatasan belum

bisa tuntas, sehingga peran KKP untuk menangani permasalahan tersebut pun perlu ditingkatkan. Dalam pengembangan perikanan budidaya, masih dihadapkan pada permasalahan implementasi kebijakan tata ruang dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, terbatasnya prasarana saluran irigasi, terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul, kesiapan dalam menanggulangi hama dan penyakit, penyediaan fasilitas kolam dan air yang baik serta permasalahan bahan baku pakan dan kestabilan harga, serta tingginya harga pakan. Rendahnya produktifitas perikanan budidaya juga disebabkan karena struktur pelaku usaha perikanan budidaya adalah skala kecil/tradisional ( $\pm$  80%), dengan keterbatasan aspek permodalan, jaringan teknologi dan pasar. Disamping itu serangan hama dan penyakit ikan/udang, serta adanya pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah NKRI. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan membawa konsekuensi meningkatnya risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya serta masuknya hasil perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu perlu diiringi dengan peningkatan sistem jaminan kesehatan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman untuk konsumsi manusia.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tarif (*tariff barrier*) dalam perdagangan hasil perikanan antar negara. Keadaan ini memicu masing-masing negara, termasuk negara mitra dagang seperti Uni Eropa, China, Rusia, Canada, Korea, Vietnam 14 dan Norwegia, semakin memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan (*health, quality and safety assurance*).

Sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) Indonesia berkewajiban melaksanakan isi ketentuan dalam "*Agreement of Th Application of Sanitary and Phytosanitari Measure*" (perjanjian SPS) yang memuat ketentuan

tentang penerapan peraturan-peraturan teknis guna melindungi kesehatan manusia, hewan, ikan dan tumbuhan. Konsep perjanjian *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) merupakan instrumen pengendali perdagangan internasional berupa hambatan teknis (*technical barrier to trade*)/hambatan non tariff (*non tariff barrier*). Untuk itu pengembangan sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan dalam era perdagangan global. Terkait dengan permasalahan garam, selama ini kebutuhan nasional garam dalam negeri dipenuhi dari impor. Sebagai negara yang memiliki panjang pantai nomor dua di dunia, sudah seharusnya kebutuhan nasional garam dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Saat ini produksi garam nasional belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri baik secara kuantitas maupun kualitas, yang antara lain dikarenakan usaha pegaraman masih tradisional, minimnya infrastruktur, dan tata niaga garam yang belum mendukung.

Permasalahan lain yang dihadapi terkait dengan masih rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan yang disebabkan oleh struktur armada penangkapan ikan yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil, belum optimalnya integrasi sistem produksi di hulu dan hilir, serta masih terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana secara memadai. Disamping itu, aspek sangat mendasar yang mempengaruhi lemahnya daya saing dan produktivitas adalah kualitas SDM dan kelembagaannya. Saat ini jumlah SDM yang bergantung pada kegiatan usaha kelautan dan perikanan sangat besar, namun pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknologi dan aksesibilitas terhadap infrastruktur dan informasi belum memadai dan belum merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah kepulauan.

Dalam rangka pengembangan usaha, permasalahan utama yang dihadapi adalah masih adanya keterbatasan dukungan permodalan usaha dari pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya kepada para nelayan/pembudidaya. Dalam kaitan ini, nelayan/pembudidaya ikan masih mengalami kesulitan mengakses permodalan atau kredit akibat terkendala oleh pemenuhan persyaratan prosedural perbankan. Aktivitas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, baik yang berada di daratan, wilayah pesisir, maupun lautan,

tidak dapat terlepas dari keberadaan potensi bencana alam dan dampak perubahan iklim yang dapat terjadi di wilayah Indonesia. Bencana alam dan perubahan iklim dapat berdampak serius terhadap kegiatan pemanfaatan 15 sumberdaya kelautan dan perikanan, seperti kenaikan muka air laut (*sea level rise*) yang dapat menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau kecil dan pesisir, intrusi air laut ke daratan, peningkatan dan perubahan intensitas cuaca ekstrim (seperti badai, siklon, banjir) yang berpengaruh terhadap kegiatan penangkapan dan budidaya ikan, serta kerusakan sarana dan prasarana.

Oleh karena itu, penyiapan kapasitas masyarakat untuk melakukan berbagai upaya mitigasi bencana dan adaptasi dampak perubahan iklim masih sangat diperlukan. Selain potensi bencana alam dan perubahan iklim, wilayah pesisir juga memiliki potensi kerusakan pesisir berupa kerusakan ekosistem, abrasi, sedimentasi, pencemaran dan permasalahan

keterbatasan lahan. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya rehabilitasi ekosistem, pengendalian pencemaran, dan upaya revitalisasi diantaranya melalui reklamasi yang terkendali.

Kesejahteraan pelaku usaha perikanan (budidaya, penangkapan, pengolahan dan pemasaran) merupakan salah satu pilar penting dalam peningkatan daya saing bangsa di era perdagangan bebas serta penerapan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Namun, kondisi kesejahteraan para nelayan dan pelaku usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dengan pendapatan yang diperolehnya masih sangat terbatas. Permasalahan yang dihadapi dalam menghadapi MEA 2015, utamanya adalah belum adanya perlindungan terhadap pelaku usaha UMK untuk meningkatkan daya saing melalui sinergi lintas sektor (termasuk dalam mengakses sumber pembiayaan), perlindungan terhadap pasar domestik, dan sertifikasi produk.

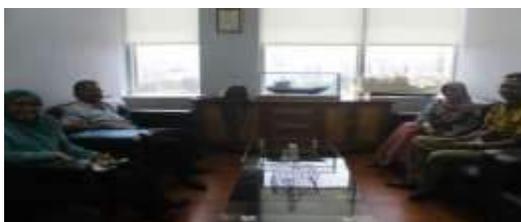
Isu utama pembangunan wilayah nasional adalah masih besarnya kesenjangan antarwilayah khususnya kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dalam lima tahun mendatang (2015-2019), arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan

wilayah. Sebagai negara maritim yang terdiri dari gugusan pulau-pulau (*Archipelagic State*) dimana laut Indonesia lebih luas dari daratan, laut menjadi sangat vital dalam pemerataan pembangunan nasional. Melalui visi misi Presiden, diharapkan laut dapat menghubungkan Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, termasuk pulau-pulau besar dan gugusan pulau-pulau kecil didalamnya, sekaligus sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi wilayah berbasis maritim (kelautan).

## 6.4 Faktor eksternal Kemiskinan Nelayan

### 6.4.1 Kebijakan Program Bantuan Kementeri Kelautan Perikanan

Program Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam upaya mengentaskan kemiskinan nelayan tradisional telah banyak dilakukan baik berupa bantuan kapal perikanan, alat tangkap, dan program pensejahteraan melalui program bantuan tunai untuk operasional penangkapan melalui kelompok nelayan. Program-program tersebut digulirkan melalalui dana APBN dan dana DAK (Dana Alokasi Khusus). Proses pengguliran dana tersebut melalui persetujuan DPR Pusat, setelah proses persetujuan maka KKP melakukan penyaluran ke berbagai provinsi yang memerlukan bantuan tersebut. Pemerintah provinsi melakukan fasilitasi sesuai perintah KKP sebagai penerima bantuan yang telah diprogramkan oleh KKP pusat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Rancang Bangun dan Permesinan Kapal Perikanan(Agus Wahyu Santoso, MT), serta Ibu Innes Rahmania Direktur Akses Pasar dan Promosi.





Gambar 6.1: wawancara dengan Bpk. Agus Wahyu Santoso, MT dan Ibu Innes Rahmania

Bantuan tersebut disalurkan sesuai dengan perintah dan petunjuk dari KKP Pusat melalui kelompok nelayan yang telah dibetuk secara kelompok oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Langkah-langkah yang dilakukan sebelum bantuan diberikan oleh Provinsi Sumatera Barat yaitu:

1. Pembentukan kelompok nelayan penerima bantuan
2. Pelatihan Kelompok Nelayan penerima bantuan
3. Sosialisasi aturan dan tatacara pengguna anggaran dan pelaporan
4. Serah terima bantuan oleh KKP pusat kepada Nelayan Penerima Bantuan
5. Monitoring pelaksanaan dan hasil serta pelaporan oleh penerima Bantuan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
6. Yang tidak pernah dilakukan adalah evaluasi tingkat keberhasilan dan dampak bantuan terhadap nelayan

Besar anggaran per satu unit kapal adalah Rp. 2 Milyar untuk Sumatera Barat diberikan sebanyak 10 unit Kapal dengan dana operasional pada tahap awal sebesar Rp. 200 juta rupiah per kelompok. Setelah kapal diberikan dan bantuan digulirkan sampai saat ini belum ada evaluasi apakah ada keberhasilan para nelayan penerima bantuan tersebut atau tidak. Persoalan yang timbul adalah : besarnya dana operasi tidak setimpal dengan hasil tangkapan yang diperoleh oleh karena itu kapal-kapal bantuan tersebut banyak bersandar dari pada beroperasi. Sementara dana operasional kelompok telah habis dipergunakan untuk melaut. Hingga saat ini kapal-kapal tersebut banyak tidak beroperasi.

Hasil wawancara dengan bapak Agus tersebut mengemukakan kelemahan ada pada evaluasi yang tidak dilakukan baik sebelum ataupun sesudah bantuan diberikan. Pada saat ini kata beliau baru akan di buat sistem evaluasi oleh KKP pusat. Gambaran ini menunjukkan bahwa ketidak siapan pemerintah dalam melakukan evaluasi baik sebelum dan sesudah dilakukan bantuan. Kapal-kapal yang diterima nelayan tidak disesuaikan dengan situasi musim, kondisi laut, dan model dan bentuk kapal sehingga untuk Sumatera Barat yang merupakan lautan samudera Hindia dengan gelombang yang besar, maka diragukan daya tahan kapal tersebut dalam beroperasi di laut bebas. Para nelayan mengeluh bahwa kapal tersebut tidak sesuai dengan kondisi alam laut Sumatera Barat. Terlebih lagi mentalitas nelayan yang biasanya pergi pagi pulang sore hari, tidak membuat nelayan betah melaut untuk satu minggu. Hal ini menyebabkan kegagalan dari bantuan KKP pusat dalam menyalurkan bantuan. Kegagalan kebijakan merupakan kesalahan eksternal pemerintah dalam upaya mengurangi kemiskinan nelayan.

Gagasan kemiskinan dalam upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan intervensi oleh pemerintah atau agen eksternal lainnya (Hyatt, 2001); dan dimensi multisektoral yang berpendapat bahwa kemiskinan bukan merupakan masalah individu sendiri atau masalah struktural saja tetapi kombinasi dari keduanya (Jentoft & Midré, 2011; Alkire & Foster, 2008; Bene 2003; Hanson 1997).



Gambar: 6.2 Kapal Inka Mina yg tidak beroperasi di Pelabuhan Bungus Padang

Sebagai gambaran kesalahan kebijakan juga membawa efek kepada masyarakat nelayan yang mana ribuan nelayan melakukan demo kepada Gubernur Sumatera Barat tentang nasib mereka, berkaitan dengan Permen No. 2 Tahun 2015 pelarangan Pukat Tepi dan Pukat Payang, serta Permen No.42 Tahun 2013 pelarangan bagan. Oleh karena itu kebijakan dari pemerintah juga tidak diikuti oleh solusi yang memberikan pertimbangan perbaikan kehidupan mereka, sehingga menuai demo pada saat penelitian ini dilakukan seperti terlihat pada gambar dibawah ini:



Gambar: 6.3 Demo penolakan pelarangan bagan, dan pukat

Prinsip tata kelola nelayan miskin sebagai mitra dalam pengentasan kemiskinan di perikanan skala kecil adalah masalah praktis. Nelayan yang sehari-hari terlibat dalam menangani kebutuhan mereka. Dalam kebanyakan kasus mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang kondisi dan lingkungan mereka. Mereka tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana untuk manuver di desa mereka. Memang mereka bisa disebut sebagai practitioners ahli kehidupan sehari-hari '(Holstein & Gubrium, 2003) atau poverty ahli' menurut Narayan et al. (2000). Untuk alasan ini, penting untuk melihat mereka sebagai mitra daripada klien dalam memerangi kemiskinan. Mereka tidak harus dipandang sebagai subyek kemiskinan, yang hanya perlu dibantu. Baik mereka harus dilihat

sebagai kekurangan, putus asa dan tanpa kemampuan. Sebaliknya mereka harus dilihat sebagai orang-orang dengan kemampuan, keterampilan dan pengetahuan tentang masalah mereka dan bagaimana menyelesaikannya.

Pendapat lain faktor eksternal kemiskinan nelayan menurut Trijoyo (2007) faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berhubungan : dengan kondisi di luar diri dan aktivitas kerja nelayan. Faktor-faktor eksternal mencakup masalah antara lain: (1) kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, parsial dan tidak memihak nelayan tradisional; (2) sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara; (3) kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran dari wilayah darat, praktek penangkapan ikan dengan bahan kimia, perusakan terumbu karang, dan konversi hutan bakau di kawasan pesisir; (4) penggunaan peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan; (5) penegakkan hukum yang lemah terhadap perusakan lingkungan; (6) terbatasnya teknologi pengolahan hasil tangkapan pasca-tangkap; (7) terbatasnya peluang-peluang kerja disektor non-perikanan yang tersedia di desa-desa nelayan; (8) kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun; dan (9) isolasi geografis desa nelayan yang mengganggu mobilitas barang, jasa, modal dan manusia.

Berdasarkan hasil diskusi dengan Dinas Kelautan Provinsi Sumatera Barat, bahwa pemberian bantuan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur seperti gambaran yang telah dipaparkan diatas namun hal yang sama juga berlaku sebagaimana KKP kemukakan bahwa evaluasi terhadap paket-paket bantuan apakah berhasil atau tidak tidak dilakukan evaluasi. Hal ini terkesan bahwa setelah bantuan dilakukan selesailah tugas untuk penyaluran bantuan, tetapi bagaimana bantuan tersebut setelah diterima apakah nelayan meningkat pendapatannya atau tidak belum lagi dievaluasi terhadap masyarakat nelayan penerima bantuan. Berdasarkan wawancara dengan para nelayan penerima bantuan ditanyakan bahwa bagaimana alat bantuan dari Bapak Gubernur melalui DKP Provinsi, jawaban mereka masih banyak yang kurang seperti: panjangnya jaring yang kurang, mesin yang kurang kencang, perahu yang kurang panjang dan lebar. Secara umum bantuan memberikan manfaat terhadap kehidupannya.



Gambar: 6.4 wawancara dengan Kepala bidang Tangkap dan Kepala Seksi Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

Walaupun ketimpangan di Sumatera Barat relatif rendah dibandingkan provinsi lain. Menurut Sugyarto (2016) mengemukakan bahwa Sumatera Barat termasuk salah satu daerah dari 10 provinsi dengan gini rasio terendah. Selanjutnya perubahan gini ratio lebih mudah dipahami dengan memperhatikan perubahan distribusi pengeluaran pada semua kelompok penduduk. Tren gini rasio Sumatera Barat dan khususnya daerah pedesaan sejalan dengan perubahan persentase penduduk miskin. Penurunan persentase penduduk miskin diiringi dengan penurunan tingkat ketimpangan. Kondisi tersebut didukung meningkatnya prporasi pengeluaran pada kelompok 40% penduduk dengan pengeluaran terbawah, ketika tingkat ketimpangan menurun. Sehingga dapat dikatakan penduduk pada status ekonomi terbawah dipedesaan mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

### **6.5 Kebijakan Program Bantuan Kelautan dan Perikanan Kota Padang**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikan serta Kabid. Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang Bapak Anton beserta staf, bahwa pemberian bantuan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera

Barat, namun bantuan tersebut secara bertahap telah dilakukan, sebagian besar nelayan belum menerima bantuan tersebut disebabkan bantuan itu tidak sekaligus diberikan kepada nelayan miskin yang sesuai dengan yang daftar nelayan miskin yang ada di Kota Padang. Bantuan untuk nelayan miskin tersebut berasal dari dana APBN yang berasal dari dana aspirasi DPR pusat, sedangkan untuk dana APBD berasal dari propvinsi yang disebut Gepemp (Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir). Untuk dana yang berasal dari APBN yang berasal dari dana aspirasi DPR pusat pemerintah Kota Padang telah ditunjuk sebagai pelaksana penyaluran bantuan. Dengan adanya pemotongan anggaran di pusat, calon penerima bantuan yang telah diidentifikasi, namun tidak jadi menerima bantuan yang mereka harapkan. Lebih lanjut Bapak Anton mengemukakan bahwa program-program tersebut tidak ada keberlanjutannya. Oleh karena itu banyak masyarakat nelayan miskin kecewa dengan cara kerja bantuan yang berasal dari pusat tersebut.

Untuk dana yang berasal dari APBD sebagaimana program Gubernur Sumatera Barat telah banyak nelayan miskin yang menerima bantuan, dan manfaat bantuan tersebut telah dirasakan oleh masyarakat nelayan miskin, namun belum semua masyarakat menerima bantuan tersebut. Tercatat pada tahun 2012 dan 2013 telah digulirkan sebanyak 312 paket yang terdiri dari mesin long tail, gill net, dan perahu, serta 110 fish box.



Gambar: 6.5 Wawancara dengan kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang beserta Staf dan kabid

Sehubungan dengan hasil kajian Sugiyarto (2016) mengemukakan bahwa pengentasan kemiskinan juga harus memperhatikan faktor tidak langsung (distant determinant) kemiskinan, seperti pendidikan, kesehatan dan budaya. Pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan dengan target kelompok miskin, memungkinkan peningkatan produktivitas penduduk miskin dan mampu berkompetisi meraih kesempatan yang lebih baik. Begitu juga aspek budaya, banyak perilaku penduduk miskin yang menyebabkan sulit keluar dari kemiskinan, seperti sifat konsumtif dan tidak investasi untuk kebutuhan jangka panjang.

### **6.6 Peranan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan dan staf Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus diperoleh informasi tentang keberadaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus telah lama berdiri di Kota Padang, setelah pendiriannya semua kapal diwajibkan untuk mendaratkan hasil tangkapannya di Pelabuhan Samudera Bungus. Semua hasil tangkapan dilakukan pelelangan ikan, maka pelabuhan samudera Bungus begitu ramai dikunjungi oleh para pedagang ikan dari berbagai daerah sehingga Pelabuhan Bungus sebagai pusat ekonomi wilayah pesisir Sumatera Barat. Pada Tahun 1992 terjadi konflik antara nelayan dan KUD Mina sehingga para nelayan tidak percaya kepada KUD Mina, maka para nelayan mendaratkan hasil tangkapan mereka ke Pelabuhan Muara Padang dimana tempat pendaratan ikan mereka bangun sendiri. Konflik ini terjadi disebabkan oleh dana yang dipungut kepada nelayan berupa retribusi tidak pernah dikembalikan kepada nelayan jika nelayan mengalami kecelakaan di laut. Pada hal di Pelabuhan Samudera Bungus semua sarana dan prasarana pelabuhan cukup memadai seperti: doking kapal, es, BBM, air bersih, dan penyediaan bekal melaut. Pada tahun 1998 tidak ada lagi pelelangan di Pelabuhan Samudera Bungus. Pada tahun 2005 usaha untuk memindahkan para nelayan ke Pelabuhan Samudera Bungus dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan biaya pemindahan sebesar Rp.55.000.000., namun upaya tersebut gagal dilakukan hingga saat ini.

Oleh karena itu Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus tidak berfungsi secara optimal, aktifitas bongkar muat masih dilakukan oleh para nelayan yang

memiliki kapal-kapal dengan ukuran 30 GT yang mereka berasal dari nelayan bungus sendiri, namun nelayan di Kota Padang tetap mendaratkan hasil tangkapannya di muara padang. Sekalipun pada saat ini pelabuhan bungus telah membangun kios sebanyak 30 unit, dalam upaya menyediakan sarana melaut seperti alat tangkap dan perbekalan untuk melaut. Namun dari 30 unit kios tersebut hanya beberapa kios saja yang beroperasi disebabkan tidak banyak nelayan yang menyinggahi pelabuhan tersebut. Oleh karena itu secara eksternal fungsi pelabuhan perikanan samudera bungus belum memberi manfaat secara penuh terhadap nelayan di Kota Padang.



Gambar : 6.6 Wawancara dengan Staf Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Padang

### **6.7 Peranan Perusahaan Perikanan (PT. Dempo)**

Berdasarkan hasil wawancara dengan meneger dan staf di perusahaan perikanan PT. Dempo bahwa keberadaan perusahaan perikanan ini yang didirikan pada tahun 2007 belum membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat nelayan tradisional di Kota Padang khususnya. Hal ini disebabkan PT. Dempo tidak pernah membeli hasil tangkapan dari nelayan tradisional. Salah satu alasan mereka adalah : PT. Dempo hanya melakukan ekspor ikan tuna ke Jepang dan Amerika. Sekalipun mereka juga memproduksi ikan olahan berupa nugged, bakso ikan, risoles, steak, otak-otak, serta daging ikan tuna. Semua produk yang mereka hasilkan tetap berhubungan dengan ikan tuna, sehingga mereka tidak pernah membeli ikan jenis lain selain ikan tuna. PT. Dempo juga membeli ikan tuna dari para nelayan dengan standar mutu yang telah mereka tetapkan, khususnya ikan tuna dari alat tangkap pancing tonda. Pada tahun 2008 PT. Dempo telah melakukan pembinaan terhadap masyarakat nelayan dalam upaya

membeli hasil tangkapan mereka, namun respon nelayan tidak seperti yang diharapkan.

Menurut meneger perhari mereka memerlukan 15 ton ikan tuna segar, bahan baku ikan tuna ini tidak pernah terpenuhi, terpenuhi hanya 15 ton per minggu. 10 persen dari ikan tuna ini dipasok dari Provinsi Bengkulu tepatnya di Kabupaten Kaul dengan harga per kilogram berkisar antara Rp. 6.000- Rp. 9.000,- dengan berat ikan tuna per ekor rata-rata 50 kg. Menurut maneger stok ikan tuna di PT. Dempo minimal 60 ton, namun hingga saat ini belum terpenuhi, hal ini merupakan peluang bagi masyarakat nelayan di Kota Padang, namun hal ini tidak di lakukan oleh nelayan Kota Padang. Yang mampu memanfaatkan adalah nelayan Bengkulu yang mereka menangkap ikan tuna di Kepulauan Enggano. Rata-rata penghasilan mereka untuk satu kali penangkapan dapat mencapai Rp. 10.000.000,-.Wawancara ini di tutup dengan pernyataan bahwa kedepan kami juga akan membeli hasil tangkapan nelayan tradisional. Lebih lanjut meneger menjelaskan bahwa tawaran dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mengelola kapal inka mina yang khusus menangkap ikan tuna. Hal ini ditolak oleh PT. Dempo dengan alasan biaya operasi yang besar dan kondisi kapal yang tidak nyaman bila gelombang besar.



Gambar: 6.7 Wawancara dengan menejer dan staf PT. Dempo Kota Padang

## **6.8 Peranan Pusat Pendaratan ikan dan Pelelangan Ikan**

TPI batang arau terletak di muara Kota Padang dengan kapasitas produksi yang di daratkan nelayan tradisional per hari  $\pm$  7 ton. Menurut keterangan pengelola TPI Bapak wan, edi, dan anis, TPI ini dikelola secara pribadi dengan anggota nelayan yang mereka miliki masing-masing. Menurut keterangan mereka jika alat tangkap bagan tidak ber operasi, maka nelayan tradisional meningkat hasil tangkapannya. Peningkatan hasil tangkapan sangat ditentukan oleh musim penangkapan. Berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh nelayan ke pengelola TPI, hal ini juga yang menyebabkan nelayan tidak mau beralih ke Pelabuhan Nusantara Bungus. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola TPI dari segi harga jual nelayan memperoleh harga yang wajar di muara Kota Padang tersebut, hal ini disebabkan banyak pedagang yang datang dari berbagai pasar yang ada di Kota Padang, umumnya jenis ikan yang mereka jual adalah : udang, ikan tongkol, tuna kecil, kembung dll.

Jika kita tanyakan kepada pedagang ikan dari segi biaya jauh lebih murah di muara jika dibandingkan dengan mereka membeli ikan di Pelabuhan Nusantara Bungus. Jika dilihat dari fasilitas yang ada seperti kemudahan transportasi cukup mudah dijangkau. Selanjutnya wawancara dengan TPI KUD Mina Gates dengan kapasitas produksi yang dilelang  $\pm$  30 ton/hari. KUD Mina Gates dikelola oleh Koperasi dengan beranggotakan 110 orang anggota. Simpanan wajib anggota adalah Rp. 100.000,- dan sumbangan sukarela Rp. 10.000,-. Jumlah agen yang terlibat di TPI KUD Gates ini sebanyak 10 orang. Pemasaran ikan dari TPI KUD Gates ini sampai ke luar daerah seperti: Jambi, Pekanbaru, dan Pariaman, Padang Panjang, dan Payakumbuh. Namun kelemahan dari TPI KUD Mina Gates ini adalah tidak adanya fasilitas Cold Storage, ES batang, parkir yang terbatas. Lingkungan TPI ini sangat kotor dan penuh dengan sampah di sekitar TPI KUD Mina Gates. Peran TPI sangatlah fital bagi masyarakat nelayan dan dari segi manfaat sangat bermanfaat, namun fasilitas tidak memadai dari segi luas, dan sarana pendukung lainnya yang terbatas.

Sangat eronis TPI Muara Anai dibangun dengan dana 30 Milyar, dengan fasilitas yang sangat lengkap dengan pabrik esnya dengan omset 2,5 milyar/tahun. Namun manfaatnya bagi nelayan tidak dapat dirasakan, hal ini disebabkan fasilitas tersebut tidak dapat dilalui oleh kapal dan perahu nelayan





Gambar : 6.8 Wawancara di Pusat Pelelangan ikan dan Pendaratan Ikan

### 6.9 Peranan Eksportir ikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan eksportir mengemukakan bahwa ada beberapa komoditi yang di ekspor ke singapore seperti: tripang, lobster, dan kepiting. Cara eksportir memperoleh komoditi tersebut adalah nelayan langsung yang mengantarkan kepada eksportir. Berdasarkan peraturan menteri perikanan dan kelautan No. 1/PERMEN-KP/2015 bahwa ekspor hasil tersebut harus memenuhi ukuran yang telah ditentukan. Lobster tidak boleh di ekspor dalam keadaan bertelur, berat lobster yang boleh di ekspor minimal memiliki berat 0,5 kg/ekor. Hal yang sama juga berlaku untuk kepiting. Untuk lobster dan kepiting harga per kilogram dibeli oleh eksportir adalah Rp. 250.000/kg, dan untuk teripang dibeli dengan harga Rp. 1.250.000/kg. Dalam proses pengiriman harus melalui karantina di bandara Internasional Minang Kabau, untuk komoditi lobster dan kepiting proses di karantina memerlukan waktu 4 hari, dan teripang memerlukan waktu 14 hari di karantina. Keluhan eksportir dalam mengekspor lobster dan kepiting adalah: setelah komoditi siap di ekspor dan telah melalui karantina, namun setelah sampai di bandara disuruh bongkar kembali, hal ini yang menyebabkan keluhan dari para eksportir. Hal ini akan menghambat dan menurunkan kualitas ekspor mereka untuk sampai di tujuan. Eksportir berharap bahwa proses tersebut jang terlalu lama karena pengiriman barang sudah sering dilakukan. Para eksportir meminta waktu karantina di persingkat sehingga produk lebih baik kualitasnya. Oleh karena itu hasil wawancara ini menggambarkan bahwa peran eksportir sangat diharapkan kedepan. Dengan

adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah diharapkan kedepan akan tumbuh eksportir-eksportir baru yang lebih besar dan dengan jumlah komoditi yang lebih beragam.



Gambar:6.9 Wawancara dengan eksportir ikan di Kota Padang

### 6.10 Peran Restoran dan Rumah Makan

Peran restoran dan rumah makan dalam menyerap hasil tangkapan nelayan tradisional di Kota Padang sangatlah diharapkan oleh para nelayan. Tumbuhnya gerai-gerai makanan yang menawarkan ikan segar sangat diminati oleh masyarakat pada umumnya. Khusus untuk masyarakat Kota Padang sudah akrab dengan warung-warung makan “lauk pukek” yang uaca yang tidatumbuh dan berkembang di kawasan wilayah pesisir Kota Padang, seperti Lauk Pukek Mak Apuak, Lauk pukek Supik, warung Lauk Pukek Palanta Bundo dan lainnya. Sementara untuk kawasan wisata Pantai Padang tumbuh restoran-restoran yang menawarkan ikan bakar yang diperoleh dari nelayan pancing seperti : Ikan Bakar Fuja, Unang Rindu, Pondok Ikan Bakar, Rumah makan ampera 99 dll. Semua ini

merupakan prospek yang sangat baik untuk berkembangnya wisata kuliner di Kota Padang. Rata-rata restoran dan rumah makan ini telah memiliki nelayan pencari ikan sebagai langganan untuk memperoleh bahan baku untuk restoran dan rumah makan mereka. Persoalan yang timbul bagi rumah makan dan restoran ini adalah jika tidak musim ikan dan adanya cuaca yang kurang baik atau badai, maka usaha mereka juga terkendala. Pada saat tidak musim ikan bahan baku untuk warung dan rumah makan menjadi mahal. Sementara harga jual tidak mengalami kenaikan. Untuk restoran di kawasan Pantai Padang kandang-kandang memperoleh bahan baku ikan bakar dari kepulauan mentawai. Secara umum dapat digambarkan bahwa peran restoran dan rumah makan ini sangat membantu para nelayan dalam pemasaran hasil tangkapan mereka.

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat adalah bagaimana menjaga keberlanjutan sumberdaya ikan yang ada di kawasan pesisir agar tetap lestari, untuk itu upaya menjaga lingkungan perairan agar tetap terjaga dari bahaya bahan-bahan berbahaya perlu dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama. Khusus untuk lauk pukek masyarakat dihimbau agar tidak lagi menggunakan plastik kantong dalam berbelanja. Pencemaran lingkungan yang banyak terjadi saat ini adalah sampah plastik yang hanyut diwaktu hujan dan dibawa kelaut melauai sungai-sungai yang ada di Kota Padang.





**Gambar: 6.10 Wawancara dengan pengelola warung Lauk Pukek dan restoran di Kota Padang**

### 6.11 Peranan UKM perikanan

Peranan UKM perikanan dalam upaya mempercepat proses transaksi hasil perikanan melalui proses pengolahan telah dilakukan oleh para wanita-nelayan, melalui kelompok pengolah yang ada di masing-masing wilayah pesisir di Kota Padang. Terdapat beberapa pusat pengolahan di Kota Padang dengan beraneka macam jenis produk yang dihasilkan. Pada umumnya mereka bekerja berkelompok sesuai dengan produk-produk khas mereka seperti terlihat pada Tabel di bawah ini:

**Tabel 6.1 Kelompok Pengolah Ikan Kota Padang**

No.	Nama Kelompok	Jenis Produk	Alamat
1	Poklhasar Lebon	Rendang ikan, Maco tuna badarai, abon ikan	Filano
2	Poklhasar Makmur Abadi	Rendang Ikan, Abon ikan, Roti Abon, Kerupuk Ikan	Mato Aia Padang Selatan
3	Poklhasar Bunga Bangsa	Abon Ikan, Selai Rumput laut	Bungus
4	Poklhasar Crysantium	Sala Lauk, Piciak, Rendang Tuna	Alang Laweh
5	Poklhasar Sinar Keluarga	Lele Kering	Kuranji
6	SP3N Koto Tengah	Abon Ikan, Kerupuk	Koto Tengah

		Maco, Sala Lauk, Palai Bada	
7	Poklahsar Fagha Mitra Mandiri	Abon Ikan, Pangsit, Stick Tuna	Pasie Nan Tigo

**Sumber:** DKP Kota Padang.

Permasalahan yang timbul dibidang pengolahan ini adalah kontinuitas bahan baku yang selalu kekurangan. Hal ini disebabkan oleh musim ikan yang selalu berfluktuasi. Permintaan dari konsumen cukup tinggi dibidang pengolahan ini, namun terkendala oleh bahan baku yang kurang. Sumber bahan baku berasal dari hasil tangkapan bagan, payang, dan pukot tepi. Dukungan Pemerintah Kota Padang terhadap pengolahan hasil perikanan sangat tinggi sehingga outlet untuk pemasaran telah disediakan, begitu juga pakaging dan lebeling dari produk olahan telah disediakan. Diharapkan kedepan pengolahan hasil perikanan semakin tinggi, khususnya permintaan dari luar provinsi disebabkan cita rasanya yang enak dan penuh gizi. Contoh produk dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar: 6.11 Produk olahan UKM di Kota Padang

Upaya pemerintah melalui Kementerian Perikanan dan Kelautan telah membangun pusat UKM di Pasie Nan Tigo, fasilitas ini dapat berjalan jika saat musim ikan, jika tidak musim maka fasilitas ini tidak berjalan. Seperti terlihat pada gambar berikut:



Gambar: 6.12 Pusat Pengolahan UKM di Pasie Nan Tigo Kec. Koto Tengah

Hapsari, Hakim, dan Soeaidy (2014) dari hasil penelitiannya mengemukakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Usaha Kecil Menengah (UKM) berperan penting dalam perekonomian daerah khususnya dalam hal penciptaan kesempatan kerja. Hal ini didasarkan pada kenyataannya bahwa, disatu pihak jika jumlah pengangguran meningkat mengikuti jumlah pertambahan penduduk tiap tahunnya, maka harus diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja baru yang mendukung, seperti UKM. Jenis UKM yang relatif padat karya, sehingga memungkinkan membantu penyerapan tenaga kerja yang tidak terserap. Dari potensi alam yang mendukung Kota Batu memiliki kriteria untuk penumbuhan iklim usaha UKM. Dari hasil analisa yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa faktor Modal dan Laba UKM yang secara langsung dan signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kota Batu.

### 6.12 Peran Lembaga Perguruan Tinggi

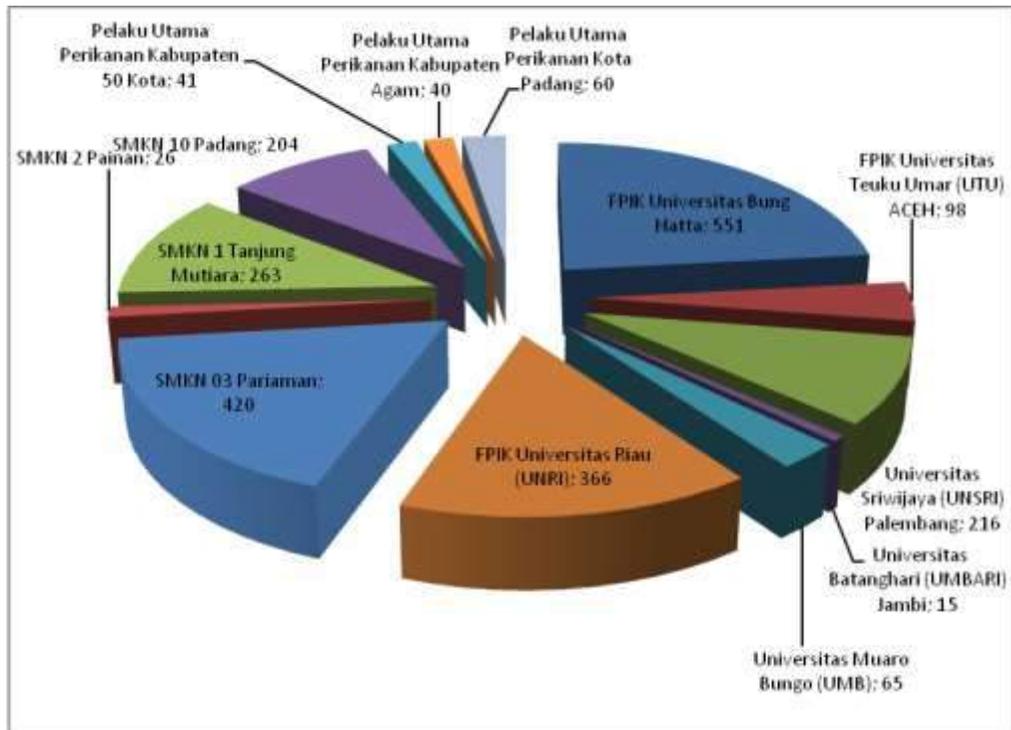
Peran lembaga perguruan tinggi selama ini belum dirasakan oleh masyarakat nelayan. Hal ini disebabkan kurangnya dana dari perguruan tinggi dibidang PKM, dengan berjalannya waktu dana dari perguruan tinggi dan dari kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terus meningkat, terlebih lagi dengan bergantinya lembaga pendidikan tinggi menjadi Menristek Dikti, maka geliat tersebut dirasakan oleh para akademisi. Pendidikan tinggi di Kota Padang yang memiliki Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan adalah Universitas Bung

Hatta. Universitas Bung Hatta sejak berdirinya pada tahun 1982 dengan jumlah alumni ± 2.000 orang. Perjalanan waktu terus berlangsung sehingga Bung Hatta terus berbenah diri dengan menghasilkan sarjana perikanan yang telah mengaplikasikan ilmu di berbagai bidang dan telah menyebar di wilayah Nusantara. Pada saat ini Fakultas Perikanan telah menerapkan kurikulum berbasis kompetensi sehingga para lulusannya dapat bekerja sesuai kompetensi yang dimiliki. Dengan perubahan kurikulum tersebut maka, Fakultas Perikanan telah mengacu kepada SKKNI dan LSP-KP telah menunjuk Fakultas Perikanan sebagai TUK (Tempat Uji Kompetensi untuk wilayah Sumatera), dan baru-baru ini telah berhasil sebagai TUK terbaik tingkat Nasional. Upaya-upaya tersebut baru dapat dirasakan oleh masyarakat dengan telah melakukan uji kompetensi terhadap mahasiswa dan para pelaku perikanan seperti: nelayan, pengolah, dan penyuluh perikanan. Untuk lebih jelasnya peranan perguruan tinggi dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 6.2 Jumlah Peserta Uji Kompetensi di TUK FPIK Univ. Bung Hatta Tahun 2014 – 2016 Per Instansi

No	Lembaga	Jumlah
1	FPIK Universitas Bung Hatta	551
2	FPIK Universitas Teuku Umar (UTU) ACEH	98
3	Universitas Sriwijaya (UNSRI) Palembang	216
4	Universitas Batanghari (UMBARI) Jambi	15
5	Universitas Muaro Bungo (UMB)	65
6	FPIK Universitas Riau (UNRI)	366
7	SMKN 03 Pariaman	420
8	SMKN 2 Painan	26
9	SMKN 1 Tanjung Mutiara	263
10	SMKN 10 Padang	204
11	Pelaku Utama Perikanan Kabupaten 50 Kota	41
12	Pelaku Utama Perikanan Kabupaten Agam	40
13	Pelaku Utama Perikanan Kota Padang	60
	Jumlah	2365

Untuk lebih jelasnya seperti terlihat pada gambar berikut:



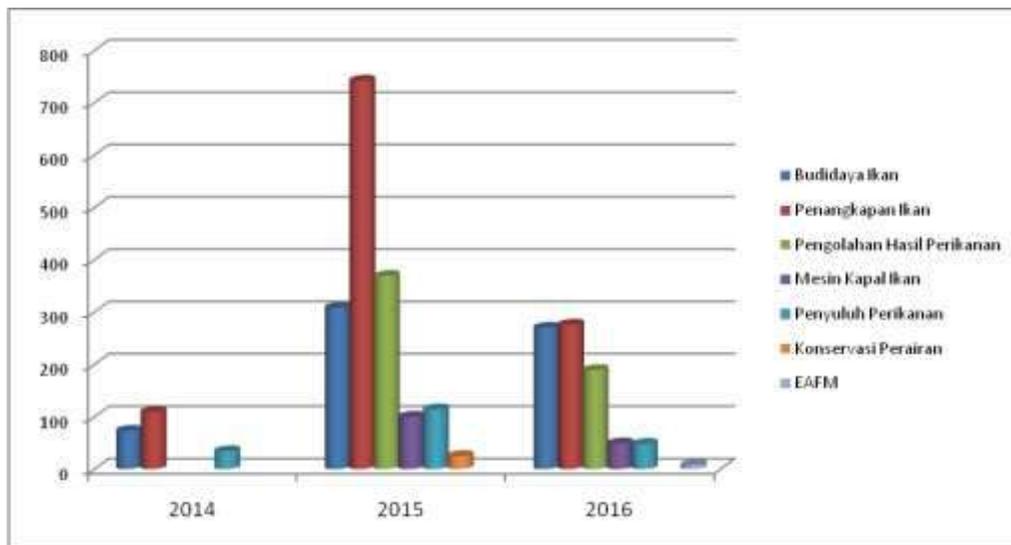
Gambar: 6.13 Peserta Uji Kompetensi per Instansi

Untuk peserta yang berasal dari Universitas Bung Hatta dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 6.3 Jumlah Peserta Uji Kompetensi di TUK FPIK Univ. Bung Hatta Tahun 2014 - 2016 Per Bidang

No.	Bidang	2014	2015	2016	Jumlah
1	Budidaya Ikan	73	308	270	651
2	Penangkapan Ikan	109	742	276	1127
3	Pengolahan Hasil Perikanan		369	189	558
4	Mesin Kapal Ikan		100	49	149
5	Penyuluh Perikanan	34	114	48	196
6	Konservasi Perairan		25		25
7	EAFM			8	8
	Jumlah	216	1658	840	2714

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar : 6.14 Peserta Uji Kompetensi di TUK FPIK Bung Hatta

Upaya ini terus dilanjutkan oleh Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta, dan pada saat in LSP-KP telah mempercayai TUK FPIK untuk menguji mahasiswa dan instansi lain termasuk siswa SMK kelautan dengan jumlah 1600 orang, dan pada saat sedang berlangsung di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta.

Menurut Dahlan (2016) mengemukakan bahwa tanggung jawab Perguruan Tinggi sesuai dengan Pasal 2 Bab II Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dinyatakan bahwa tujuan Pendidikan Tinggi *pertama*, menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian. *Kedua*, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, perguruan tinggi berkewajiban membekali mahasiswanya dengan seperangkat kurikulum, yang memungkinkan mereka memiliki sejumlah kompetensi. Apa yang telah dikemukakan oleh Dahlan ternyata Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta telah

melaksanakan hal tersebut, sehingga memperoleh juara pertama TUK se Indonesia.

Lebih lanjut Suhaedy (2016) mengemukakan bahwa laut adalah masa depan bangsa. Pengelolaan laut dengan prinsip kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan dapat mengantarkan Indonesia pada kejayaan bahari seperti masa lalu. Dibantu dengan kebijakan yang tepat, anak-anak pelaku utama sektor perikanan, seperti nelayan, petambak, dan pembuat garam, akan mudah mengakses pendidikan vokasi di jenjang menengah dan tinggi. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan bisa terjadi di kalangan warga pesisir yang umumnya miskin.

Dalam upaya memajukan pendidikan di Indonesia Susi Pudjiastuti (2016) Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia mengemukakan bahwa Lulusan Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta dapat membangun Industri di dalam negeri untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pesan saya adalah kata ibuk menteri sejauh-jauh anda keluar negeri, lebih baik kalian dalam negeri. Bangun Perikanan di dalam negeri dalam acara pelantikan 476 wisudawan STP Tahun Akademik 2015/2016 di Jakarta. Di dalam dunia kerja selain pendidikan dibutuhkan dua hal penting yang dapat menunjang seseorang di dunia kerja, yaitu kejujuran dan kedisiplinan. Selain itu, diperlukan pula sikap yang pantang menyerah untuk menumbuhkan dua hal penting tersebut. Susi menegaskan, sebagai negara yang besar, sudah seharusnya Indonesia menjadi bangsa yang mandiri. Kedaulatan bukan sekedar keamanan sebuah negara, tapi sektor kelautan dan perikanan adalah pilar ekonomi yang wajib kita kuasai. Kita harus mandiri serta terbebas dari negara manapun.

Lebih lanjut Mawangi (2016) mengemukakan bahwa problem lain yang dimiliki kampus agaknya terletak pada kurangnya penghayatan atas makna kewajiban mengabdikan untuk masyarakat. Pasalnya, banyak kampus justru memilih mengejar status internasional atau nilai akreditasi terbaik. Pada hal, universitas berkewajiban peduli masalah bangsa, bukan melulu mengejar status kampus bertaraf internasional kata Riris K. Sarumpaet Guru besar FIB UI. Urgensi penelitian adalah menyelesaikan masalah di masyarakat, sehingga cukup aneh jika ada universitas yang tak menjalankan kewajiban tersebut. Universitas perlu menjamin bahwa temuan penelitian dan pengabdian masyarakat dapat

digunakan pemerintah serta masyarakat, misalnya saja membantu proses pembuatan kebijakan.

### **6.13 Model Strategi Pengentasan Kemiskinan Nelayan Ditinjau dari Perspektif Multi Dimensi di Kota Padang**

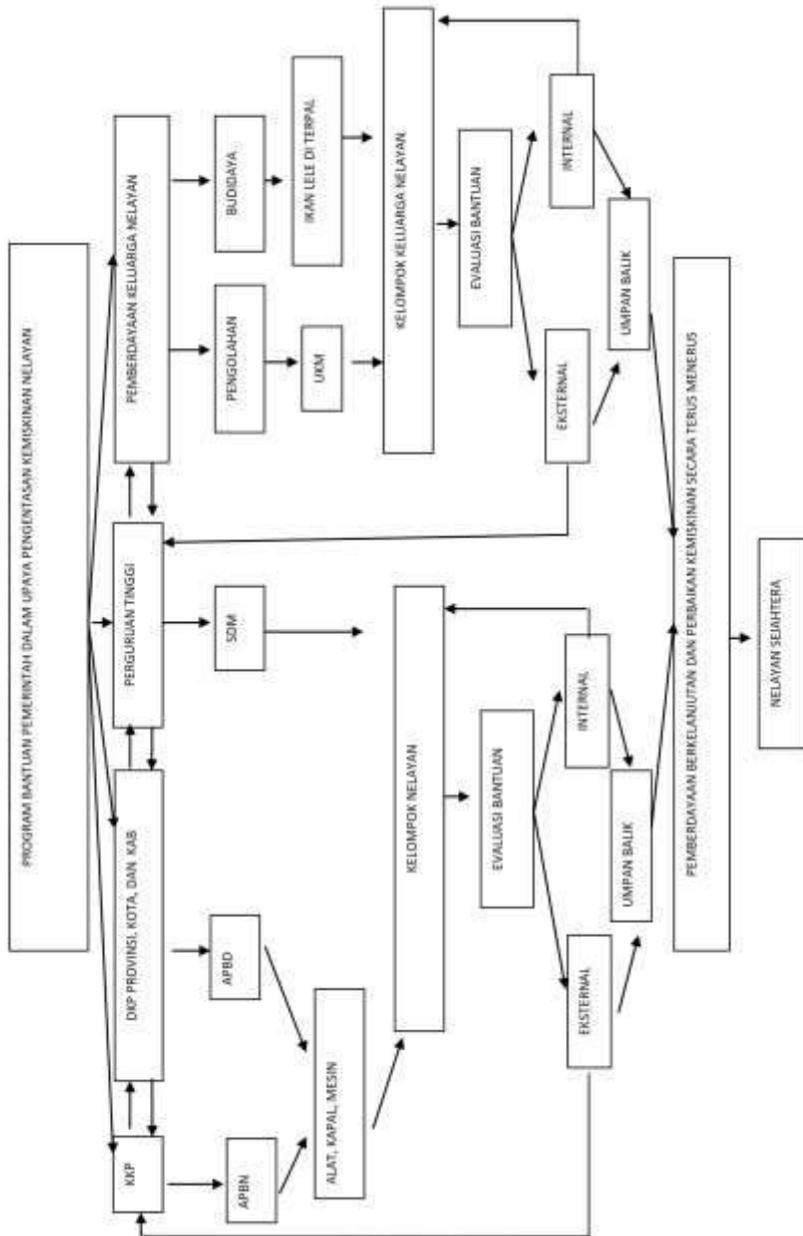
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh model Strategi Pengentasan Kemiskinan Nelayan Ditinjau dari Perspektif Multi Dimensi di Kota Padang, seperti terlihat pada bagan di bawah ini.

Dari bagan di bawah yang paling penting dilakukan adalah evaluasi bantuan sebelum dan sesudah diberikan tidak pernah dilakukan pemerintah. Oleh karena itu perlu kerjasama yang terintegrasi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat nelayan di Kota Padang. Kerjasama selama ini terbatas pada kebutuhan akan pekerjaan-pekerjaan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam bentuk proyek-proyek kajian. Kajian tentang upaya-upaya dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi masih kurang. Kita juga patut berterimakasih kepada Menristek Dikti dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan masyarakat melalui ibah PKM-PKM di perguruan tinggi yang aplikatif untuk masyarakat. Hal-hal seperti inilah yang harus dikejar dalam upaya percepatan pengurangan masyarakat miskin di Indonesia.

Evaluasi berikutnya adalah bagaimana dana yang diberikan kepada masyarakat nelayan dalam bentuk bantuan alat tangkap, mesin, dan kapal terlebih dahulu dilakukan identifikasi lapangan apakah bantuan tersebut sudah sesuai dengan kondisi lapangan seperti: jenis perairan, lingkungan perairan, kondisi topografi lautan, oceanografi, serta keinginan masyarakat terhadap yang dibutuhkan terhadap bantuan tersebut. Jika tidak dilakukan maka akan terjadi pembaziran bantuan karena tidak sesuai dengan kondisi dan situasi lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Kedepan juga diharapkan bahwa bantuan dari dana pusat yang bersumber dari APBN dan DAK tidak mengalami perubahan sehingga koordinasi antara pusat dan daerah menjadi solid. Kekecewaan masyarakat kadang-kadang timbul disebabkan kurangnya komunikasi antara

pusat dan daerah masalah bantuan sehingga jumlah yang direncanakan berubah secara mendadak baik dalam bentuk jumlah dan besarnya.

Untuk bantuan yang berasal dari APBD Provinsi, Kota, dan Kabupaten telah berjalan sebagaimana mestinya. Dari hasil pengamatan dilapangan telah terlihat secara transparan mulai dari penganggaran, pembelian, sampai kepada pelaporan sudah sesuai sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah.



Gambar 6.13: Model strategi pengentasan kemiskinan nelayan ditinjau dari perspektif multi dimensi di Kota Padang

Persoalan timbul jika masyarakat penerima bantuan lebih besar dari paket-paket yang akan diberikan. Oleh karena itu kedepan diharapkan bantuan-bantuan tersebut benar-benar berkelanjutan sesuai dengan terget pemerintah daerah masing-masing. Semoga upaya-upaya yang telah berjalan ini secara nyata dapat merubah pola pikir masyarakat di kawasan pesisir terhadap bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kita berharap kerjasama antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dan pusat saling besinergi dalam upaya pengentasan kemiskinan nelayan di Kota Padang khususnya dan dikota-kota lain umumnya.

Tahap berikutnya adalah bagaimana upaya memberdayakan keluarga nelayan dalam upaya meningkatkan pendapatannya, dua faktor yang sangat menonjol disini yaitu: bidang pengolahan dan usaha budidaya ikan lele dengan terpal. Di Kota padang upaya ini cukup berhasil sehingga pemerintah membangun UKM pengolahan dengan dana 20 Milyar yang berpusat di Pasir Sebelah Kecamatan Koto Tengah dan usaha budidaya ikan lele dengan terpal melalui kelompok-kelompok wanita nelayan. Persoalan pemasaran tidak ada kendala disebabkan adanya upaya-upaya pengolahan ikan lele, berupa lele asap yang harganya lebih tinggi dari lele segar. Oleh karena itu model ini menurut peneliti cukup berhasil di Kota Padang.



## **BAB VII**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **7.1 Kesimpulan**

1. Bantuan untuk nelayan berupa alat tangkap, perahu, dan mesin terus dilanjutkan agar jumlah nelayan miskin dapat dikurangkan.
2. Bantuan yang bersumber dari dana APBN dan APBD jangan dipotong sehingga jumlah penerima dapat ditingkatkan
3. Perlu dilakukan evaluasi setelah bantuan tersebut digulirkan sehingga dampak bantuan dapat terlihat
4. Peran Pelabuhan Perikanan Nusantara Bungus perlu ditingkat, baik dari segi pelayan dan jasa lainnya.
5. Diharapkan PT. Dempo kedepan dapat membeli hasil tangkapan nelayan tradisional untuk diolah menjadi produk lokal seperti: Nuget, stick, bakso, risoles, dan otak-otak.
6. Infrastruktur TPI perlu dilengkapi untuk kebutuhan nelayan dalam menangani ikan hasil tangkapan mereka, fasilitas parkir, dan cold storage, serta kebersihan lingkungan perlu ditingkatkan.
7. Perlu dilakukan evaluasi sistem ekspor agar dapat prosesnya lebih cepat dengan menggunakan teknologi yang lebih baik, sehingga proses pengiriman dapat lebih cepat
8. Peningkatan kualitas restoran dan rumah makan dari segi mutu makanan dan keanekaragaman menu terus dilakukan agar menjadi pusat wisata kuliner Kota Padang
9. Kekurangan bahan baku untuk produk pengolahan dapat dilakukan dengan cara peningkatan jumlah alat tangkap, kualitas lingkungan dan sumberdaya dengan menjaga dari sampah dan zat berbahaya lainnya.
10. Peran perguruan tinggi terus ditingkatkan dengan kerjasama LSP-KP untuk memberikan pendamping ijazah berupa sertifikat kompetensi bagi mahasiswa, siswa, masyarakat, dan penyuluh perikanan.

## **7.2 Saran**

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu membangun sistem monitoring dan evaluasi bantuan dan program yang diberikan
2. Pelabuhan perlu membangun SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) dan air bersih
3. TPI dan PPI perlu ditingkatkan infrastruktur untuk menunjang aktifitas bongkar dan muat hasil tangkapan
4. TPI dan PPI yang belum berfungsi disebabkan pendangkalan agar segera dilakukan pengerukan dalam rangka melancarkan arus masuk dan keluar kapal dan perahu
5. Membangun sistem pelayanan yang baku agar proses ekspor dapat lebih cepat

## **BAB VIII**

### **NELAYAN ASET BANGSA PERLU DISEJAHTERAKAN**

Akhir-akhir ini sektor perikanan sudah menunjukkan peranannya dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini terlihat bahwa kontribusi sektor perikanan memegang peranan penting dalam memacu ekspor Indonesia, melalui produk-produk perikanan di pasaran dunia, dan telah mendorong para wirausahawan muda menggeluti sektor industri perikanan. Kondisi Indonesia saat ini memegang peranan penting dalam mensuplai makanan yang bernilai gizi tinggi ini ke berbagai belahan dunia. Artinya sector perikanan mampu meningkatkan nilai tambah dalam upaya peningkatan gizi masyarakat dunia termasuk di Asia. Hal ini tidaklah mudah bagi bangsa Indonesia sebagai Negara bahari yaitu Negara laut yang memiliki banyak pulau (Burhanuddin, S dkk, 2003) sudah dimulai sejak abad XIV dan abad XV. Bila kita lihat kebelakang kejayaan laut Indonesia sudah dimulai dari kejayaan dalam sektor perdagangan di zaman Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan majapahit dimana Selat Malaka sebagai pintu gerbang yang dilayari oleh pedagang-pedagang dunia yang dikuasai oleh bangsa Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan zaman yang telah menglobal ini jumlah penduduk dunia semakin bertambah dari waktu ke waktu sampai saat ini jumlah penduduk dunia sudah mencapai ± 6.8 milyar jiwa (Koalisi Advokasi Laut Aceh, 2013).. Hal ini menuntut peningkatan jumlah makanan yang semakin banyak dan berkualitas baik dalam bentuk segar dan olahan. Oleh karena itu kedepan bangsa Indonesia harus memanfaatkan kesempatan ini dalam menyediakan produk-produk perikanan yang berkelanjutan. Kajian-kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa laut bukan saja sebagai bahan penghasil makanan juga mampu sebagai pemersatu bangsa melalui pelayaran, perdagangan serta hubungan cultural dan politik (Braudel, 1976).

Bila kita lihat perkembangan produksi perikanan dunia saat ini, FAO mengatakan bahwa sektor perikanan telah mensuplai sekitar 145 juta ton ikan pada tahun 2009, memberikan sekitar 16% asupan protein hewani untuk seluruh populasi masyarakat di dunia. Pada tahun 2011 suplai ikan dunia

meningkat menjadi 154 juta ton dan budi daya perikanan (aquaculture) diperkirakan akan menyumbang 60% produksi ikan dunia pada 2020. Ikan yang ditangkap dari alam mencapai 90,4 juta ton pada 2011, naik 2% dari tahun 2010. Sementara budi daya perikanan, terus tumbuh dalam 25 tahun terakhir dan naik 6,2% pada 2011. Penduduk dunia mengonsumsi 130,8 juta ton ikan pada 2011. Sebanyak 23,2 juta ton ikan digunakan untuk produk non-makanan seperti pelet, minyak ikan, kultur, umpan dan produk-produk farmasi. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa ikan terus menjadi bahan pangan yang paling banyak dicari dan diperjual belikan (Chasya's World, 2012).

Sejalan dengan capaian di atas nelayan adalah aset bangsa yang perlu diperhatikan kesejahteraannya. Nelayan adalah orang yang kehidupannya sangat keras berjuang dengan alat tangkap apa adanya dengan teknologi yang sederhana, namun sangat bermakna dan bernilai guna untuk kehidupan manusia di permukaan bumi. Tanpa nelayan manusia di daratan tidak akan tumbuh sempurna tanpa omega 3 dan omega 6 sebagai protein yang dibutuhkan untuk pertumbuhan otak dan tubuh manusia. Begitu pentingnya nelayan dalam keamanan pangan yang bersumber dari hasil laut. Namun kesejahteraan jauh panggang dari api tidak pernah mengeluh dan berkeluh kesah nelayan tetap bertugas sebagaimana adanya. Lebih memperhatikan sepuluh kali melaut dapat satu kali dengan hasil yang memadai namun hanya cukup membayar hutang yang telah digunakan selama 10 kali melaut. Begitulah nasib nelayan yang tidak memiliki jangkauan teknologi yang baik. Berbeda dengan sarjana perikanan yang berbisnis dibidang perikanan tangkap sebagai alumni Fakultas Perikanan Universitas Bung Hatta yang memiliki aset milyaran yang memiliki kapal penangkap ikan purse seine dengan Gross Tonnage yang besar. Nelayan ABKnya sejahtera karena mampu menangkap ikan hingga 20 ton satu trip penangkapan dengan harga ikan yang tinggi dan berkualitas. Para ABKnya mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi dan telah bekerja di pemerintahan, berprofesi sebagai TNI dan Guru.

Oleh karena itu dalam upaya mensejahterakan masyarakat nelayan kata kuncinya adalah perkenalkan teknologi yang mampu menjelajah Samudera Hindia yang penuh dengan ikan-ikan yang bernilai ekonomis tinggi untuk di ekspor ke manca Negara. Jika ini dilakukan tidak mustahil Sumatera Barat akan

berdiri industry-industry perikanan skala besar yang menjadi incaran dari para eksportir berkelas dunia. Para pemikir-pemikir di perguruan tinggi sebaiknya mencari solusi bagaimana agar kita yang dianugrahi 80% laut dapat memanfaatkan lautan sebagai sumber kemajuan di masa depan. Jika para ahli-ahli teknologi mesin dan ahli teknologi perkapalan merancang bangun kapal layaknya kapal-kapal luar negeri yang digerakkan oleh mesin-mesin berteknologi tinggi dengan hasil tangkapan yang baik, maka Indonesia jauh sejahtera dari hasil laut yang beraneka macam jenis ikan. Selama ini yang memanfaatkan sumberdaya ikan kita adalah Negara-negara yang memiliki teknologi yang baik seperti: Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Philipina, dan lainnya melalui illegal fishing. Jika kita lihat sejenak Negara Norwegia yang kehidupannya bergantung dengan laut, nelayan cukup sejahtera, mengapa bisa, kok kita Negara yang kaya dengan keaneka ragam jenis ikan di lautan yang membentang luas nelayan kita miskin. Jawabannya ada pada kita semua sampai kapan kita seperti ini hanya tuhanlah yang tahu semoga tulisan menjadi inspirasi untuk memajukan sektor kelautan dengan semboyan lautan adalah kekayaan kita, anugerah tuhan yang perlu dikelola dengan halus. Bebas dari sampah, polusi, dan limbah-limbah yang meluncur deras menambah kesengsaraan nelayan. Tanganmu semakin meregang menarik tali temali, tubuhmu semakin kurus terbungkus kulit-kulit yang ditutupi keringat yang semakin deras mengalir wajahmu telah lusuh dimakan usia yang masih muda. Semoga nelayan semakin sejahtera di masa hadapan.



## **BAB IX**

### **SAMPAH MENYENGSARAKAN NELAYAN**

Upaya pemerintah Kota Padang dalam pengelolaan sampah perlu mendapat perhatian serius. Anggaran untuk pengelolaan sampah perlu ditingkatkan khususnya dalam pengadaan truk-truk pengangkut sampah. Pemerintah Kota Padang perlu mengkaji berapa kebutuhan truk sampah di masing-masing kecamatan dan kelurahan. Sehingga masyarakat membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Jika tidak masyarakat membuang sampah di sembarang tempat karena tidak adanya tersedia truk bak sampah di lokasi yang telah di tetapkan. Komplen datang dari masyarakat ke DLH bahwa bak sampah harus dipindahkan ke tempat lain agar dengan mudah membuang sampah. Komplen demi komplen selalu membuat DLH pusing karena kebutuhan truk bak sampah tidak mencukupi adanya. Oleh karena itu masalah sampah tidak dapat diselesaikan sampai kapan pun. Yang lebih menyedihkan jika sampah-sampah tersebut masuk ke laut. Maka laut dipenuhi oleh sampah-sampah dengan beraneka macam bentuk sampah, mulai dari sampah plastic, kayu, baju, tilam, bantal dan lain-lainnya. Sampah plastic yang masuk ke laut hal ini membahayakan kehidupan organisme yang hidup di dasar dan di permukaan. Apalagi jika sampah plastic menempel di trumbu karang, maka trumbu karang akan mati karena terhalang oleh sinar mata hari. Dampak sampah ini akan mengganggu perkembangan kehidupan ikan, udang, kepiting dll. Hal ini terlihat dari hasil tangkapan nelayan di kawasan pantai, udang sudah jarang tertangkap sekalipun tertangkap ukuran kecil-kecil, ikan ikan peperek, dan kepiting yang tertangkap juga sama berukuran kecil, seperti terlihat pada gambar di bawah:



Gambar 9.1 Sampah Hasil Tangkapan Nelayan

Hal ini merupakan kenyataan jika kita melihat di kawasan pesisir kota padang yang dilakukan oleh nelayan pukat pantai. Untuk menangkap satu baskom ikan perlu dilakukan 2- 3 kali penangkapan. Ternyata yang tertangkap yang paling banyak adalah sampah-sampah yang di buang masyarakat ke laut, mulai dari bungkus2 pencuci pirang kantong kresek, sampah pipet atau sedotan dll. Oleh sebab itu sampah-sampah ini dapat menyebabkan kesengsaraan masyarakat nelayan. Semakin hari kehidupan mereka semakin sulit, sementara harga ikan terus menaik, juga mengancam masyarakat dengan berkurangnya produksi ikan dari para nelayan, maka masyarakat akan kekurangan protein yang berasal dari ikan. Program pemerintah dalam upaya peningkatan konsumsi ikan masyarakat juga terkendala akibat memburuknya kondisi laut kita. Oleh karena itu kita berharap masyarakat sadar betapa pentingnya menjaga laut dari sampah, memelihara hutan mangrove, dan padang lamun, dalam upaya menyelamatkan keberlanjutan kehidupan ikan di lautan. Jika sampah terus bertambah memasuki laut maka tidak jarang ikan yang kita konsumsi sudah tercemar dengan mikro plastic. Mari kita bergerak bersama masyarakat dan para pejabat turun kelapangan mengajak masyarakat untuk membangun kesadaran melalui masjid dalam pengelolaan sampah jika setiap KK membayar Rp. 10.000/KK, maka sampah akan terorganisir ke tempat-tempat sampah yang telah disediakan dan diangkut secara berkala pagi dan sore hari. Oleh karena itu kita tumbuhkan kesadaran itu jadi pejabat turun kelapangan, zaman ini tidak bisa lagi pejabat duduk manis dikantor harus banyak turun kelapangan, seingga kelihatan oleh masyarakat pejabat mau berpartisipasi turun kelapangan untuk mengelola sampah tdk perlu bantuan yang besar-besar sediakan becak sampah di setiap masjid dan pemungut sampah dibayar dengan iuran warga. Insya Allah masalah sampah dapat diatasi dengan kesadaran masyarakat yang tinggi dengan melihat para pejabat turun kebawah bersama masyarakat baik Kota, Kecamatan, Lurah, RW, dan RT saling bahu membahu dalam mengelola sampah. Semoga terwujud Kota Padang bebas dari sampah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2013. *Pembangunan Ekonomi Maritim*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Agunggunanto, EY (2011) Analisis Kemiskinan Nelayan dan Pendapatan Keluarga nelayan Kasus di Kecamatan Wedung Kab. Demak, Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. Juli 2011, Volume 1, Nomor 1.
- Ahmed, A. U., and S. Neelormi. 2008. *The Impacts of Climate Change on Marine Socio- ecological Systems: The Plight of Coastal Fisherfolk Communities in Bangladesh*. Article presented at *Coping with global change in marine social-ecological systems*. 8- 11. Rome FAO.
- Akbarini, T.U, Gumilar, I, dan Grandiosa, R (2012) Kontribusi Ekonomi Produktif Wanita Nelayan Terhadap Pendapatan Keluarga Nelayan di Pangandaran, Kabupaten Ciamis. *Jurnal Perikanan dan Kelutan*. Vol, 3, No.3 September 2012, 127-136.
- Alkire, S. & J. Foster. (2008). *Counting and Multidimensional Poverty Measurement*. Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) Working Article Number 7.
- Ariyanti dan Santoso (2015) Analisis Kemiskinan Nelayan Perikanan Tangkap Di Pantai Sendang Biru Kabupaten Malang, Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*.
- Arsyad. A (2007). Analisis Sistem Pengelolaan Perikanan Artisanal Berkelanjutan (Studi Kasus di Kelurahan Pulau Abang Kecamatan Galang, Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau). Disertasi Pada Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Béné, C. (2003). When fishery rhymes with poverty: A first step beyond the old paradigm on poverty in small-scale fisheries. *World Development*, 31(6), 949-975. 39
- Braudel, F 1976. *The Mediterranean World in the Age of Philip II*. Terjemahan S.Reynold. Vol. I (New York:Harper Colophon Book, 1976) 276.

- Burhanuddin, S dkk, 2003. Sejarah Maritim Indonesia: Menelusuri Jiwa bahari Bangsa Indonesia Dalam Proses Integrasi bangsa (Sejak jaman Prasejarah hingga Abad XVII.
- Chasya's World, 2012, Konsumsi Ikan Penduduk Dunia dan Hubungannya dengan Tingkat Kecerdasan.
- Dahlan, F.Z (2016). Wisuda dan Pengangguran. Padang Ekspres Rabu, 30 Maret 2016.
- De Janvry, A, and Sadoulet, A (2000). Rural poverty in Latin America: Determinants and exit Paths. " Food Policy 25 (4): 389-409.
- Dikrurahman dan Sofhani,TF (2015) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Kelompok Nelayan Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus: Kelompok Nelayan Di Pulau Temoyong, Kecamatan Bulang, Kota Batam): Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota B SAPPK V2N1.
- Elfindri (2002). Ekonomi Patron-Client: Fenomena Mikro Rumah Tangga Nelayan dan Kebijakan Makro. Padang Andalas University Press.
- .....(2007) Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan: Desain dan Implementasi. Jurnal Ipteks Terapan. Vol 1, No. 3 Desember 2007. 1-18.
- Elfindri dan Saputra, W (2005), Kemiskinan dan Startegi Penyesuaian: Studi Empiris Sumatera Barat dengan Data Susenas 1999 dan 2003, Jurnal Ekonomi Indonesia No.2 Desember 2005.
- Ellis, F. (2000). Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries. Oxford, Oxford University Press.
- Fajriadi et al, (2013) Probabilitas Kemiskinan Nelayan di Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 1, No.1, Februari, 2013.
- Hasanuddin, N.L, Noor, N, Santosa, H.R .2013. Is it possible to eradicate poverty in the fishermen village ? Laboratory for Housing and Human Settlement, Department of Architecture, ITS. international journal of environmental sciences volume 4, no 2, 2013.

- Hapsari, PP, Hakim, A, dan Soeaidy, S (2014) Pengaruh Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi di Pemerintahan Kota Batu). *Wacana*-Vol. 17 N0. 2.
- Hariansyah, R. 2013. strategi rumah tangga nelayan dalam mengatasi kemiskinan (studi nelayan miskin di desa lubuk kecamatan kundur kabupaten karimun) Tanjung Pinang.
- Holstein, J. A., & Gubrium, J. F. (2003). Active interviewing. In J. F. Gubrium & J. A. Holstein (Eds.). *Postmodern Interviewing*. London: Sage.
- Hyatt, S. B. (2001). From citizen to volunteer: neoliberal governance and the erasure of poverty inequality. In L. Goode & J. Maskovsky (Eds.), *The New poverty studies: The Ethnography of power, politics and impoverished people in the United States*. New York University Press.
- Islam, M. R. 2006. Managing Diverse Land Uses in Coastal Bangladesh: Institutional Approaches . In *Environment and Livelihoods in Tropical Coastal Zones*, eds. C. T.
- Hoanh, T. P. Tuong, J. W. Growing and B. Hardy, 237-248. CAB International.
- Jentoft, S., & Midre G. (2011). The meaning of Poverty: Conceptual Issues in Small-Scale Fisheries Research. In S. Jentoft & A. Eide. *Poverty Mosaics: Realities and Prospects in Small-scale Fisheries*. Verlag (forthcoming)
- Junaidi (1991). Tempat Pelelangan Ikan Masalah dan Pengembangannya di Kota Padang.
- .....(1992). Dampak Bantuan Paket Teknologi Penangkapan Ikan Terhadap Nelayan Tradisional di Kepulauan Mentawai (Studi Kasus di Desa Malilimok Kec. Siberut Selatan Kab. Padang Pariaman
- ..... (1992). Dampak Teknologi Terhadap Effisiensi Usaha Perikanan dengan Purse Seine di Air Bangis Kec. Sei. Beremas Kab. Pasaman
- ..... (1994). Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Nelayan Tradisional Studi Kasus di Dua Desa Pantai Kec. Sei. Limau Kab. Padang Pariaman.

- ..... (2005). Kointegrasi Harga Pasaran Tuna di Sumatera Barat, Indonesia.
- ..... (2008). The Implementation of Auction System on The Price of Tuna Fish in West Sumatera. International Conference 2008 on Quantitative Method Used in Economic and Business at University Malahayaty Lampung.
- ..... (2012). Marine Product Processing Industries of West Sumatera Expectations and Challenges in Global Marketing. At The International Conference On Competitiveness of Economy In The Global Market (ICCE).
- Keesing, Roger M. 1989. *Antropologi Budaya: Suatu Perspektif Kontemporer*. Jakarta: Erlangga.
- Koalisi Advokasi Laut Aceh. 2013. Krisis Laut dan Kawasan Pantai, Ancaman Perubahan Iklim
- Kusnadi, 2001. Pengembara Kaum Perempuan Fenomenal: Pelopor dan Penggerak Perekonomian Masyarakat Nelayan. Bandung : Humaniora Utama Press.
- Marheni et al (2014) Pengaruh Dana Bantuan Langsung Masyarakat (Blm) Terhadap Pendapatan Bersih Anggota Kelompok Nelayan Tahun 2012. e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 2 Tahun 2014).
- Narayan, D., Chambers, R., Shah, M., & Petesh, K. (2000). *Voices of the Poor Crying out for Change*. New York/Washington DC: Oxford University Press/The World Bank.
- Odongkara, K. (2005). Poverty in the fisheries: Indicators, causes and Interventions.
- Socio- economic Research Report 2 FIRRI*. Jinja: LVEMP.
- Natalia, M dan Alie, M.M. 2014. kajian kemiskinan pesisir di kota semarang (Studi Kasus: Kampung Nelayan Tambak Lorok). Jurnal Teknik PWK Volume 3 Nomor 1 2014.
- Nazmar (2013). Model Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Skala Kecil Dengan Pengembangan Off-Fishing di Kota Padang. Disertasi

Program Studi Ilmu-Ilmu Pertanian Pemusatan Pembangunan Pertanian. Program Pascasarjana. Universitas Andalas Padang.

Nikijulu, V.P.H (2006). Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Serta Strategi Pemberdayaan Mereka Dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu. Makalah pada Pelatihan Pengelolaan Pesisir Terpadu. Proyek Pesisir, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor, Bogor Tanggal 29 Oktober 2006.

Nurhayati, W. 2014. Konsumsi Ikan Orang Indonesia Masih Kalah dari Malaysia. Detikfinance. Kamis 20/02/2014.

Oktama, R, Z (2013) Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Pendidikan Anak Kelurga Nelayan di Kelurahan Sighi Aras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

Oladimeji, Y.U et al. 2014. determinants of poverty among rural artisanal fishery households in kwara state, nigeria . Journal of Sustainable Development in Africa (Volume 16, No.3, 2014) ISSN: 1520-5509.

Pramono, St A, D (2012) Pengaruh Modal Sosial Terhadap Kemiskinan Rumah Tangga. Jejak (Journal of Economics and Policy. Volume 5 No. 2.

Prastyo, A.G . 2010 . Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan (studi kasus 35 kabupaten/kota di jawa tengah tahun 2003-2007). fakultas ekonomi universitas diponegoro semarang 2010.

Pritchett, Suryadi, Sumarto, (2000), Safety Net and Safety Popes: Comparasing the Dinamics Benefit Incidence of Two Indonesia "JPS" Programs, Jakarta: SMERU Reseach Institute.

Pudjiastuti, S (2016) Menteri Susi Ingin Sekolah Tinggi Perikanan Bangun Industri Nasional. Medan Bisnis, Sabtu, 27 Agustus 2016. Rubrik Industri. Halaman 3.

Purnomo, G, S. 2005. Strategi Bertahan Hidup: Respons Nelayan terhadap Perubahan Kondisi Daerah Penangkapan Ikan di Selat Madura. Yogyakarta: Program Pascasarjana UGM.

- Saidan, C (1998). Peranan Istri Nelayan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat di Kelurahan Miskin Kota Padang. (Studi Kasus Kelurahan Sei. Pisang Kec. Bungus Teluk Kabung dan Kelurahan Pasir Ulak Karang Kec. Padang Utara). Tesis Pascasarjana Unand. Tidak di Publikasikan.
- Saputra, W, (2007) Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan. Desain dan Implementasi. Jurnal IPTEKS Terapan. Volume 1 No. 3 Desember 2007.
- Sari, D,S, Junaidi, Zein, A (2014) Kajian Tentang Kepemilikan Aset Terhadap Perekonomian Rumah Tangga Nelayan Tradisional di Nagari Tiku Kabupaten Agam. Sumatera Barat
- Satria, A, (2009) Pesisir dan Laut Untuk Rakyat. IPB Press.
- Silaen, N, Zein, A, dan Junaidi (2010), Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Nelayan Tonda Dalam Pemanfaatan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Tesis Pascasarjana Universitas Bung Hatta.
- Suhaedy, E, (2016) Siapkan Wirausaha Muda. Masa Depan Indonesia Berada di Laut. Kompas Sabtu, 4 Juni 2016.
- Suarta, N. 2013. Pengaruh kapasitas rumah tangga, budaya dan pemberdayaan terhadap sikap serta keberdayaan rumah tangga miskin di kabupaten karangasem nyoman suartha program pascasarjana universitas udayana denpasar 2013.
- Sugiyarto, T (2016) Ketimpangan dan Kemiskinan. Statistik BPS Provinsi Sumatera Barat. Padang Ekspres, Senin, 26 September 2106.
- Suharto, E. (2002). Coping Strategies dan Kefungsian Sosial: Mengembangkan Pendekatan Pekerjaan Sosial Dalam Mengkaji dan Menangani Kemiskinan. Makalah yang Disampaikan pada Seminar” Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Merancang-Kembangkan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial Yang Bernuansa Pekerjaan Sosial”. Institut Pertanian Bogor.
- .....,E (2005). “ Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung, Rafika Aditama.

- Suherman, A dan Dault, A (2009). Analisis Dampak Sosial Ekonomi Keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Lamongan Jawa Timur. *Jurnal Saintek Perikanan* Vol, 5 No. 1, 2009, 25 – 30.
- Sunoto (2012). *Industrialisasi Kelautan dan Perikanan dan Blue Ekonomi*. Kementerian Kelautan dan Perikanan. 4 Desember 2012.
- Suryati (2005). *dalam* Wijayanti, L, Widado, S, dan Ikhsanuddin (2013) Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura.
- Trijoyo, K, (2007) "Naskah Akademik Tentang Pembagian Hasil Perikanan.
- Ustman, S (2007) *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Waluyani, OD, 2012. *Konsumsi Ikan di Dunia Terus Meningkatkan Hingga Tahun 2021*. Detkfood. Kamis 12/07/2012.
- World Bank (2003), *Kota-Kota dalam Transisi: Tinjauan Sektor Perkotaan Pada Era Desentralisasi di Indonesia*, Urban Development Working Papers No. 7.
- Yonvitner (2014) *Rekonstruksi UU sistem bagi hasil perikanan pro nelayan kecil*. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan* Vol. 1 No. 3 Desember 2014. 192-196. ISSN. 25355 -6226.
- Zein, A (1998). *The Influence of Technological Change on Income and Social Structure in Artisanal Fisheries in Padang, Indonesia*. Dissertation. Centre for Tropical Marine Ecology University of Bremen, Germany.
- Zein, L, W (2008) *Analisis Kontribusi Pendapatan Wanita Nelayan Di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang*. *Jurnal Mangrove dan Pesisir* IX (1), Februari 2009: 12-17 ISSN: 1411-0679.

